



Katalog BPS : 2302004



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA FEBRUARI 2013



Badan Pusat Statistik



Katalog BPS : 2302004



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA FEBRUARI 2013



Badan Pusat Statistik

Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2013

ISSN.

No. Publikasi:

Katalog BPS: 2302004

Ukuran Buku: 29,5 cm X 21,5 cm

Jumlah Halaman: xv + 103 halaman

Naskah: Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan

Gambar Kulit: Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan

Diterbitkan oleh: Badan Pusat Statistik RI

Dicetak oleh: CV. Nario Sari

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) selama periode 2005-2010 dilaksanakan secara semesteran dan sejak Februari 2011 dilaksanakan secara triwulanan. Survei ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat memonitor dinamika ketenagakerjaan secara lebih cepat dan berkesinambungan. Sakernas Triwulan I, II, dan IV menghasilkan angka estimasi sampai dengan level provinsi, sedangkan Sakernas Agustus selain terdiri dari 50.000 rumah tangga sampel Triwulan III, juga terdapat 150.000 rumah tangga sampel tambahan/komplemen sehingga mampu menyajikan angka estimasi hingga tingkat kabupaten/kota.

Publikasi ini menyajikan *series Key Indicators of the Labour Market* (KILM) Triwulan III (Agustus) dan Triwulan IV (November) Tahun 2012, serta KILM Triwulan I (Februari 2013). Indikator-indikator yang ditampilkan mengacu pada KILM yang direkomendasikan ILO, dengan harapan bisa dijadikan sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Dari 20 KILM yang direkomendasikan ILO, baru 13 KILM yang dapat ditampilkan pengukurannya melalui data Sakernas. Beberapa indikator KILM menurut provinsi dan tabel pendukung dalam indikator KILM yang ditetapkan, disajikan pada lampiran publikasi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi kesempurnaan publikasi edisi berikutnya.

Jakarta, Juni 2013
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia



Dr. Suryamin
NIP. 19560805 197903 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	viii
Daftar Lampiran	ix
Daftar Istilah dan Singkatan (Akronim).....	xi
Ringkasan Eksekutif.....	xiii
1. Pendahuluan.....	1
1.1. Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan.....	1
1.2. Sakernas dan KILM.....	2
1.3. Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan.....	4
1.4. Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM.....	6
2. Penjelasan Teknis	9
2.1. Penjelasan Umum.....	9
2.2. Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja.....	12
2.2.1. Partisipasi di Dunia Kerja	13
2.2.2. Indikator Penduduk yang Bekerja	14
2.2.3. Indikator Pengangguran, Setengah Pengangguran (<i>Underemployment</i>), dan Ketidakaktifan.....	18
2.2.4. Indikator Pendidikan dan Melek Huruf.....	21
2.2.5. Indikator Upah dan Biaya Tenaga Kerja	21
2.2.6. Produktivitas Tenaga Kerja	22
2.2.7. Indikator Elastisitas Tenaga Kerja	23
2.2.8. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan	23
3. Partisipasi dalam Dunia Kerja (KILM 1)	25
KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	25
4. Indikator Tenaga Kerja (KILM 2-7)	29
4.1. KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (<i>Employment to Population Ratio-EPR</i>)	29
4.2. KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama.....	33
4.3. KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha.....	37

4.4.	KILM 5. Pekerja Paruh Waktu.....	41
4.5.	KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja	45
4.6.	KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal.....	49
5.	Indikator Pengangguran.....	53
5.1.	KILM 8. Pengangguran.....	53
5.2.	KILM 9. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda.....	56
5.3.	KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan.....	59
5.4.	KILM 12. Setengah Penganggur (<i>Underemployment</i>)	64
5.5.	KILM 13. Tingkat Ketidaktifan	68
6.	Indikator Pendidikan dan Melek Huruf.....	71
	KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf.....	71
	LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur, 2012–2013	26
Tabel 2. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur, 2012–2013	30
Tabel 3. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kelompok Umur, 2012–2013	31
Tabel 4. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2012–2013 (dalam juta)	34
Tabel 5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2012–2013	35
Tabel 6. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2012–2013 (dalam juta)	38
Tabel 7. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2012–2013	39
Tabel 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu, 2012–2013 (persen)	42
Tabel 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2012–2013	46
Tabel 10. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor (Formal dan Informal), 2012–2013 (dalam juta)	50
Tabel 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor (Formal dan Informal), 2012–2013	50
Tabel 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2012–2013 (persen)	53
Tabel 13. Indikator Pengangguran Umur Muda di Indonesia, 2012–2013	57
Tabel 14. TPT Menurut Tingkat Pendidikan, 2012–2013 (persen)	60
Tabel 15. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2012–2013	62
Tabel 16. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Termasuk Setengah Penganggur, 2012–2013 (dalam juta)	64
Tabel 17. Indikator Setengah Penganggur, 2012–2013	65
Tabel 18. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2012–2013	67
Tabel 19. Indikator Ketidaktifan, 2012–2013	68
Tabel 20. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2012–2013	72

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. TPAK Menurut Kelompok Umur, November 2012 dan Februari 2013 (persen)	27
Grafik 2. TPAK Menurut Provinsi, November 2012 dan Februari 2013 (persen)	28
Grafik 3. EPR Menurut Kelompok Umur, November 2012 dan Februari 2013	32
Grafik 4. EPR Menurut Provinsi, November 2012 dan Februari 2013	32
Grafik 5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Provinsi, November 2012 dan Februari 2013	36
Grafik 6. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, November 2012 dan Februari 2013	40
Grafik 7. <i>Share</i> Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, November 2012 dan Februari 2013 (persen)	43
Grafik 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, November 2012 dan Februari 2013 (persen)	44
Grafik 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jam Kerja, Februari 2013	48
Grafik 10. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Sektor (Formal dan Informal), November 2012 dan Februari 2013	52
Grafik 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Sektor (Formal dan Informal) dan Provinsi, Februari 2013	52
Grafik 12. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, November 2012 dan Februari 2013 (persen)	54
Grafik 13. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, Februari 2013	63
Grafik 14. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, November 2012 dan Februari 2013	66
Grafik 15. Tingkat Ketidaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, November 2012 dan Februari 2013 (persen)	70
Grafik 16. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, November 2012 dan Februari 2013	73
Grafik 17. Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Februari 2013	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013 (dalam ribu)	77
Lampiran 2. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur, 2012–2013 (dalam juta)	78
Lampiran 3. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013 (dalam ribu)	79
Lampiran 4. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, 2012–2013 (dalam juta)	80
Lampiran 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013 (persen)	81
Lampiran 6. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013 (dalam ribu)	82
Lampiran 7. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013.....	83
Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2012–2013.....	84
Lampiran 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2012–2013.....	86
Lampiran 10. Indikator Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, 2012–2013.....	87
Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2012–2013.....	88
Lampiran 12. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor (Formal dan Informal), 2012–2013.....	91
Lampiran 13. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013 (persen)	92
Lampiran 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2012–2013 (persen)	93
Lampiran 15. Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2012–2013	94
Lampiran 16. Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2012–2013.....	95
Lampiran 17. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi, 2012–2013 (dalam ribu)	96

Lampiran 18. Tingkat Ketidakaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013 (persen)	97
Lampiran 19. Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2012–2013.....	98
Lampiran 20. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usahadan Jenis Kelamin, 2012–2013 (rupiah)	99
Lampiran 21. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah, 2012–2013 (rupiah)	100
Lampiran 22. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013 (rupiah)	101
Lampiran 23. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah, 2012–2013 (rupiah)	102
Lampiran 24. Tabulasi Silang Batasan Kegiatan Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama.....	103

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>The International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	<i>International Standard Industrial Classification</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KILM	<i>Key Indicators of the Labour Market</i>
MDG's	<i>Millenium Development Goals</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
STP	Setengah Penganggur
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2013, penduduk umur 15 tahun Keatas yang termasuk dalam angkatan kerja sebesar 175,10 juta orang, secara absolut naik 54,73 juta orang apabila dibandingkan dengan keadaan November 2012 (120,37 juta orang) dan naik sebanyak 57,05 juta orang dibandingkan keadaan Agustus 2012 (118,05 juta orang).

Sementara itu, secara nasional, angka EPR pada Februari 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan keadaan November 2012, yaitu sebesar 0,15 poin dari angka 64,97 pada November 2012 menjadi 65,12 pada Februari 2013. Angka ini bisa diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun Keatas, terdapat sekitar 65 orang yang bekerja pada Februari 2013. Jika dibandingkan keadaan Agustus 2012, EPR Sakernas Februari 2013 juga mengalami peningkatan sebesar 1,41 poin dari angka 63,71.

Kontribusi penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama pada Februari 2013 ini tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan November 2012. Dengan persentase tertinggi masih diduduki oleh penduduk bekerja dengan status pengusaha, yang hanya menurun tipis sebesar 0,39 persen dari 47,72 persen menjadi 47,33 persen. Persentase tertinggi berikutnya diduduki oleh penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/ pegawai yang juga menurun

tipis sebesar 0,02 persen dari 36,47 persen menjadi 36,45. Hanya penduduk dengan status pekerjaan sebagai pekerja keluarga yang mengalami kenaikan sebesar 0,41 persen dari 15,81 persen menjadi 16,22 persen.

Hasil Sakernas Februari 2013, memperlihatkan bahwa kondisi lapangan pekerjaan utama di Indonesia masih didominasi oleh sektor jasa-jasa. Hal ini ditunjukkan oleh persentase jumlah penduduk yang bekerja pada sektor jasa-jasa sebesar 44,36 persen, sedangkan sektor pertanian menempati urutan kedua sebesar 35,05 persen dan disusul sektor manufaktur sebesar 20,59 persen.

Tingkat pekerja paruh waktu pada Februari 2013 mencapai 19,43 persen atau mengalami penurunan sebesar 2,47 persen poin dibanding November 2012 (21,90 persen), namun mengalami kenaikan sangat tipis sebesar 0,01 persen poin dibanding Agustus 2012 (19,42 persen). Tingkat pekerja paruh waktu sebesar 19,43 persen pada Februari 2013 dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 19 orang pekerja paruh waktu. Hasil Sakernas Februari 2013 menunjukkan tingkat pekerja paruh waktu perempuan mencapai dua kali lipat lebih tinggi daripada tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 28,72 persen dan 13,62 persen.

Merujuk pada hasil Sakernas baik pada Agustus dan November 2012 maupun Februari 2013, ternyata sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu, yakni pada kisaran dua pertiga dari total penduduk yang bekerja. Sementara penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu pada Februari 2013 mencapai 33,34 persen atau mengalami peningkatan tipis yaitu sebesar 0,19 persen poin jika dibandingkan dengan November 2012 (33,15 persen), namun mengalami penurunan sebesar 0,32 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2012 (33,66 persen).

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2013, dari 114,20 juta orang yang bekerja, sebanyak 53,48 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (60,98 juta orang). Persentase penduduk bekerja di sektor informal pada Agustus 2012 sebesar 53,57 persen, turun menjadi 53,49 persen pada November 2012, dan turun tipis menjadi 53,48 persen pada Februari 2013. Sementara persentase sektor formal pada Agustus 2012 sebesar 46,43 persen, naik mencapai 46,51 persen pada November 2012, dan sedikit meningkat menjadi 46,52 persen pada Februari 2013.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia sedikit berfluktuatif berdasarkan hasil Sakernas pada Agustus dan November 2012, serta Februari 2013. TPT pada Februari 2013 sebesar 5,92 persen naik sebesar 0,13 persen

dibandingkan November 2012 (5,79 persen), dan turun sebesar 0,22 persen poin dibandingkan Agustus 2012 (6,14 persen). TPT sebesar 5,92 persen tersebut mempunyai arti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sekitar 6 orang yang masuk kategori penganggur.

Hasil Sakernas Februari 2013 menunjukkan bahwa TPT penduduk pada kelompok umur muda sebesar 17,53 persen, yang menggambarkan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 18 orang yang menganggur. Angka tersebut turun sebesar 0,06 persen poin bila dibandingkan dengan November 2012 (17,59 persen), dan turun sebesar 2,03 persen poin bila dibandingkan Agustus 2012 (19,56 persen).

Sementara itu, pada Februari 2013, secara umum dapat dikatakan bahwa TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah menengah sebesar 8,78 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok “tidak pernah sekolah” atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah dengan TPT sebesar 2,01 persen.

Berdasarkan Sakernas Februari 2013 jumlah setengah penganggur di Indonesia mencapai 13,56 juta orang (Tabel 16), dimana 7,70 juta orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Sedangkan berdasarkan perbedaan klasifikasi desa-kota,

pada Februari 2013, jumlah setengah penganggur di daerah perdesaan mencapai lebih dari dua kali lipat dibanding di perkotaan. Jumlah setengah penganggur di perdesaan mencapai 9,29 juta orang, sementara di perkotaan hanya sebesar 4,27 juta orang.

Tingkat ketidakaktifan di Indonesia pada Februari 2013 adalah 30,79 persen, artinya dari 100 persen penduduk usia kerja di Indonesia yang tidak aktif dalam pasar kerja (tidak bekerja maupun menganggur) sebanyak 30,79 persen. Tingkat ketidakaktifan pada Februari 2013, jika dibandingkan dengan keadaan November 2012 turun sebesar 0,25 persen poin, bahkan jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012 menurun sebesar 1,33 persen poin.

Secara nasional, hasil Sakernas Februari 2013 tidak menunjukkan perubahan komposisi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan jika dibanding Sakernas pada November 2012. Angkatan kerja saat ini masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar 60,48 persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah menengah sebesar 25,28 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 9,72 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya sekitar 4,52 persen angkatan kerja yang tidak pernah sekolah.

1. PENDAHULUAN

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di Indonesia. Salah satu sumber penyajian indikator ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam upaya memonitor dinamika ketenagakerjaan, agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Indonesia, Badan Pusat Statistik, sejak Triwulan

I Februari 2011 menyusun publikasi yang merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization*-ILO), yaitu Indikator Pasar Tenaga Kerja (*Key Indicators of the Labour Market*-KILM). ILO telah meluncurkan KILM pada tahun 1999 untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada unsur utama dari pasar tenaga kerja dunia. Edisi KILM Indonesia ini merujuk pada KILM yang diterbitkan ILO pada tahun 2005.

1.1. SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh BPS melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dari survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Sampai dengan saat ini, Sakernas mengalami berbagai perubahan, baik dalam periode pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Tahun 1986 sampai dengan 1993 Sakernas dilaksanakan secara triwulanan,

tahun 1994 sampai dengan 2001 secara tahunan setiap bulan Agustus, sedangkan tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Sakernas dilakukan secara semesteran.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 dilakukan kembali secara triwulanan yaitu; bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV), yang penyajian datanya dirancang sampai tingkat provinsi. Namun demikian, untuk pelaksanaan Sakernas Triwulan III (bulan

Agustus) selain sampel triwulanan juga terdapat sampel tambahan, hal ini dilakukan untuk kepentingan angka estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota.

Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas adalah menyediakan data pokok terkait ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Selama periode Februari 2011–Februari 2013, Sakernas dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan jumlah sampel sekitar 50.000 rumah tangga (Sakernas triwulanan) dan 200.000 rumah tangga (Sakernas Agustus). Untuk Sakernas Agustus, jumlah sampel tersebar pada 20.000 blok sensus di seluruh provinsi, baik di daerah

perkotaan maupun perdesaan. Dari 20.000 blok sensus tersebut, diantaranya 5.000 blok sensus adalah sampel Sakernas Triwulan III dan 15.000 blok sensus merupakan sampel Sakernas tambahan. Penambahan jumlah sampel ini bertujuan untuk memperoleh estimasi data hingga tingkat kabupaten/kota. Sebagai catatan, rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus, dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

Dari setiap rumah tangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga, yang mencakup nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, dan umur. Khusus untuk anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun keatas, akan ditanyakan keterangan mengenai status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengangguran, dan pengalaman kerja.

1.2. SAKERNAS DAN KILM

Dengan berbagai macam variabel yang dikumpulkan pada Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi ILO, yaitu KILM. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah, pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain (SP, SUPAS dan Susenas), perlu memperhatikan beberapa hal, karena data-data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pemakai data dalam menginterpretasi dan menganalisa data ketenagakerjaan yang tersedia. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut meliputi:

1) Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP maupun SUPAS bertujuan untuk mengetahui sifat demografi secara umum. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan dalam SP dan SUPAS lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi, Keluarga Berencana, dan ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya, seperti data pengeluaran atau konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan, dan perumahan. Perbedaan tujuan survei ini menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survei tersebut relatif berbeda.

2) Ukuran Sampel

Ukuran sampel dalam Sakernas berbeda dengan ukuran sampel dalam SP, SUPAS, maupun Susenas. Perbedaan ini menyebabkan *sampling error* yang dikandung oleh angka perkiraan dari masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, maka akan semakin besar *sampling error*-nya.

3) Faktor Pengali

Faktor pengali yang digunakan dalam publikasi ini, berdasarkan jumlah penduduk hasil SP2010 final yang diproyeksikan ke bulan Februari 2013.

4) Kualitas Petugas Lapangan

Sampai dengan Semester II (Agustus) 2006, petugas Sakernas hanya terdiri dari pencacah dan pengawas/pemeriksa. Mulai Sakernas Semester I (Februari) 2007 hingga Sakernas Semester II (Agustus) 2010, pencacahan dilakukan secara tim, dalam 1 (satu) tim terdiri dari 2 (dua) pencacah dan 1 (satu) koordinator tim. Petugas-petugas tersebut pada umumnya adalah pegawai BPS yang ada di kecamatan (Koordinator Statistik Kecamatan-KSK) dan BPS Kabupaten/Kota setempat. Sebagian besar dari mereka umumnya telah mempunyai pengalaman dalam berbagai survei maupun sensus serta lebih menguasai medan/lapangan. Sejak 2011, petugas Sakernas tidak lagi secara tim, tetapi terdiri dari pencacah dan pengawas, dimana seorang pengawas membawahi 2-3 orang pencacah.

5) Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat/pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan, banyaknya pertanyaan, maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam Sakernas, telah diusahakan bentuknya ringkas/ sederhana, mudah

dimengerti, serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

6) Waktu Pelaksanaan/Pencacahan

Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, SP, dan SUPAS berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musimannya.

Mengingat bahwa sejak tahun 2011 Sakernas telah dilakukan secara triwulanan, dengan maksud sebagai *early warning system* di bidang ketenagakerjaan, maka perlu disusun rangkaian indikator ketenagakerjaan dengan memanfaatkan data Sakernas tersebut. Penyusunan indikator pasar tenaga kerja

(KILM) pada awalnya dirancang dengan dua tujuan utama, yaitu:

- 1) Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja;
- 2) Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator ketenagakerjaan, untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD*) dan beberapa perwakilan nasional dari Departemen Tenaga Kerja dan kantor statistik berbagai negara.

1.3. PERAN KILM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Identifikasi dan kuantifikasi *inefisiensi* dalam pasar tenaga kerja, seperti *underutilization* tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*) merupakan langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang bekerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian, dan analisa informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal, yang terkait dengan fungsi

pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

- 1) Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*).

Salah satu tujuan agenda ILO mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif, dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Menerapkan konsep "layak"

untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang multitafsir. Persepsi mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan dari satu orang ke orang lain.

Selain pekerjaan yang layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Kurangnya kesempatan kerja selain bisa diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 8 dan KILM 9), juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas dan jenis pekerjaan dapat dilakukan pendekatan, misalnya, dengan mengidentifikasi individu yang masuk dalam kelompok pekerja rentan (*vulnerable employment*), yaitu penduduk bekerja berdasarkan status dan sektor (KILM 3 dan KILM 4), jam kerja yang berlebih/*exceeds working hours* (KILM 6), penduduk bekerja di sektor informal (KILM 7), dan setengah penganggur (KILM 12).

2) Pemantauan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs).

Tujuan utama kebijakan nasional serta strategi nasional pembangunan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) adalah meningkatnya jumlah pekerja penuh (*full employment*), penduduk bekerja yang

produktif, dan penyediaan pekerjaan yang layak (*decent work*). Pekerjaan yang layak dan produktif merupakan isu sentral untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. MDGs pertama memasukkan target baru 1b (yang disepakati pada tahun 2008) yaitu "mencapai pekerja penuh dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan orang-orang muda". Empat indikator yang dipilih untuk memantau kemajuan menuju sasaran 1b dalam MDGs tersedia dalam KILM, yaitu rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*), proporsi penduduk bekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pekerja rentan (*vulnerable employment*), dan tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, sesuai dengan indikator KILM 2, KILM 3, KILM 18, dan KILM 20.

3) Memantau kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin, yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan.

4) Mengkaji tenaga kerja di era globalisasi.

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun sampai saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk menghadapi era

globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini, dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, adanya penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta

perubahan upah dan produktivitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian (*adjustment cost*) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

1.4. ANALISIS PASAR TENAGA KERJA MENGGUNAKAN KILM

Semakin banyak negara yang mempublikasikan angka pengangguran nasional dan data ketenagakerjaan agregat. Namun, pengguna harus bijaksana menggunakan statistik ini dalam rangka melihat dinamika pasar tenaga kerja. Salah satu keuntungan menggunakan tingkat pengangguran agregat, misalnya, relatif lebih mudahnya dalam hal pengumpulan dan komparasi antardaerah. Akan tetapi, melihat angka pengangguran saja dengan mengabaikan unsur-unsur lain dari pasar tenaga kerja yang lain merupakan suatu kekeliruan. Penting untuk menyadari bahwa pengangguran “hanya” merupakan salah satu aspek dalam indikator ketenagakerjaan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam analisis pasar kerja, adalah menentukan rincian status tenaga kerja dalam populasi.

Penduduk umur kerja dapat didekomposisi menjadi orang-orang yang tidak

aktif secara ekonomi (di luar tenaga kerja/bukan angkatan kerja, KILM 13); bekerja (KILM 2), atau tidak bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur, KILM 8). Semakin besar penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran atau bukan angkatan kerja atau keduanya, menunjukkan *underutilized* yang besar dari angkatan kerja yang potensial. Pemerintah yang menghadapi situasi ini semestinya berusaha untuk menganalisis alasan untuk tidak aktif, yang pada gilirannya bisa menentukan pilihan kebijakan yang penting untuk mengubah situasi.

Jika mayoritas penduduk yang aktif secara ekonomi terdiri dari perempuan yang tidak bekerja karena mereka memiliki tanggung jawab rumah tangga, pemerintah mungkin dapat mendorong lingkungan yang bisa memfasilitasi partisipasi ekonomi perempuan,

misalnya melalui pembentukan pusat-pusat penitipan anak atau jam kerja yang fleksibel bagi perempuan. Program untuk menggalakkan pekerjaan pada penyandang cacat juga dapat membantu menurunkan tingkat ketidakaktifan, jika cacat adalah alasan umum untuk tidak aktif. Hal yang lebih sulit adalah mengembalikan orang yang telah meninggalkan pasar kerja ke dalam angkatan kerja karena alasan "putus asa"/*discourage worker*, yaitu karena mereka merasa bahwa tidak tersedia pekerjaan yang sesuai bagi mereka, dan mereka tidak memiliki kualifikasi yang tepat, atau karena mereka tidak tahu ke mana harus mencari pekerjaan.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin (KILM 8), umur (KILM 9), lamanya menganggur (KILM 10), dan tingkat pendidikan (KILM 11), untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran, sehingga bisa menentukan kebijakan pengangguran yang tepat.

Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, diantaranya latar belakang sosial-ekonomi, pengalaman kerja, juga penting untuk dianalisa apabila data karakteristik tersebut tersedia, sehingga dapat menentukan kelompok mana yang menghadapi kesulitan tertentu. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan tingkat kemiskinan dalam suatu negara (KILM 20), sedangkan tingkat pengangguran tinggi dapat

terjadi di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang signifikan dengan insiden kemiskinan rendah.

Di negara-negara berkembang dengan ketersediaan perlindungan sosial yang baik atau bila terdapat berbagai jaminan sosial atau dukungan yang tersedia, maka bagi penduduk bekerja lebih dapat meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan yang lebih diinginkan. Oleh karena itu, masalah di banyak negara berkembang bukanlah tingkat pengangguran yang tinggi, melainkan kurangnya kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi mereka yang bekerja.

Hal tersebut membawa kita pada kebutuhan untuk membedah jumlah total lapangan kerja serta untuk menilai kesejahteraan penduduk yang bekerja, di bawah suatu konsep bahwa tidak semua pekerjaan adalah "pekerjaan yang layak". Jika penduduk yang bekerja terdiri dari sebagian besar bekerja sendiri atau pekerja keluarga (lihat KILM 3), lalu, dibandingkan dengan total penduduk yang bekerja (KILM 2), apakah indikator ini akan kehilangan nilainya sebagai ukuran normatif? Apakah orang-orang ini bekerja? Ya, menurut definisi internasional. Apakah mereka dalam pekerjaan yang layak? Mungkin tidak. Meskipun secara teknis bekerja, beberapa penduduk bekerja yang berusaha sendiri atau pekerja keluarga akan bertahan dengan pekerjaan mereka saat ini sehingga batas antara bekerja

dan menganggur sangat tipis. Hal ini terlihat ketika terbuka lowongan untuk pekerjaan yang bergaji (buruh/karyawan/pegawai) di ekonomi formal, rombongan tenaga kerja ini akan berlomba-lomba untuk mengajukan lamaran.

Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan, untuk menentukan apakah penduduk yang bekerja tersebut umumnya miskin (KILM 20), terlibat dalam kegiatan pertanian tradisional (KILM 4), menjual barang-barang di pasar informal tanpa keamanan kerja (KILM 7), jam kerja yang berlebihan (KILM 6), atau ingin memperoleh pekerjaan tambahan (KILM 12).

<http://www.bps.go.id>

2. PENJELASAN TEKNIS

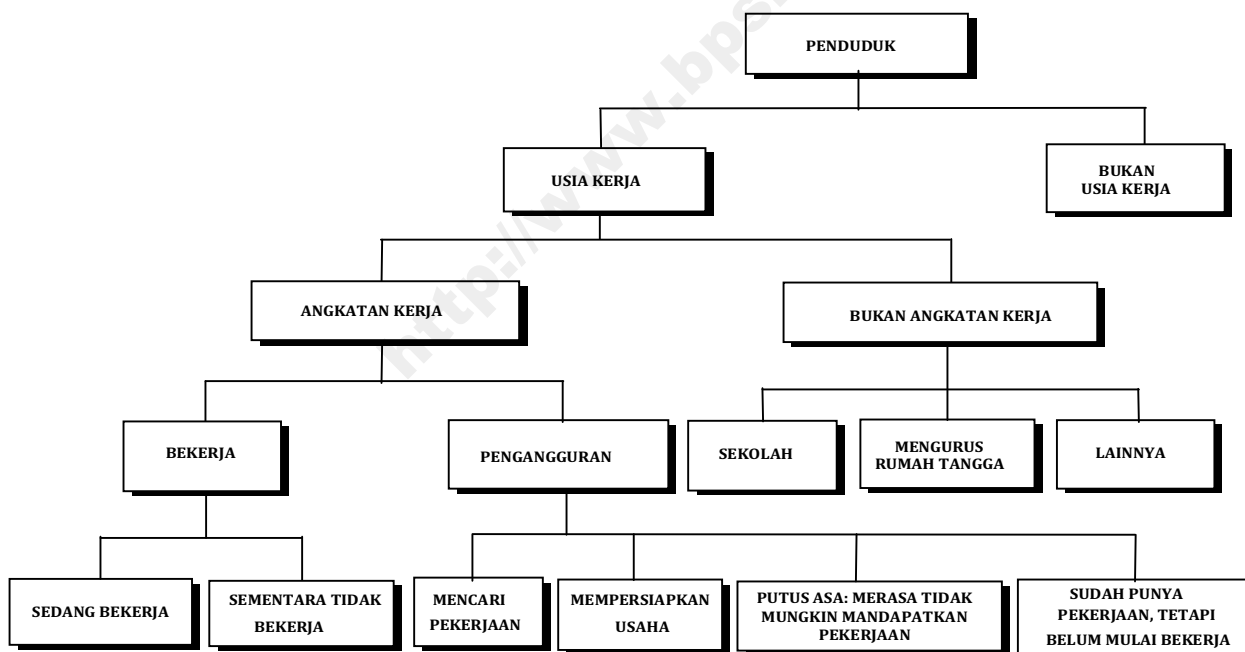
Pada subbab ini, akan disampaikan penjelasan teknis terkait dengan konsep dan definisi yang digunakan dalam Sakernas maupun konsep dan definisi yang digunakan dalam KILM.

2.1. PENJELASAN UMUM

Konsep definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi ILO sebagaimana tercantum dalam buku *“Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Under employment: An ILO Manual on Concepts and Methods”*, ILO 1992. Hal ini dimaksudkan, terutama agar data ketenagakerjaan yang

dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concept*), seperti pada diagram dibawah ini:



Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, umur kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, periode referensi, dan kriteria satu jam.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk umur kerja dan penduduk bukan umur kerja. Penduduk umur kerja dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu sampai sehari sebelum pencacahan.

Umur kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah umur kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari umur 10 tahun) dan tanpa batas atas umur kerja. Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas umur kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasinya. Sebagai contoh, beberapa negara yang menggunakan batas bawah adalah Mesir (6 tahun), Brazil (10

tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun), sedangkan negara-negara yang menggunakan batas atas adalah Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, dan Mexico (65 tahun). Banyak negara seperti Indonesia tidak menggunakan batas atas.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti)).

Yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya. Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara, antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, Federasi Rumor,

dan lainnya. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan, termasuk semua tunjangan dan bonus bagi buruh/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha. Kegiatan bekerja ini mencakup penduduk yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar dan sejenisnya.

Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Yang dimaksud mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru', yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa memperkerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila 'tindakannya nyata', seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, baik telah/sedang dilakukan. Merasa tidak mungkin

mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan yang diinginkan. Atau mereka yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja adalah alasan bagi mereka tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, tapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Periode referensi merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan, dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu yang lalu paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Selain periode referensi seminggu yang lalu, dalam Sakernas juga dikenal kriteria satu jam. Kriteria satu jam secara berturut-turut

digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work*, dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*), dimana apabila batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan, maka akan mengubah definisi penganggur, yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu, input tenaga kerja total berkaitan langsung

dengan produksi total. Hal ini diperlukan, terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai bekerja (*employed*).

BPS menggunakan konsep/definisi “bekerja paling sedikit 1 jam secara berturut-turut dalam seminggu yang lalu” untuk mengkategorikan seseorang sebagai bekerja (*currently economically active population*), tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

2.2. INDIKATOR KUNCI PASAR TENAGA KERJA

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*-ILO) meluncurkan KILM pada tahun 1999, untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia.

Terdapat 20 (dua puluh) indikator yang disusun oleh ILO, yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

1. Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;

2. Indikator penduduk yang bekerja, terdiri dari KILM 2 (Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk), KILM 3 (Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama), KILM 4 (Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha), KILM 5 (Pekerja Paruh Waktu), KILM 6 (Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja), dan KILM 7 (Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal);
3. Indikator pengangguran, *underemployment* (setengah penganggur), dan ketidakaktifan, yang terdiri dari KILM 8 (Pengangguran),

- KILM 9 (Pengangguran pada Kelompok Umur Muda), KILM 10 (Pengangguran Jangka Panjang), KILM 11 (Pengangguran dan Pendidikan), KILM 12 (Setengah Penganggur/*underemployment*), dan KILM 13 (Tingkat Ketidaktifan);
4. Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf);
 5. Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (Indeks Upah Sektor Manufaktur), KILM 16 (Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan), dan KILM 17 (Upah per Jam);
 6. Produktivitas Tenaga Kerja yang termuat dalam KILM 18 (Produktivitas Tenaga Kerja);
 7. Indikator elastisitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 19 (Elastisitas Tenaga Kerja);
 8. Indikator kemiskinan, pekerja miskin, dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 20 (Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan).

2.2.1. PARTISIPASI DI DUNIA KERJA

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk umur kerja (15 tahun Keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan

tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk umur kerja.

Tabel publikasi standar yang dikeluarkan ILO (*KILM 6th ed*) menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dengan standar sebagai berikut: 15+, 15–24, 15–64, 25–54, 25–34, 35–54, 55–64, dan 65 tahun Keatas. Penggunaan kelompok umur ini digunakan di lebih dari 190 negara selama tahun 1980 sampai 2010.

2.2.2. INDIKATOR PENDUDUK YANG BEKERJA

KILM 2. Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*)

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran, dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk

alasan yang tidak selalu positif misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun sumber daya mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan utama dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan utama yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah:

1. Berusaha sendiri;
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar;
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
4. Buruh/karyawan/pegawai;
5. Pekerja bebas di pertanian;
6. Pekerja bebas di nonpertanian;
7. Pekerja keluarga/tak dibayar.

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

- 1) Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai;
- 2) Penduduk yang bekerja dengan status berusaha, terdiri dari :
 - a. Pengusaha, yaitu penduduk bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
 - b. Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;
 - c. Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian;
- 3) Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

Selain itu, disajikan juga persentase pekerja rentan (*vulnerable employment*) terhadap total penduduk bekerja. Konsep pekerja rentan mengacu pada publikasi KILM-ILO, yaitu penduduk bekerja dengan status dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, pekerja bebas baik di pertanian dan

nonpertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa, dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota.

Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Untuk kepentingan penyajian/publikasi, digunakan kategori/sektor sebagai berikut:

- 1) Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan;
- 2) Pertambangan dan penggalian;
- 3) Industri pengolahan;
- 4) Listrik, gas, dan air;
- 5) Bangunan;
- 6) Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel;
- 7) Transportasi, pergudangan, dan komunikasi;
- 8) Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan;
- 9) Jasa kemasyarakatan.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu: **A (Agriculture)**/Sektor Pertanian, **M (Manufacture)**/Sektor Manufaktur dan **S (Services)**/Sektor Jasa-jasa, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System* (Revisi 2 dan Revisi 3).

KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan orang yang bekerja serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu, menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi.

Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari pekerjaan penuh-waktu (*full time*), yang merupakan proporsi dari total penduduk yang bekerja. Dalam hal ini, pekerja paruh waktu yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja penuh-waktu/normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan

pekerjaan penuh-waktu (*full time*), biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea, Amerika dan El Salvador¹⁾. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam kerja per minggu; antara 25 dan 34 jam; antara 35 dan 39 jam; antara 40 dan 48 jam; antara 49 dan 59 jam; dan 60 jam Keatas, sebagaimana data yang tersedia.

KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal

Penduduk yang bekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan

¹⁾ Hussmanns, R., Mehran, F., Verma, V. Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemployment : An ILO manual in concepts and methods. Geneva, International Labour Office, 1990.

penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (*The International Conference of Labour Statisticians-ICLS*) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang selama periode acuan tertentu yang bekerja di setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Selain itu, pekerjaan informal dicirikan oleh ketiadaan kontrak, perlindungan sosial, hak untuk berbagai jaminan dan tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja dan pendapatan pajak, yang mungkin tidak sepenuhnya tertangkap dengan fokus hanya pada pekerjaan di sektor informal.

Konferensi Internasional Statistisi Tenaga Kerja ke-17 mendefinisikan pekerja sektor informal sebagai "karyawan dengan hubungan kerja yang tidak tercakup dalam perundang-undangan atau dalam praktiknya, tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak

tertentu untuk jaminan kerja tertentu (pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau ijin sakit, dll)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk tingkat pekerjaan dan bukan untuk perorangan karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: usaha sendiri informal dan pekerjaan upahan informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, jaminan pekerja atau perlindungan sosial yang dipekerjakan di usaha formal atau informal. Yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Pembedaan ini menyarankan agar pekerja informal dibagi dalam seluruh kategori status pekerja: pengusaha, buruh, berusaha sendiri, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi.

BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan penduduk yang bekerja di sektor formal/informal, yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dan jenis pekerjaan/jabatan²⁾.

²⁾ Lihat lampiran untuk matriks penentuan sektor formal/informal

2.2.3. INDIKATOR PENGANGGURAN, SETENGAH PENGANGGURAN (*UNDEREMPLOYMENT*), DAN KETIDAKAKTIFAN

KILM 8. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif³⁾. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja.

Bersama dengan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (KILM 2), tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja.

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

- 1) Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
- 2) Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
- 3) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;

- 4) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diartikan sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun ada kalanya pengangguran jangka pendek menjadi suatu kondisi yang diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok penduduk bekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Sementara tingkat pengangguran tenaga kerja, dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak

³⁾ Tingkat pengangguran relatif rendah pada orang-orang miskin

memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi penganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi yang diperoleh dari membagi jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok penduduk bekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa denominator/faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, **bukan** jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

KILM 9. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda

Tingkat pengangguran memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan

dan secara aktif mencari dan tersedia untuk bekerja. Pemuda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "pemuda" mencakup orang yang berumur 16 sampai 30 tahun⁴⁾, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun Keatas.

KILM 10. Pengangguran Jangka Panjang

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, Sakernas tidak mengumpulkan informasi mengenai berapa lama seseorang menganggur. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi penduduk

⁴⁾ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika diketahui bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, kebijakan yang mungkin diambil adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi. Tabel yang biasanya disajikan menunjukkan distribusi persentase dari total pengangguran suatu negara sesuai dengan lima tingkat sekolah, tingkat pra-dasar, kurang dari satu tahun, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat sekolah). Sebagai catatan, angka yang ditampilkan bisa berupa distribusi dan bisa berupa *rate*.

KILM12. Setengah Penganggur (*Underemployment*)

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi:

- 1) Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
 - a. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang;
 - b. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.
- 2) Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat ketidakaktifan yang merupakan proporsi penduduk umur kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, jika dijumlahkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 (satu) dikurang TPAK (1-TPAK).

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai suatu kondisi "buruk", misalnya tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita umur 25–34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan dan mengasuh anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah

tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja, misalnya perempuan kepala rumah tangga cenderung memiliki tingkat ketidakaktifan yang relatif rendah. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga.

Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita bisa berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

2.2.4. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi).

Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (*International Standard Classification of Education-ISCED-97*). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan *ISCED-97* adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
- 2) Sekolah dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan, dan Paket B;
- 3) Sekolah menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, dan Paket C;
- 4) Sekolah tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/Sarjana, dan S2/S3.

2.2.5. INDIKATOR UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA

KILM 15. Indeks Upah Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur yang dikenal sebagai sektor formal dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk

bekerja melalui indeks upah pada sektor ini. Tetapi, terdapat survei khusus (Survei Upah dan Survei Struktur Upah)—yang bukan merupakan bagian dari Sakernas—yang dilakukan untuk

mengumpulkan data terkait dengan indikator ini. Oleh karena itu, indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi KILM ini.

KILM 16. Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan

Salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/pendapatan pada status pekerjaan tertentu. Akibatnya, tidak semua penduduk bekerja mempunyai informasi pendapatan/upah. Oleh karena itu, indikator ini juga tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

KILM 17. Upah per Jam

Seperti KILM 15 dan 16 mengenai informasi upah, Sakernas tidak memiliki

informasi upah per jam. Tidak adanya pertanyaan mengenai informasi upah per jam dikarenakan kebanyakan di Indonesia, orang yang bekerja tidak dibayar berdasarkan jam kerja, tetapi hari kerja. Hanya sedikit sekali lapangan pekerjaan yang membayar orang yang bekerja berdasarkan hitungan jam. Selain itu, dalam Sakernas, yang ditanyakan adalah pendapatan sebulan terakhir, sementara untuk jam kerja, ditanyakan jumlah jam kerja seminggu terakhir. Estimasi upah kerja per jam akan sangat berisiko menimbulkan bias statistik. Oleh karena itu, indikator ini tidak dipublikasikan pada publikasi KILM ini.

2.2.6. PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

KILM 18. Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi L (*Labour*/Tenaga Kerja) berperan dalam proses produksi. Tingkat produktivitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian

sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktivitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor padat karya (*labour intencive*) dan sektor padat modal (*capital intencive*). Tetapi, keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi kali ini.

2.2.7. INDIKATOR ELASTISITAS TENAGA KERJA

KILM 19. Elastisitas Tenaga Kerja

Tingkat elastisitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai banyaknya tenaga kerja yang terserap pada proses produksi untuk menghasilkan nilai tambah tertentu. Dengan kata lain, elastisitas tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja terserap setiap peningkatan satu persen pertumbuhan

ekonomi. Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data nilai tambah (PDB/PDRB). Analisis ini merupakan analisis lintas sektor, sehingga tidak bisa ditampilkan dalam publikasi ini.

2.2.8. INDIKATOR KEMISKINAN, PENDUDUK BEKERJA YANG MISKIN, DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

KILM 20. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin, dan distribusi pendapatan juga

memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis ini. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

3. PARTISIPASI DALAM DUNIA KERJA (KILM 1)

KILM 1. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2013, penduduk umur 15 tahun keatas yang termasuk dalam angkatan kerja sebesar 175,10 juta orang, secara absolut naik 54,73 juta orang apabila dibandingkan dengan keadaan November 2012 (120,37 juta orang) dan naik sebanyak 57,05 juta orang dibandingkan keadaan Agustus 2012 (118,05 juta orang), lihat Lampiran 6.

Persentase TPAK mengalami kenaikan dari 68,96 persen pada November 2012 menjadi 69,21 persen pada Februari 2013, yang berarti bahwa persentase tenaga kerja yang aktif secara ekonomi pada Februari 2013 naik sebesar 0,25 persen poin. Jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2012, TPAK Februari 2013 juga mengalami kenaikan sebesar 1,33 persen poin.

Pada Agustus dan November 2012 maupun Februari 2013, TPAK jenis kelamin laki-laki selalu jauh lebih tinggi dibanding TPAK jenis kelamin perempuan. Sebagai gambaran pada Februari 2013, TPAK laki-laki mencapai 85,12 persen sementara pada perempuan hanya 53,36 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki yang termasuk angkatan kerja adalah

sekitar 85 orang, sementara pada perempuan dari 100 orang penduduk usia kerja hanya sekitar 53 orang yang termasuk angkatan kerja. Pada Februari 2013 ini, TPAK laki-laki turun 0,20 persen poin sedangkan TPAK perempuan naik 0,69 persen poin. Sebaliknya jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012, TPAK untuk laki-laki naik sebesar 0,70 persen poin dan TPAK perempuan juga naik sebesar 1,97 persen poin.

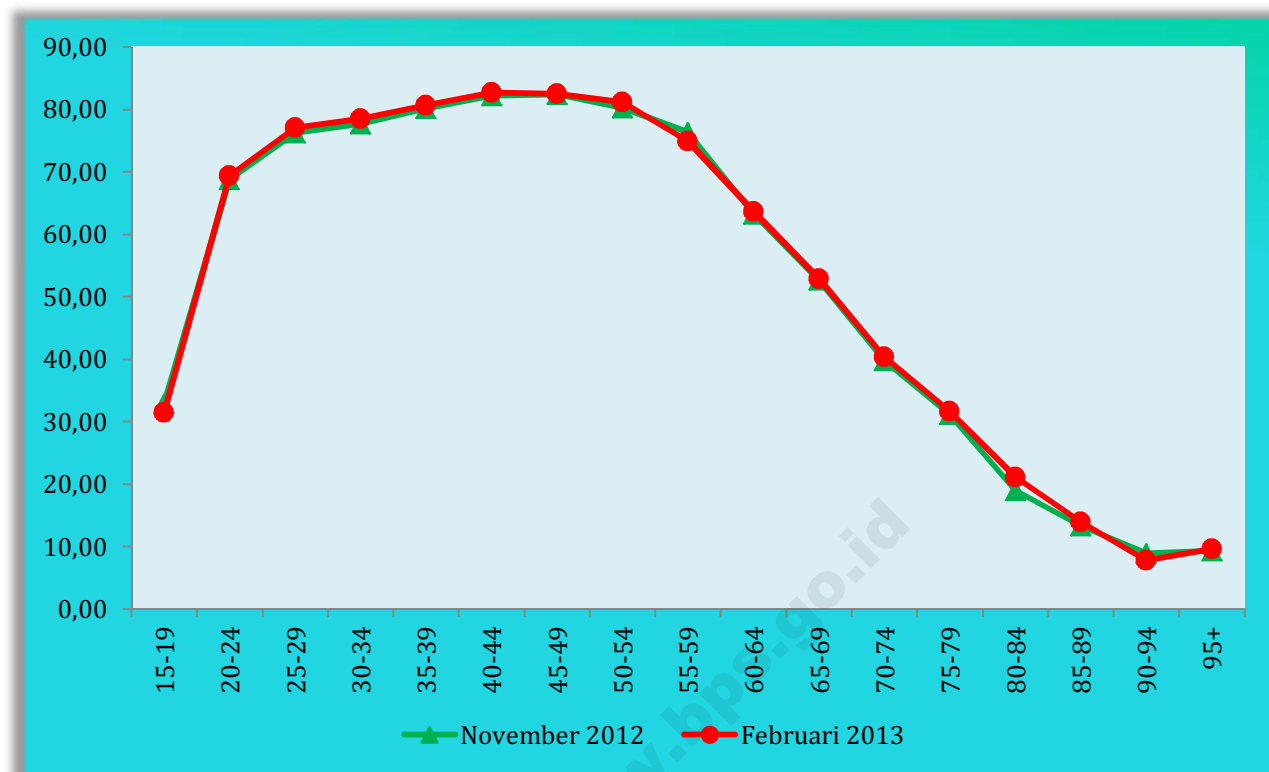
Pada periode November 2012-Februari 2013, persentase TPAK menurut kelompok umur rata-rata mengalami kenaikan. Kenaikan terbesar adalah TPAK untuk kelompok umur 25–34 tahun, yaitu naik sebesar 0,76 persen poin sedangkan yang mengalami penurunan terbesar adalah kelompok umur 55–64 tahun yaitu sebesar 0,74 persen poin (Tabel 1).

Grafik 1 menunjukkan bahwa pola TPAK menurut kelompok umur antara keadaan November 2012 dan Februari 2013 berhimpitan artinya keadaan TPAK menurut kelompok umur pada Februari 2013 tidak begitu berbeda jauh dibandingkan keadaan November 2012, pergeseran yang agak mencolok hanya terjadi pada kelompok umur 80–84 tahun.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur, 2012–2013
(persen)

Kelompok Umur	2012		2013
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	67,88	68,96	69,21
Laki-laki	84,42	85,32	85,12
Perempuan	51,39	52,67	53,36
Perkotaan	65,27	67,12	66,96
Perdesaan	70,51	70,82	71,48
(15–24)	49,37	50,39	50,01
Laki-laki	59,08	60,91	60,85
Perempuan	39,55	39,75	39,04
Perkotaan	47,42	48,98	48,71
Perdesaan	51,33	51,80	51,31
(15–64)	70,18	71,15	71,38
Laki-laki	86,54	87,22	87,07
Perempuan	53,63	54,87	55,49
Perkotaan	67,89	69,59	69,40
Perdesaan	72,50	72,74	73,39
(25–54)	78,85	79,54	80,15
Laki-laki	97,90	97,84	97,73
Perempuan	59,59	61,04	62,38
Perkotaan	77,05	78,57	78,63
Perdesaan	80,68	80,52	81,70
(25–34)	76,55	77,01	77,77
Laki-laki	97,41	97,38	97,17
Perempuan	55,66	56,60	58,33
Perkotaan	76,07	77,27	77,61
Perdesaan	77,04	76,73	77,93
(35–54)	80,41	81,26	81,77
Laki-laki	98,23	98,15	98,11
Perempuan	62,29	64,08	65,16
Perkotaan	77,72	79,47	79,33
Perdesaan	83,14	83,08	84,24
(55–64)	67,93	70,76	70,02
Laki-laki	84,08	86,83	86,12
Perempuan	51,43	54,15	53,41
Perkotaan	60,60	64,12	62,50
Perdesaan	75,21	77,51	77,71
65 Tahun Keatas	37,46	39,15	39,55
Laki-laki	53,14	55,76	54,88
Perempuan	24,75	25,97	27,36
Perkotaan	29,95	32,18	32,13
Perdesaan	44,74	45,68	46,46

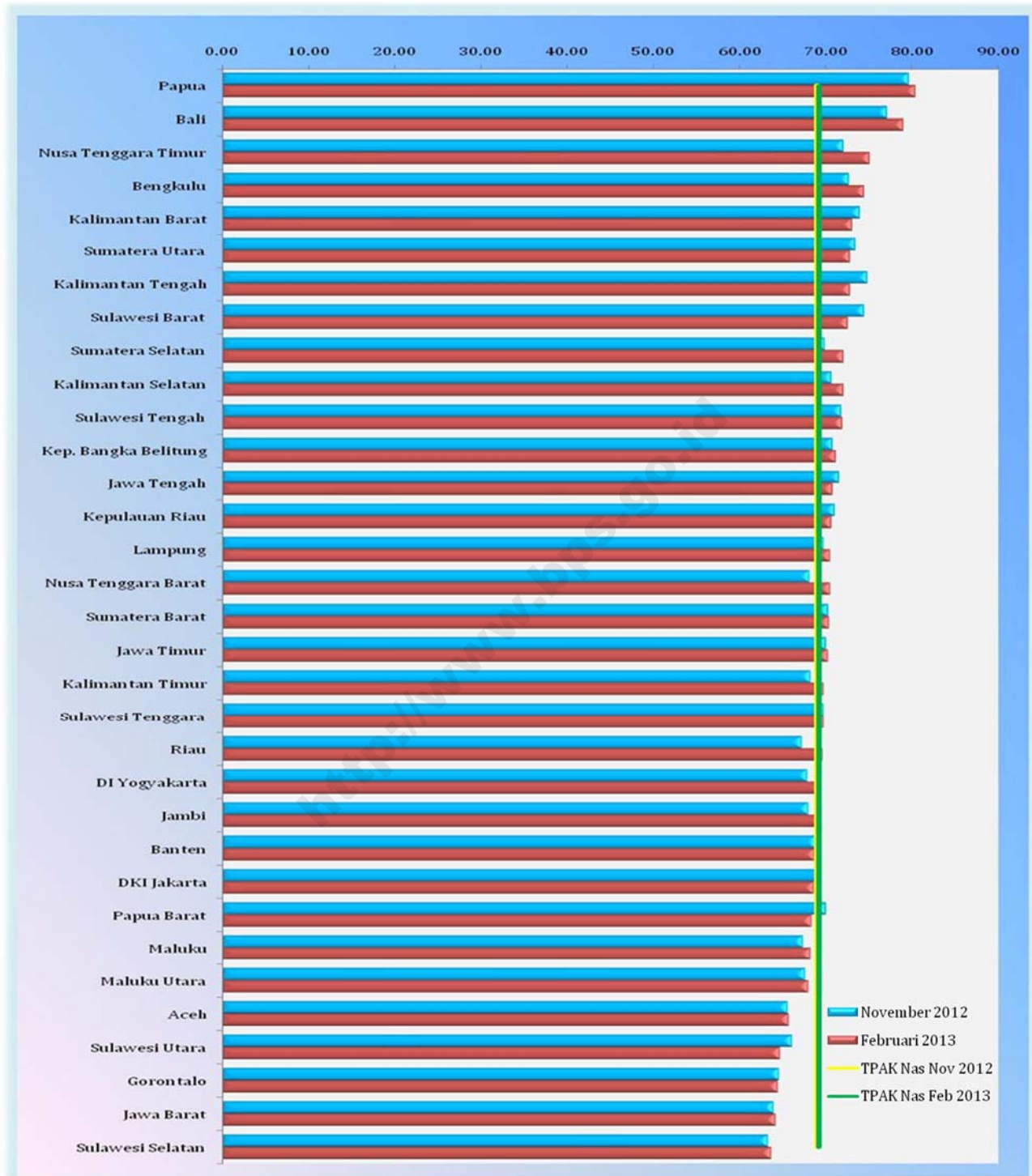
Grafik 1. TPAK Menurut Kelompok Umur, November 2012 dan Februari 2013
(persen)



Provinsi dengan TPAK tertinggi menurut Sakernas Februari 2013 berturut-turut adalah Provinsi Papua (80,25 persen), Provinsi Bali (78,91 persen) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (74,95 persen). Kondisi ini mirip dengan keadaan Sakernas November 2012, dimana provinsi dengan TPAK tertinggi adalah Provinsi Papua (79,52 persen), Provinsi Bali (76,98

persen) dan Provinsi Kalimantan Tengah (74,75 persen). Untuk provinsi dengan TPAK terendah pada Sakernas Februari 2013 berturut-turut adalah Provinsi Sulawesi Selatan (63,58 persen), Provinsi Jawa Barat (64,01 persen) dan Provinsi Gorontalo (64,33 persen), tiga posisi terendah ini tidak berubah jika dibandingkan dengan keadaan November 2012 (Grafik 2).

Grafik 2. TPAK Menurut Provinsi, November 2012 dan Februari 2013
(persen)



4. INDIKATOR TENAGA KERJA (KILM 2-7)

4.1. KILM 2. RASIO PENDUDUK BEKERJA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK (*EMPLOYMENT TO POPULATION RATIO-EPR*)

Secara nasional, angka EPR pada Februari 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan keadaan November 2012, yaitu sebesar 0,15 poin dari angka 64,97 pada November 2012 menjadi 65,12 pada Februari 2013. Angka ini bisa diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun keatas, terdapat sekitar 65 orang yang bekerja pada Februari 2013. Jika dibandingkan keadaan Agustus 2012, EPR Sakernas Februari 2013 juga mengalami peningkatan sebesar 1,41 poin dari angka 63,71.

Dilihat dari jenis kelamin, EPR laki-laki pada periode November 2012-Februari 2013 mengalami penurunan sebesar 0,63 poin, sedangkan EPR perempuan mengalami peningkatan sebesar 0,92 poin. Jika dibandingkan dengan periode Agustus 2012-Februari 2013, EPR untuk laki-laki dan perempuan masing-masing meningkat sebesar 0,75 poin dan 2,06 poin.

Berdasarkan daerah kota-desa, EPR daerah perkotaan pada periode November

2012-Februari 2013 turun 0,24 poin dari angka 62,32 menjadi 62,08. Sedangkan daerah perdesaan naik 0,54 poin dari angka 67,64 menjadi 68,18 pada Februari 2013.

Dilihat menurut kelompok umur, pada periode November 2012-Februari 2013 EPR penduduk umur muda (kelompok umur 15-24 tahun) mengalami penurunan sebesar 0,29 poin, yaitu dari angka 41,53 menjadi 41,24. Sedangkan pada periode Agustus 2012-Februari 2013, EPR pada kelompok umur muda meningkat sebesar 1,53 poin dari angka 39,71.

Untuk penduduk kelompok dewasa (umur 25 tahun keatas), pada periode November 2012-Februari 2013, EPR mengalami kenaikan sebesar 0,29 poin, yaitu dari angka 72,44 pada November 2012 naik menjadi 72,73 pada Februari 2013. Sementara pada periode Agustus 2012-Februari 2013 EPR pada kelompok ini juga mengalami kenaikan sebesar 1,38 poin dari angka 71,35 (Tabel 3).

Tabel 2. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur, 2012–2013
(dalam juta)

Kelompok Umur	2012		2013
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Umur 15 Tahun Keatas	173,93	174,54	175,10
Laki-laki	86,81	87,12	87,40
Perempuan	87,12	87,42	87,70
Perkotaan	87,34	87,61	87,90
Perdesaan	86,59	86,93	87,20
Umur Muda (15–24)	42,01	42,17	42,31
Laki-laki	21,13	21,21	21,28
Perempuan	20,88	20,96	21,03
Perkotaan	21,01	21,08	21,15
Perdesaan	21,00	21,09	21,16
Umur Dewasa (25+)	131,92	132,37	132,79
Laki-laki	65,68	65,91	66,12
Perempuan	66,24	66,46	66,67
Perkotaan	66,33	66,53	66,74
Perdesaan	65,59	65,84	66,05
Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja	110,81	113,40	114,02
Laki-laki	69,07	70,52	70,20
Perempuan	41,74	42,88	43,82
Perkotaan	52,64	54,60	54,56
Perdesaan	58,17	58,80	59,46
Umur Muda (15–24) yang Bekerja	16,68	17,51	17,45
Laki-laki	10,06	10,70	10,64
Perempuan	6,63	6,81	6,81
Perkotaan	7,72	8,34	8,23
Perdesaan	8,97	9,17	9,22
Umur Dewasa (25+) yang Bekerja	94,12	95,89	96,57
Laki-laki	59,01	59,82	59,56
Perempuan	35,11	36,08	37,01
Perkotaan	44,92	46,26	46,33
Perdesaan	49,20	49,63	50,24

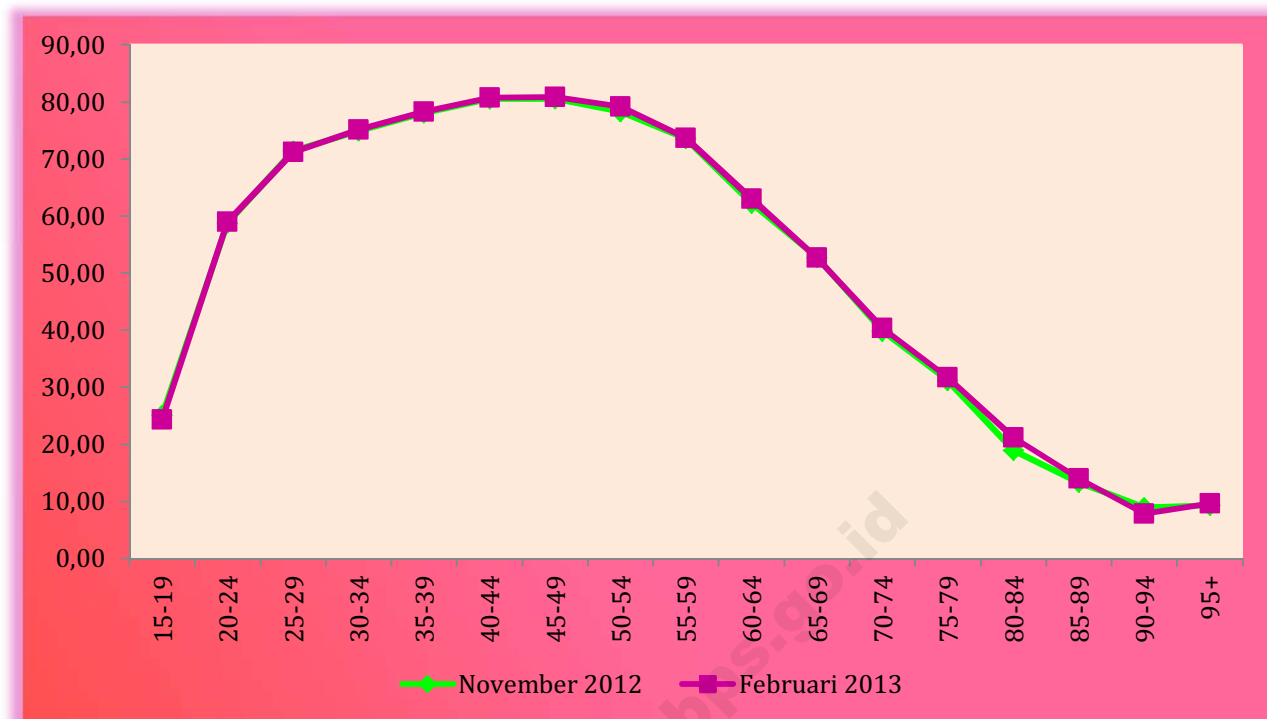
Tabel 3. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR)
Menurut Kelompok Umur, 2012–2013

Kelompok Umur	2012		2013
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	63,71	64,97	65,12
Laki-laki	79,57	80,95	80,32
Perempuan	47,91	49,05	49,96
Perkotaan	60,27	62,32	62,08
Perdesaan	67,18	67,64	68,18
Umur Muda (15–24)	39,71	41,53	41,24
Laki-laki	47,61	50,47	50,00
Perempuan	31,73	32,47	32,38
Perkotaan	36,73	39,56	38,91
Perdesaan	42,69	43,49	43,57
Umur Dewasa (25+)	71,35	72,44	72,72
Laki-laki	89,85	90,75	90,08
Perempuan	53,01	54,28	55,51
Perkotaan	67,72	69,54	69,42
Perdesaan	75,02	75,38	76,06

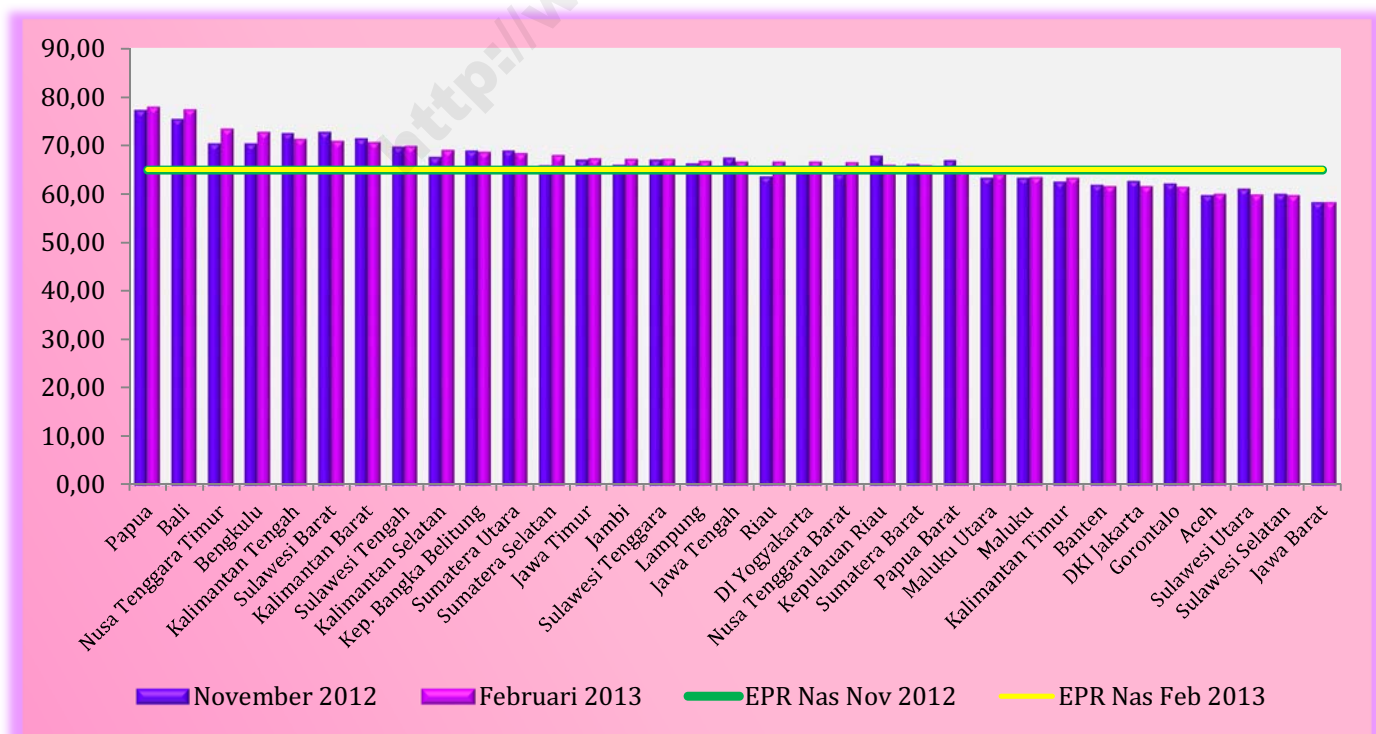
Pola EPR berdasarkan kelompok umur yang terlihat pada Grafik 3 mirip dengan pola TPAK. Hal ini menunjukkan dominasi jumlah penduduk bekerja pada komponen angkatan kerja. Artinya, komponen pengangguran pada angkatan kerja relatif kecil. Dari grafik EPR terlihat bahwa puncak EPR berada pada kelompok umur 45–49 tahun. Pada periode November 2012 dan Februari 2013 grafik EPR terlihat berhimpitan dan terlihat agak bergeser/merenggang hanya untuk kelompok umur 80-84 tahun dan 90-94 tahun.

Grafik 4 menunjukkan provinsi-provinsi dengan EPR tertinggi pada Februari 2013 adalah Provinsi Papua (78,00), Bali (77,42) dan Nusa Tenggara Timur (73,45). Sementara itu, provinsi dengan EPR terendah pada periode yang sama adalah Provinsi Jawa Barat (58,31), Sulawesi Selatan (59,87), dan Sulawesi Utara (59,98).

Grafik 3. EPR Menurut Kelompok Umur, November 2012 dan Februari 2013



Grafik 4. EPR Menurut Provinsi, November 2012 dan Februari 2013



4.2. KILM 3. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA

Kontribusi penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama pada Februari 2013 ini tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan November 2012. Dengan persentase tertinggi masih diduduki oleh penduduk bekerja dengan status pengusaha, yang hanya menurun tipis sebesar 0,39 persen dari 47,72 persen menjadi 47,33 persen. Persentase tertinggi berikutnya diduduki oleh penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai yang juga menurun tipis sebesar 0,02 persen dari 36,47 persen menjadi 36,45. Hanya penduduk dengan status pekerjaan sebagai pekerja keluarga yang mengalami kenaikan sebesar 0,41 persen dari 15,81 persen menjadi 16,22 persen.

Untuk periode Agustus 2012–Februari 2013, penduduk yang bekerja dengan status pengusaha juga menurun tipis sebesar 0,16 persen, untuk buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan sebesar 0,09 persen poin, dan penduduk yang bekerja dengan status pekerja keluarga mengalami kenaikan tipis sebesar 0,07 persen poin.

Khusus untuk persentase pekerja rentan/*vulnerable employment*, pada keadaan Februari 2013 mencapai 60,02 persen. Atau dapat dikatakan bahwa dari 100 orang penduduk yang bekerja ada sekitar 60 orang yang masuk kategori pekerja rentan. Jika dibandingkan dengan keadaan November 2012,

persentase pekerja rentan naik tipis sebesar 0,19 persen poin, namun bila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012, persentase pekerja rentan menurun sebesar 0,12 persen poin.

Persentase pekerja rentan menurut jenis kelamin pada keadaan Februari 2013 menunjukkan bahwa pekerja rentan perempuan sebesar 64,66 persen cenderung lebih tinggi dibandingkan pekerja rentan laki-laki yang hanya sebesar 57,13 persen.

Persentase pekerja rentan menurut provinsi yang ada di Indonesia ditunjukkan pada Grafik 5. Pada keadaan Februari 2013, provinsi yang memiliki persentase pekerja rentan tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (82,57 persen), Provinsi Papua (81,77 persen), dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (75,75 persen). Sementara itu, persentase pekerja rentan terendah pada Februari 2013 adalah Provinsi DKI Jakarta (26,40 persen), kemudian Provinsi Kepulauan Riau (31,62 persen) dan urutan ketiga ditempati oleh Provinsi Kalimantan Timur (39,44 persen). Tiga provinsi terendah tersebut tidak berubah dari keadaan November 2012 dan selalu berada jauh di bawah rata-rata angka pekerja rentan nasional.

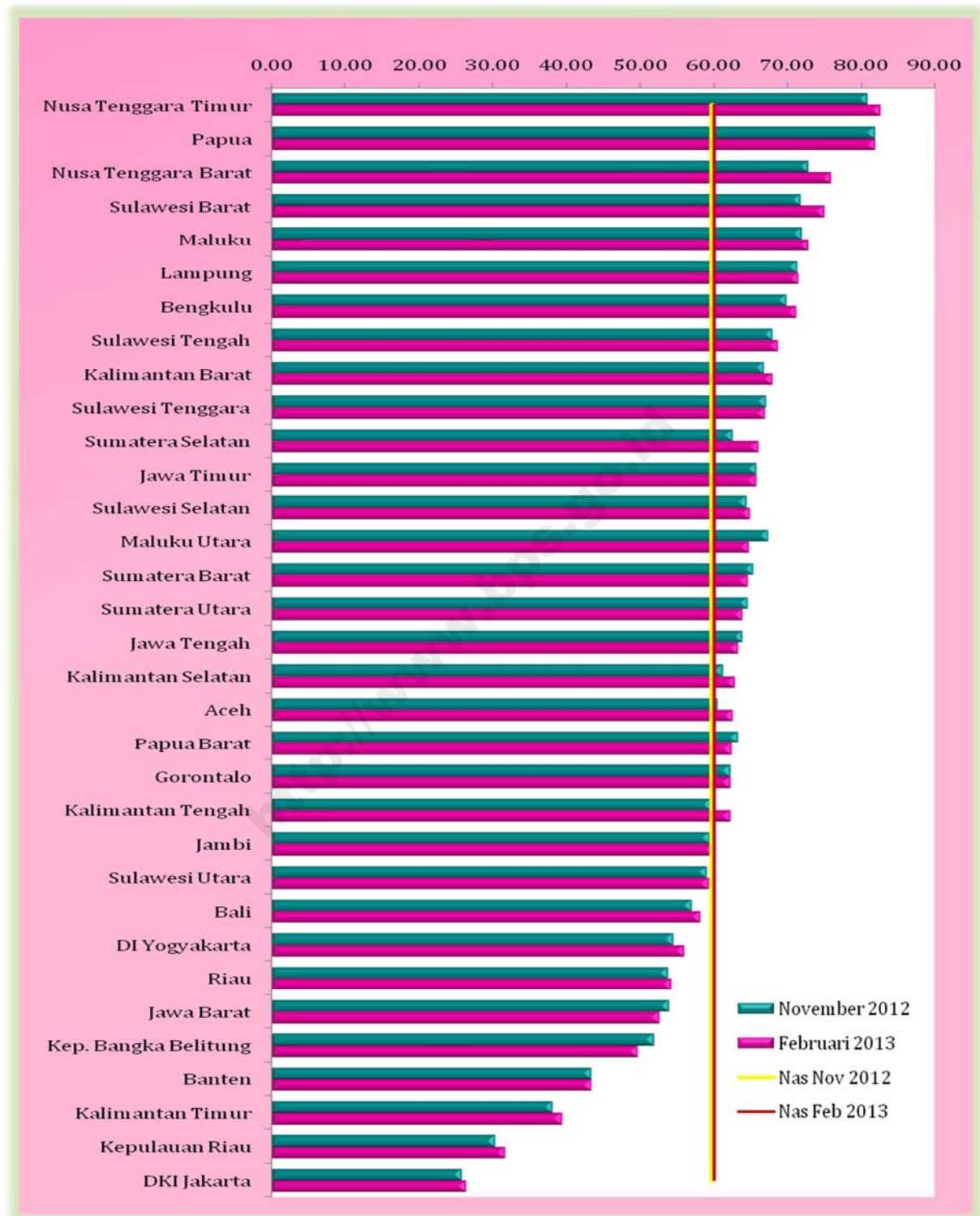
Tabel 4. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2012–2013(dalam juta)

Status Pekerjaan Utama	2012		2013
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	110,81	113,40	114,02
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	40,29	41,36	41,56
Berusaha	52,62	54,11	53,97
Pengusaha	3,87	4,19	4,02
Berusaha sendiri	37,20	37,88	38,52
Pekerja bebas	11,54	12,04	11,43
Pekerja keluarga	17,90	17,93	18,49
Pekerja "rentan" (berusaha sendiri +pekerja bebas + pekerja keluarga)	66,64	67,85	68,44
Laki-laki	69,07	70,52	70,21
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	26,37	26,73	26,86
Berusaha	37,85	38,82	38,32
Pengusaha	3,16	3,36	3,24
Berusaha sendiri	25,88	26,13	26,37
Pekerja bebas	8,81	9,33	8,71
Pekerja keluarga	4,84	4,97	5,03
Pekerja "rentan" (berusaha sendiri +pekerja bebas + pekerja keluarga)	39,54	40,42	40,11
Perempuan	41,74	42,88	43,81
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	13,92	14,63	14,70
Berusaha	14,77	15,29	15,65
Pengusaha	0,71	0,83	0,78
Berusaha sendiri	11,32	11,76	12,15
Pekerja bebas	2,73	2,71	2,72
Pekerja keluarga	13,05	12,96	13,46
Pekerja "rentan" (berusaha sendiri +pekerja bebas + pekerja keluarga)	27,11	27,42	28,33

Tabel 5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2012–2013

Status Pekerjaan Utama	2012		2013
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100,00	100,00	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	36,36	36,47	36,45
Berusaha	47,49	47,72	47,33
Pengusaha	3,50	3,70	3,53
Berusaha sendiri	33,57	33,41	33,78
Pekerja bebas	10,42	10,61	10,02
Pekerja keluarga	16,15	15,81	16,22
Pekerja "rentan" (berusaha sendiri +pekerja bebas + pekerja keluarga)	60,14	59,83	60,02
Laki-laki	100,00	100,00	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	38,18	37,91	38,26
Berusaha	54,80	55,05	54,58
Pengusaha	4,58	4,77	4,61
Berusaha sendiri	37,48	37,05	37,56
Pekerja bebas	12,75	13,23	12,41
Pekerja keluarga	7,01	7,04	7,16
Pekerja "rentan" (berusaha sendiri +pekerja bebas + pekerja keluarga)	57,24	57,32	57,13
Perempuan	100,00	100,00	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	33,35	34,11	33,55
Berusaha	35,37	35,66	35,73
Pengusaha	1,71	1,94	1,79
Berusaha sendiri	27,12	27,41	27,74
Pekerja bebas	6,55	6,31	6,20
Pekerja keluarga	31,28	30,23	30,72
Pekerja "rentan" (berusaha sendiri +pekerja bebas + pekerja keluarga)	64,95	63,95	64,66

Grafik 5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Provinsi, November 2012 dan Februari 2013



4.3. KILM 4. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA

Hasil Sakernas Februari 2013, memperlihatkan bahwa kondisi lapangan pekerjaan utama di Indonesia masih didominasi oleh sektor jasa-jasa. Hal ini ditunjukkan oleh persentase jumlah penduduk yang bekerja pada sektor jasa-jasa sebesar 44,36 persen, sedangkan sektor pertanian menempati urutan kedua sebesar 35,05 persen dan disusul sektor manufaktur sebesar 20,59 persen. Apabila diuraikan lebih lanjut, sektor perdagangan menjadi penyumbang terbesar tingginya persentase penduduk yang bekerja di sektor jasa-jasa yaitu sebesar 21,75 persen, selain ditunjang oleh sektor jasa kemasyarakatan, sektor transportasi, dan sektor keuangan yang masing-masing sebesar 15,38 persen, 4,59 persen, dan 3,01 persen. Sedangkan persentase sektor industri dan sektor bangunan menjadi penyumbang terbesar pada sektor manufaktur dengan persentase masing-masing sebesar 12,97 persen dan 6,04 persen.

Kontribusi sektoral hasil Sakernas Februari 2013 tidak menunjukkan perubahan berarti dibandingkan dengan keadaan November 2012, sektor jasa-jasa naik tipis sebesar 0,02 persen poin dari 44,34 persen. Sektor pertanian naik sebesar 0,67 persen poin dari 34,38 persen. Hanya sektor manufaktur yang mengalami penurunan yaitu sebesar 0,69 persen poin dari 21,28 persen. Pola perubahan ini berbeda jika dibandingkan dengan keadaan

Agustus 2012, dimana sektor yang mengalami kenaikan hanya sektor jasa-jasa yaitu sebesar 1,12 persen poin sedangkan sektor pertanian dan sektor manufaktur mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,08 persen poin dan 0,04 persen poin.

Komposisi sektoral Sakernas Februari 2013 menurut provinsi menunjukkan bahwa tiga provinsi dengan persentase tertinggi di sektor pertanian berturut turut adalah Provinsi Papua (73,05 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (67,69 persen), dan Provinsi Kalimantan Barat (60,30 persen). Jika dibandingkan dengan keadaan November 2012, posisi tiga provinsi tertinggi di sektor pertanian tersebut tidak mengalami perubahan. Sementara itu, untuk sektor manufaktur persentase tertinggi pada Februari 2013 diduduki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (29,85 persen), Provinsi Banten (29,00 persen) dan Provinsi Jawa Barat (28,97 persen). Jika dibandingkan dengan keadaan November 2012 urutan tiga besar untuk Sektor Manufaktur diduduki oleh Provinsi Bangka Belitung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Untuk sektor jasa-jasa pada keadaan Februari 2013 persentase tertinggi masih diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta (81,08 persen), Provinsi Kepulauan Riau (59,43 persen), dan Provinsi Banten (56,65 persen), masih sama jika dibandingkan dengan kondisi November 2012.

Tabel 6. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2012–2013 (dalam juta)

Lapangan Pekerjaan Utama	2012		2013
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	110,81	113,40	114,02
Pertanian	38,88	38,99	39,96
Manufaktur	24,01	24,12	23,48
Pertambangan	1,60	1,73	1,56
Industri	15,37	14,68	14,78
Listrik, gas dan air	0,25	0,25	0,25
Bangunan	6,79	7,46	6,89
Jasa-jasa	47,92	50,29	50,58
Perdagangan	23,16	24,71	24,81
Transportasi	5,00	5,28	5,23
Keuangan	2,66	2,92	3,01
Jasa kemasyarakatan	17,10	17,37	17,53
Laki-laki	69,07	70,52	70,21
Pertanian	24,49	24,69	24,94
Manufaktur	17,31	17,56	16,95
Pertambangan	1,46	1,54	1,41
Industri	8,99	8,50	8,58
Listrik, gas dan air	0,23	0,22	0,22
Bangunan	6,64	7,30	6,74
Jasa-jasa	27,27	28,28	28,32
Perdagangan	11,55	11,96	11,88
Transportasi	4,72	4,99	4,93
Keuangan	1,90	2,19	2,21
Jasa kemasyarakatan	9,10	9,14	9,30
Perempuan	41,74	42,88	43,81
Pertanian	14,39	14,31	15,02
Manufaktur	6,70	6,57	6,53
Pertambangan	0,14	0,19	0,14
Industri	6,38	6,18	6,21
Listrik, gas dan air	0,02	0,03	0,03
Bangunan	0,15	0,17	0,15
Jasa-jasa	20,65	22,01	22,26
Perdagangan	11,61	12,75	12,92
Transportasi	0,28	0,29	0,30
Keuangan	0,76	0,73	0,80
Jasa kemasyarakatan	8,00	8,24	8,24

Tabel 7. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2012–2013

Lapangan Pekerjaan Utama	2012		2013
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100,00	100,00	100,00
Pertanian	35,09	34,38	35,05
Manufaktur	21,67	21,28	20,59
Pertambangan	1,44	1,53	1,36
Industri	13,87	12,95	12,97
Listrik, gas dan air	0,22	0,22	0,22
Bangunan	6,13	6,58	6,04
Jasa-jasa	43,24	44,34	44,36
Perdagangan	20,90	21,79	21,75
Transportasi	4,51	4,66	4,59
Keuangan	2,40	2,57	2,64
Jasa kemasyarakatan	15,43	15,32	15,38
Laki-laki	100,00	100,00	100,00
Pertanian	35,46	35,00	35,52
Manufaktur	25,07	24,90	24,14
Pertambangan	2,11	2,19	2,01
Industri	13,01	12,05	12,22
Listrik, gas dan air	0,33	0,31	0,32
Bangunan	9,61	10,35	9,59
Jasa-jasa	39,48	40,10	40,34
Perdagangan	16,72	16,96	16,93
Transportasi	6,83	7,08	7,02
Keuangan	2,75	3,10	3,15
Jasa kemasyarakatan	13,18	12,96	13,24
Perempuan	100,00	100,00	100,00
Pertanian	34,48	33,36	34,28
Manufaktur	16,04	15,32	14,91
Pertambangan	0,34	0,44	0,33
Industri	15,28	14,42	14,17
Listrik, gas dan air	0,05	0,07	0,07
Bangunan	0,37	0,39	0,34
Jasa-jasa	49,48	51,32	50,81
Perdagangan	27,81	29,74	29,49
Transportasi	0,67	0,68	0,69
Keuangan	1,83	1,70	1,83
Jasa kemasyarakatan	19,17	19,20	18,80

Grafik 6. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, November 2012 dan Februari 2013



4.4. KILM 5. PEKERJA PARUH WAKTU

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang bekerja, serta tingkat produktivitas, dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu terfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, sebagai persentase dari total penduduk bekerja.

Tingkat pekerja paruh waktu pada Februari 2013 mencapai 19,43 persen atau mengalami penurunan sebesar 2,47 persen poin dibanding November 2012 (21,90 persen), namun mengalami kenaikan sangat tipis sebesar 0,01 persen poin dibanding Agustus 2012 (19,42 persen). Tingkat pekerja paruh waktu sebesar 19,43 persen pada Februari 2013 dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 19 orang pekerja paruh waktu. Hasil Sakernas Februari 2013 menunjukkan tingkat pekerja paruh waktu perempuan mencapai dua kali lipat lebih tinggi daripada tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 28,72 persen dan 13,62 persen.

Penurunan tingkat pekerja paruh waktu secara nasional hasil Sakernas periode

November 2012–Februari 2013 juga diikuti dengan penurunan tingkat pekerja paruh waktu baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai gambaran, tingkat pekerja paruh waktu perempuan mengalami penurunan sebesar 4,25 persen poin (dari 32,97 persen pada November 2012 menjadi 28,72 persen pada Februari 2013). Begitu pula jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerah, pada Februari 2013 tingkat pekerja paruh waktu mengalami penurunan baik di perdesaan maupun perkotaan, dengan penurunan masing-masing sebesar 3,02 persen poin dan 1,97 persen poin. Namun demikian, apabila dibanding kondisi Agustus 2012, di samping kenaikan tingkat pekerja paruh waktu secara nasional, kenaikan juga terjadi pada kelompok jenis kelamin perempuan sebesar 1,27 persen poin, dan tingkat pekerja paruh waktu di daerah perkotaan dengan kenaikan sebesar 0,28 persen poin.

Merujuk kembali pada hasil Sakernas Februari 2013, tingkat pekerja paruh waktu tertinggi diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat (40,08 persen), kemudian posisi kedua diduduki oleh Provinsi Jambi (39,27 persen), dan posisi ketiga diduduki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (36,90 persen). Sementara pada November 2012, Provinsi Sulawesi Barat tetap berada pada posisi tertinggi, sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di urutan kedua, dan posisi ketiga diduduki oleh Provinsi

Jambi. Sementara itu, tingkat pekerja paruh waktu terendah pada Februari 2013 diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta (5,20 persen), selanjutnya posisi kedua diduduki oleh Provinsi Banten (11,13 persen), dan posisi ketiga terendah diduduki Provinsi Kalimantan Timur (11,84 persen). Sedangkan hasil Sakernas November 2012 menunjukkan urutan provinsi

dengan tingkat pekerja paruh waktu terendah sebagai berikut: Provinsi DKI Jakarta (6,80 persen), Provinsi Banten (10,55 persen), dan Provinsi Kepulauan Riau (14,27 persen). Tingkat pekerja paruh waktu pada masing-masing provinsi selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 8.

Tabel 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu, 2012–2013
(persen)

Indikator	2012		2013
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	19,42	21,90	19,43
Laki-laki	14,57	15,17	13,62
Perempuan	27,45	32,97	28,72
Perkotaan	12,37	14,62	12,65
Perdesaan	25,81	28,66	25,64
Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu	53,24	56,94	56,81

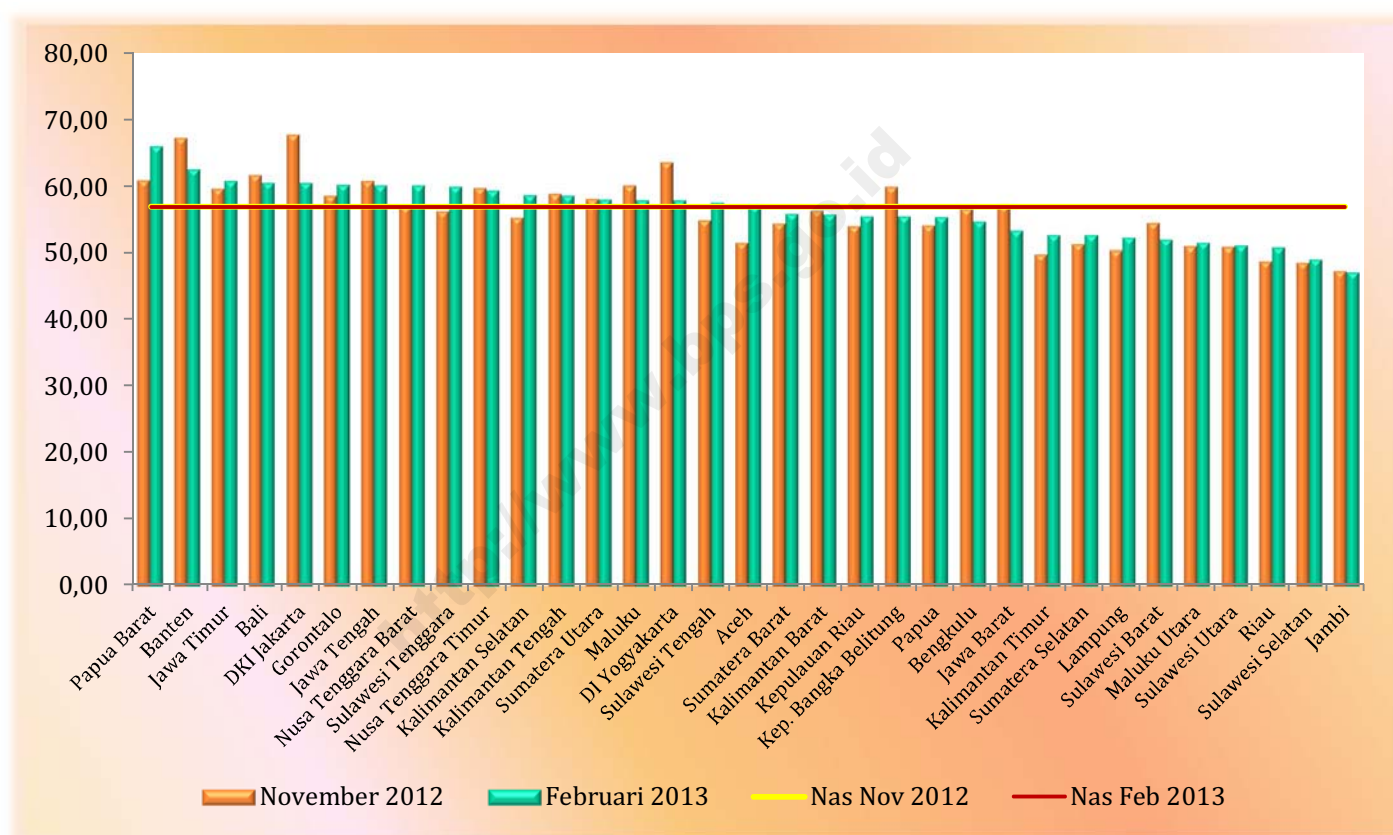
Share perempuan pada pekerja paruh waktu berdasarkan Sakernas Februari 2013 mencapai 56,81 persen, atau dapat diartikan bahwa dari 100 pekerja paruh waktu, sekitar 57 orang diantaranya adalah perempuan. *Share* perempuan pada pekerja paruh waktu pada Februari 2013 mengalami sedikit fluktuasi, yaitu mengalami kenaikan sebesar 3,57 persen poin bila dibanding Agustus 2012 (53,24 persen), namun turun sebesar 0,13 persen poin dibanding November 2012 (56,94 persen) (Tabel 8).

Sementara itu, Grafik 7 menunjukkan *share* perempuan pada pekerja paruh waktu menurut provinsi pada November 2012 dan Februari 2013. Dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa provinsi dengan *share* perempuan pada pekerja paruh waktu tertinggi pada Februari 2013 diduduki oleh Provinsi Papua Barat (66,02 persen), berikutnya pada urutan kedua diduduki oleh Provinsi Banten (62,55 persen), dan Provinsi Jawa Timur berada pada urutan ketiga (60,81). Sedangkan pada November 2012 posisi ini berturut-turut diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta (67,73

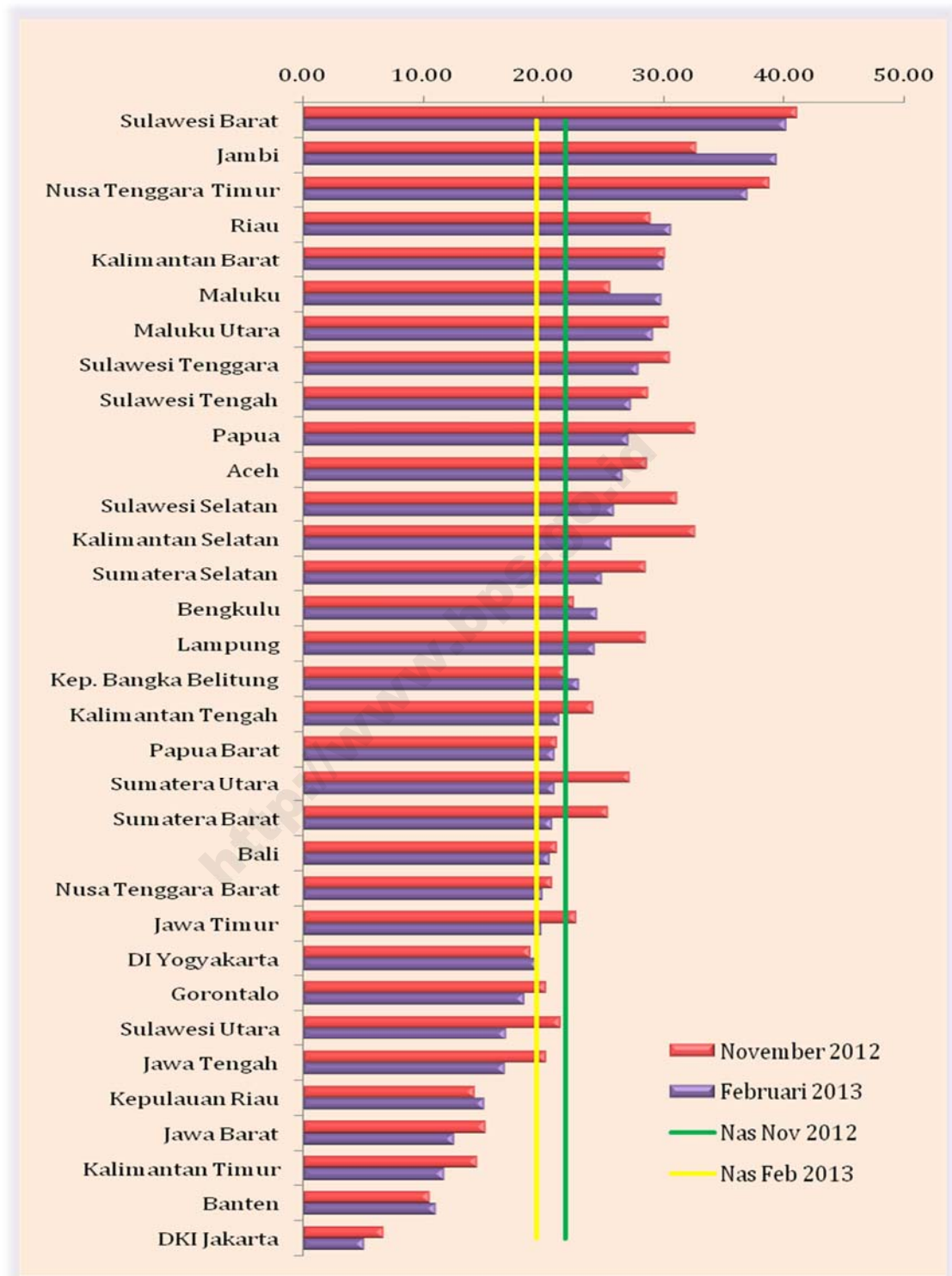
persen), Provinsi Banten (67,24 persen), dan Provinsi DI Yogyakarta (63,58 persen). Sebaliknya provinsi dengan *share* perempuan pada pekerja paruh waktu terendah baik pada Februari 2013 maupun November 2012 secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Jambi, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Riau.

Kondisi pada Februari 2013 *share* perempuan pada ketiga provinsi tersebut masing-masing sebesar: 47,20 persen; 49,17 persen; dan 50,89 persen. Sedangkan pada November 2012 masing-masing sebesar: 47,41 persen; 48,64 persen; dan 48,88 persen.

Grafik 7. *Share* Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, November 2012 dan Februari 2013 (persen)



Grafik 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, November 2012 dan Februari 2013
(persen)



4.5. KILM 6. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT JAM KERJA

Merujuk pada hasil Sakernas baik pada Agustus dan November 2012 maupun Februari 2013, ternyata sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu, yakni pada kisaran dua pertiga dari total penduduk yang bekerja. Sementara penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu pada Februari 2013 mencapai 33,34 persen atau mengalami peningkatan tipis yaitu sebesar 0,19 persen poin jika dibandingkan dengan November 2012 (33,15 persen), namun mengalami penurunan sebesar 0,32 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2012 (33,66 persen).

Dapat diamati pula pada Tabel 9, hasil Sakernas pada periode Agustus dan November 2012 serta Februari 2013, secara umum menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk perempuan yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk laki-laki. Sebagai contoh pada Februari 2013, persentase penduduk perempuan yang jam kerjanya selama seminggu di bawah 35 jam per minggu sebesar 44,02 persen, sementara persentase pekerja laki-laki dengan kategori jam kerja yang sama hanya sebesar 26,67 persen.

Apabila kita cermati perbedaan karakteristik pekerja di perdesaan dan di perkotaan, terlihat bahwa penduduk di perdesaan lebih banyak yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk perkotaan. Hal tersebut terjadi baik pada

Agustus dan November 2012 maupun Februari 2013. Kondisi Februari 2013 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) di daerah perdesaan pada Februari 2013 mencapai 43,51 persen sementara di perkotaan hanya sebesar 22,25 persen.

Secara keseluruhan, persentase tertinggi penduduk bekerja berdasarkan jam kerja terdapat pada kelompok jam kerja 40–48 jam per minggu yaitu hampir mencapai 30 persen. Akan tetapi masih banyak pula penduduk yang bekerja di atas 48 jam per minggu yaitu sekitar 26 persen. Apabila dibandingkan antara laki-laki dan perempuan maka persentase laki-laki yang bekerja di atas 48 jam per minggu cenderung lebih tinggi di banding persentase perempuan yang bekerja pada kategori yang sama. Sebagai gambaran pada Februari 2013 persentase penduduk perempuan yang bekerja di atas 48 jam per minggu sebesar 21,65 persen, sementara persentase penduduk laki-laki yang bekerja di atas 48 jam per minggu mencapai 29,78 persen.

Tabel 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Jumlah Jam Kerja, 2012–2013

Jumlah Jam Kerja	2012		2013
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100,00	100,00	100,00
0 jam*	2,72	2,22	2,02
1–14 jam	5,97	5,83	6,18
15–24 jam	11,54	11,43	11,42
25–34 jam	13,43	13,67	13,72
35–39 jam	10,36	10,32	10,17
40–48 jam	29,43	29,38	29,84
49–59 jam	15,09	15,39	15,25
60 jam keatas	11,44	11,76	11,40
Laki-Laki	100,00	100,00	100,00
0 jam*	2,51	2,33	2,08
1–14 jam	3,83	3,71	4,09
15–24 jam	8,99	8,44	8,41
25–34 jam	12,43	11,97	12,09
35–39 jam	9,74	10,08	9,68
40–48 jam	32,80	33,35	33,87
49–59 jam	17,60	18,10	18,13
60 jam keatas	12,10	12,02	11,65
Perempuan	100,00	100,00	100,00
0 jam*	3,07	2,04	1,92
1–14 jam	9,53	9,32	9,52
15–24 jam	15,77	16,36	16,24
25–34 jam	15,09	16,47	16,34
35–39 jam	11,39	10,71	10,94
40–48 jam	23,87	22,86	23,39
49–59 jam	10,93	10,92	10,64
60 jam keatas	10,36	11,32	11,01

**0 jam: Sementara tidak bekerja*

Tabel 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2012–2013 (lanjutan)

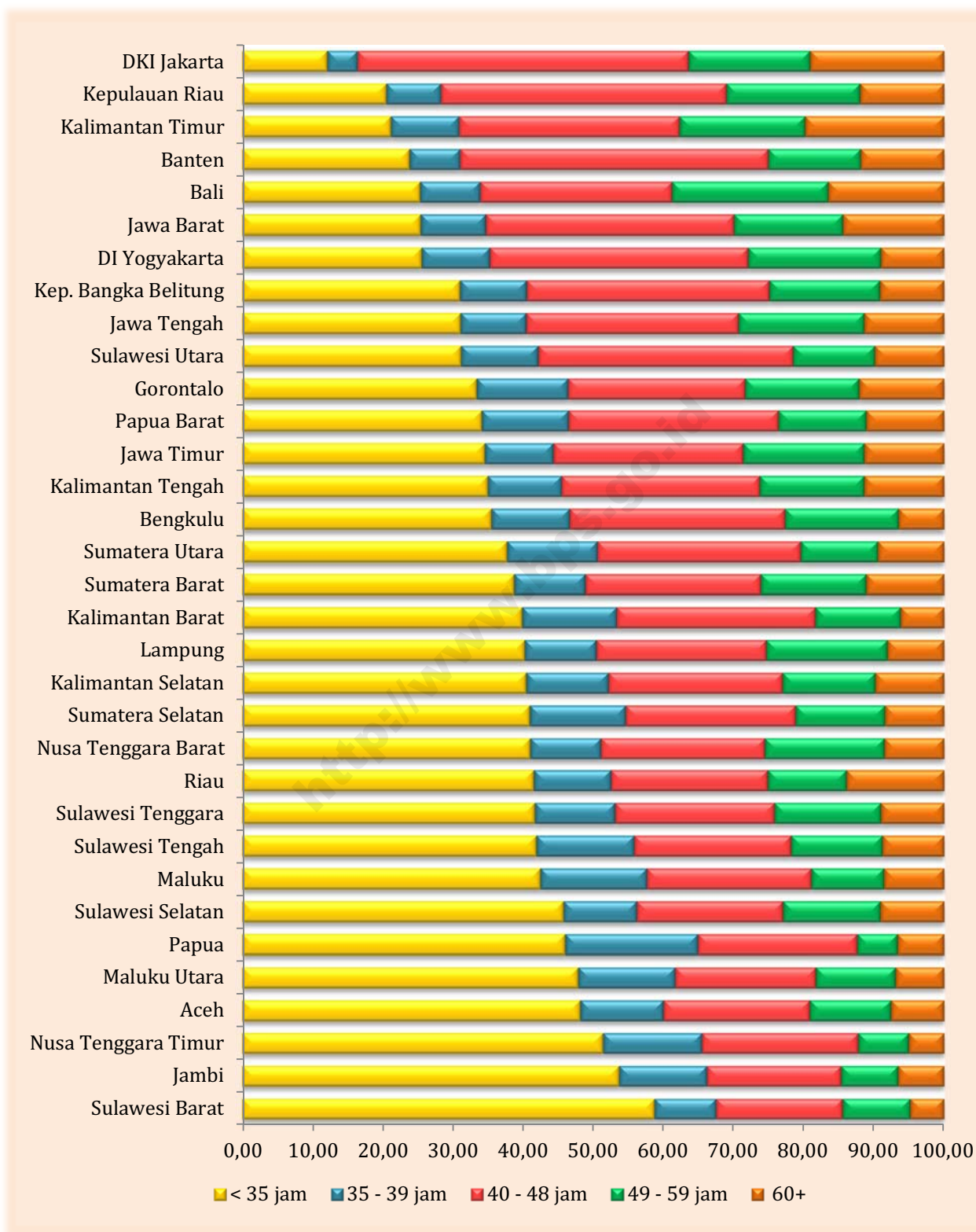
Jumlah Jam Kerja	2012		2013
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	100,00	100,00	100,00
0 jam*	2,45	1,86	1,78
1–14 jam	3,72	3,92	3,98
15–24 jam	6,64	7,21	7,15
25–34 jam	8,80	9,41	9,34
35–39 jam	8,55	8,72	8,62
40–48 jam	37,43	35,98	37,11
49–59 jam	16,69	16,72	16,67
60 jam keatas	15,73	16,18	15,35
Perdesaan	100,00	100,00	100,00
0 jam*	2,97	2,56	2,24
1–14 jam	8,02	7,61	8,20
15–24 jam	15,98	15,35	15,33
25–34 jam	17,63	17,62	17,74
35–39 jam	12,01	11,81	11,59
40–48 jam	22,20	23,25	23,17
49–59 jam	13,63	14,15	13,94
60 jam keatas	7,57	7,65	7,79

*0 jam: Sementara tidak bekerja

Sementara itu, berdasarkan Sakernas Februari 2013 (Grafik 9), tiga provinsi dengan persentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam per minggu terbanyak yaitu Provinsi Sulawesi Barat (58,70 persen), Provinsi Jambi (53,67 persen) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (51,36 persen).

Sedangkan disisi sebaliknya tiga provinsi dengan persentase penduduk bekerja di bawah 35 jam seminggu yang terendah, yaitu Provinsi DKI Jakarta (12,12 persen), Provinsi Kepulauan Riau (20,52 persen), dan Provinsi Kalimantan Timur (21,18 persen).

Grafik 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jam Kerja, Februari 2013



4.6. KILM 7. PENDUDUK YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL

Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (ICLS) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri dari semua orang yang selama periode acuan tertentu bekerja setidaknya di satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan tersebut baik merupakan pekerjaan utama atau sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2013, dari 114,20 juta orang yang bekerja, sebanyak 53,48 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (60,98 juta orang). Hal tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia lebih banyak penduduk yang bekerja di sektor yang tidak terjangkau atau terlindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan. Sebab Undang-undang Ketenagakerjaan di Indonesia

baru mencakup pekerja-pekerja yang berada di sektor formal.

Usaha pemerintah untuk terus menumbuhkan pekerjaan di sektor formal dapat terlihat dari tren pekerja di sektor informal yang menunjukkan kecenderungan menurun secara perlahan. Persentase penduduk bekerja di sektor informal pada Agustus 2012 sebesar 53,57 persen, turun menjadi 53,49 persen pada November 2012, dan turun tipis menjadi 53,48 persen pada Februari 2013. Sementara persentase sektor formal pada Agustus 2012 sebesar 46,43 persen, naik mencapai 46,51 persen pada November 2012, dan sedikit meningkat menjadi 46,52 persen pada Februari 2013.

Ditinjau berdasarkan perbedaan jenis kelamin, sektor formal masih didominasi kaum pria, dimana hampir dua pertiga dari keseluruhan pekerjaan di sektor formal dikuasai oleh laki-laki. Semisal pada Februari 2013, sebesar 64,59 persen (hampir dua per tiga) pekerja di sektor formal dipegang oleh laki-laki.

Sementara itu, pada perempuan dari total 43,81 juta orang yang bekerja terdapat 25,03 juta orang (57,13 persen) yang bekerja pada sektor informal sedangkan sisanya yaitu 18,78 juta orang (42,87 persen) bekerja pada sektor formal.

Tabel 10. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor (Formal dan Informal), 2012–2013(dalam juta)

Kategori Sektor	2012		2013
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	110,81	113,40	114,02
Laki-laki	69,07	70,52	70,21
Perempuan	41,74	42,88	43,81
Perkotaan	52,64	54,60	54,56
Perdesaan	58,17	58,80	59,46
Formal	51,44	52,74	53,04
Laki-laki	33,71	34,14	34,26
Perempuan	17,73	18,60	18,78
Perkotaan	34,15	34,54	34,85
Perdesaan	17,29	18,20	18,19
Informal	59,36	60,66	60,98
Laki-laki	35,36	36,38	35,95
Perempuan	24,01	24,28	25,03
Perkotaan	18,49	20,06	19,71
Perdesaan	40,88	40,60	41,27

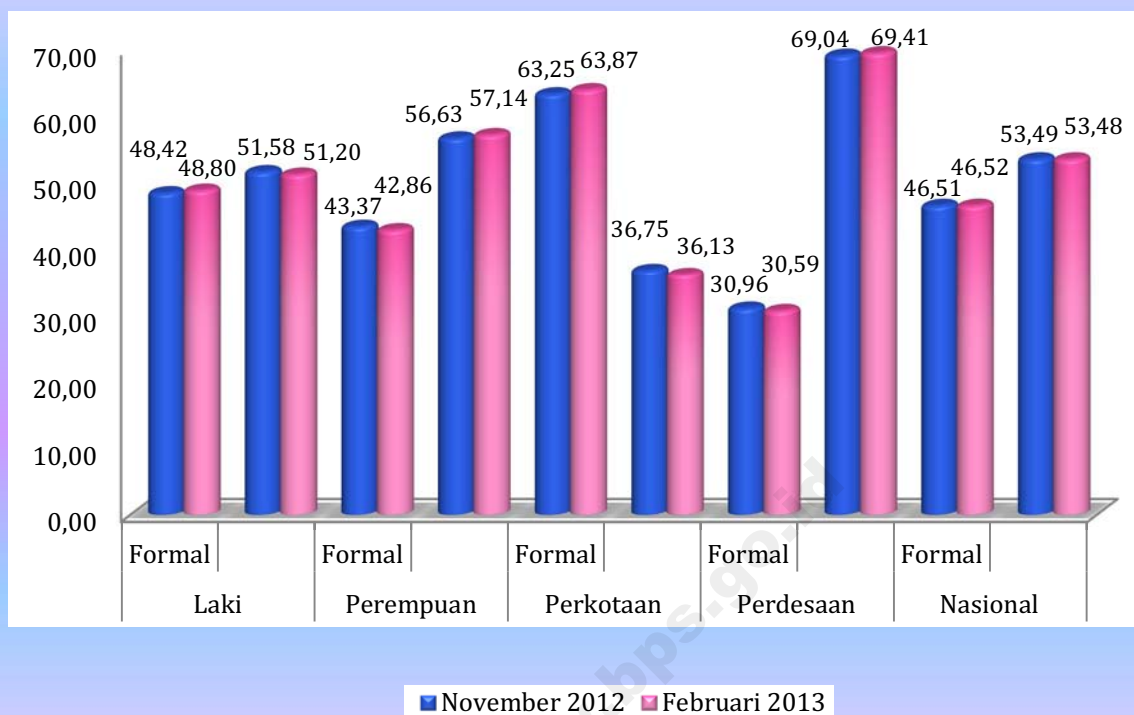
Tabel 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor (Formal dan Informal), 2012–2013

Kategori Sektor	2012		2013
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total Formal+Informal	100,00	100,00	100,00
Formal	46,43	46,51	46,52
Informal	53,57	53,49	53,48
Formal	100,00	100,00	100,00
Laki-laki	65,53	64,74	64,59
Perempuan	34,47	35,26	35,41
Perkotaan	66,38	65,48	65,70
Perdesaan	33,62	34,52	34,30
Informal	100,00	100,00	100,00
Laki-laki	59,56	59,97	58,95
Perempuan	40,44	40,03	41,05
Perkotaan	31,14	33,07	32,32
Perdesaan	68,86	66,93	67,68

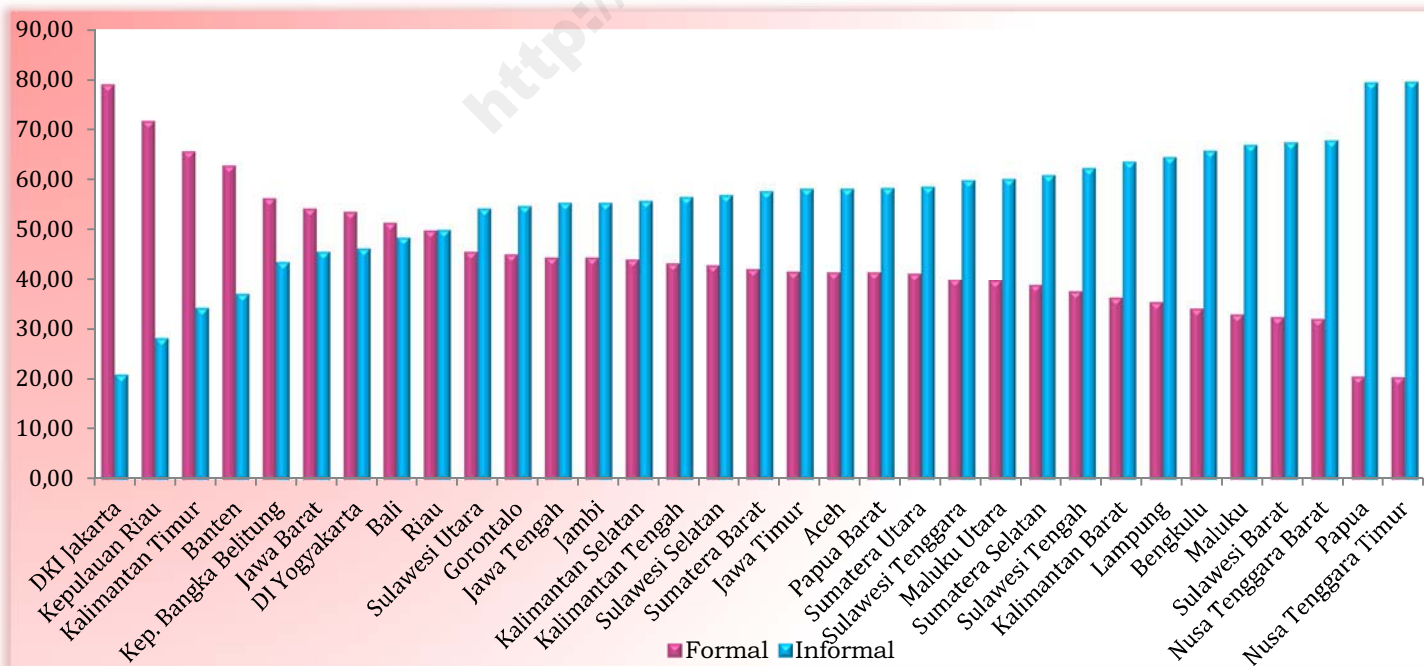
Salah satu ciri khas sektor formal, yaitu sektor yang sebagian besar terdapat di daerah perkotaan, hal ini terbukti dari hasil Sakernas seperti yang tampak pada Tabel 11. Hasil Sakernas Februari 2013 menunjukkan bahwa pada sektor formal sebesar 65,70 persen pekerja tinggal di perkotaan. Dimana angka tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan keadaan November 2012 yang sebesar 65,48 persen (naik 0,22 persen poin), sementara bila dibandingkan Agustus 2012 justru mengalami penurunan sebesar 0,68 persen poin. Di sisi lain persentase penduduk yang bekerja pada sektor informal lebih mendominasi di perdesaan, bahkan pada Februari 2013 mengalami peningkatan bila dibandingkan kondisi pada November 2012 yaitu dari 66,93 persen pada November 2012 menjadi 67,68 persen pada Februari 2013.

Menilik perbedaan wilayah ternyata propinsi yang lebih didominasi sektor formal lebih banyak berada di wilayah barat Indonesia (lihat Grafik 11). Dari lima provinsi dengan persentase penduduk yang bekerja di sektor formal paling tinggi, empat diantaranya berada di wilayah barat Indonesia yaitu Provinsi DKI Jakarta (79,06 persen), Kepulauan Riau (71,74 persen), Banten (62,89 persen) dan Kepulauan Bangka Belitung (56,33 persen), sementara provinsi yang tidak terletak di wilayah barat Indonesia adalah Kalimantan Timur (65,75 persen). Di sisi lain, tiga provinsi dengan persentase pekerja sektor informalnya paling tinggi secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (79,59 persen), Papua (79,47 persen), dan Nusa Tenggara Barat (67,95 persen).

Grafik 10. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Sektor (Formal dan Informal), November 2012 dan Februari 2013



Grafik 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Sektor (Formal dan Informal) dan Provinsi, Februari 2013



5. INDIKATOR PENGANGGURAN

5.1. KILM 8. PENGANGGURAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia sedikit berfluktuatif berdasarkan hasil Sakernas pada Agustus dan November 2012, serta Februari 2013. TPT pada Februari 2013 sebesar 5,92 persen naik sebesar 0,13 persen dibandingkan November 2012 (5,79 persen),

dan turun sebesar 0,22 persen poin dibandingkan Agustus 2012 (6,14 persen). TPT sebesar 5,92 persen tersebut mempunyai arti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sekitar 6 orang yang masuk kategori penganggur.

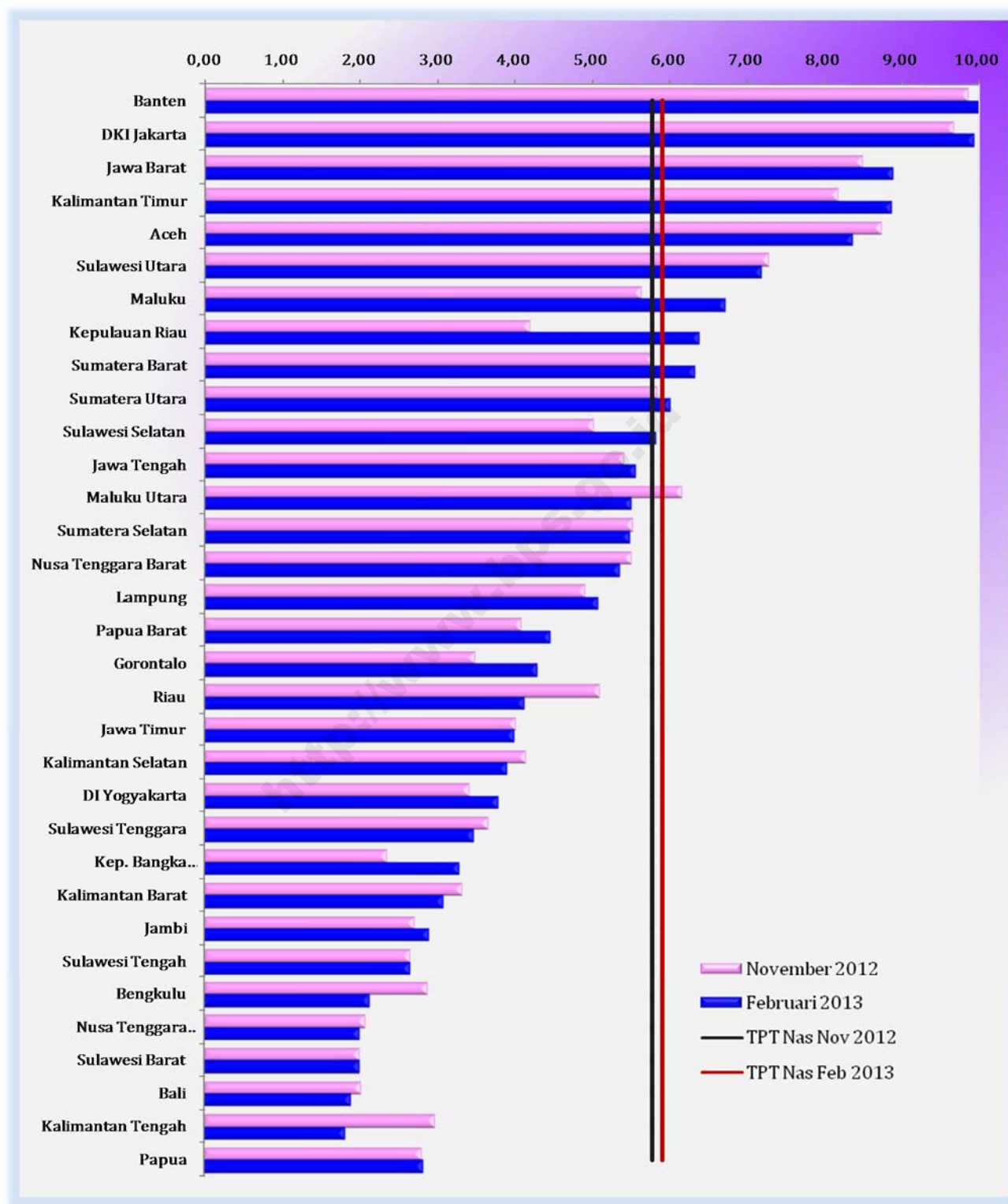
Tabel 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2012–2013
(persen)

TPT	2012		2013
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	6,14	5,79	5,92
Laki-laki	5,75	5,12	5,64
Perempuan	6,77	6,86	6,36
Perkotaan	7,66	7,14	7,30
Perdesaan	4,72	4,49	4,61

Dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki pada Februari 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,52 persen poin jika dibandingkan dengan November 2012, akan tetapi bila dibandingkan dengan Agustus 2012 mengalami penurunan sebesar 0,11 persen poin. Sedangkan TPT perempuan mengalami penurunan baik dibandingkan dengan keadaan November 2012 maupun Agustus 2012 dengan penurunan masing-masing sebesar 0,50 persen

poin dan 0,41 persen poin. Sementara itu, bila ditinjau berdasarkan klasifikasi wilayah, TPT periode November 2012–Februari 2013, cenderung mengalami kenaikan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Sedangkan jika dibandingkan Agustus 2012 terjadi penurunan TPT baik di daerah perkotaan maupun perdesaan dengan penurunan masing-masing sebesar 0,36 persen poin dan 0,11 persen poin.

Grafik 12. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, November 2012 dan Februari 2013
(persen)



Sementara itu, provinsi dengan TPT tertinggi berdasarkan hasil Sakernas Februari 2013 secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat, dengan TPT masing-masing sebesar 10,10 persen, 9,94 persen, dan 8,90 persen. Sedangkan pada November 2012, Provinsi Banten juga menduduki posisi TPT tertinggi yaitu sebesar 9,88 persen, kemudian disusul oleh Provinsi DKI Jakarta dengan TPT sebesar 9,67 persen, dan selanjutnya Provinsi Aceh berada pada urutan ketiga dengan TPT

sebesar 8,74 persen. Sebaliknya, provinsi dengan TPT terendah pada Februari 2013 diduduki oleh Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 1,82 persen, Provinsi Bali sebesar 1,89 persen, dan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,00 persen. Sedangkan berdasarkan hasil Sakernas pada November 2012, posisi ini secara berturut-turut diduduki oleh: Provinsi Sulawesi Barat (2,01 persen); Provinsi Bali (2,02 persen); dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (2,08 persen) (dapat dilihat pada Grafik 12).

<http://www.bps.go.id>

5.2. KILM 9. PENGANGGURAN PADA KELOMPOK UMUR MUDA

Penganggur pada kelompok umur muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak negara yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun keatas. Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tingkat pengangguran kaum muda;
- 2) Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa;
- 3) *Share* pengangguran kaum muda terhadap total;
- 4) Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda.

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2013, TPT penduduk pada kelompok umur muda sebesar 17,53 persen, yang menggambarkan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 18 orang yang menganggur. Angka tersebut turun sebesar 0,06 persen poin bila dibandingkan dengan November 2012 (17,59 persen), dan turun sebesar 2,03 persen poin bila dibandingkan Agustus 2012 (19,56 persen).

Apabila memperhatikan perbedaan jenis kelamin baik pada Agustus maupun November

2012, maka untuk penduduk umur muda TPT perempuan cenderung lebih tinggi daripada TPT laki-laki, akan tetapi pada Februari 2013 berbeda yaitu TPT umur muda laki-laki lebih tinggi dari perempuan. TPT umur muda pada laki-laki sebesar 17,80 persen sementara pada perempuan hanya 17,11 persen. Kondisi pada Februari 2013 jika dibandingkan dengan November 2012, menunjukkan bahwa terjadi penurunan TPT umur muda pada perempuan, tetapi tidak pada laki-laki yang justru mengalami peningkatan dari 17,13 persen pada November 2012 menjadi 17,80 persen pada Februari 2013. Hal yang berbeda tampak jika dibandingkan dengan keadaan bulan Agustus 2012, TPT umur muda baik pada laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami penurunan yaitu sebesar 1,63 persen poin pada laki-laki dan 2,66 persen poin pada perempuan.

Dilihat berdasarkan perbedaan daerah tempat tinggal, pada kelompok umur muda memperlihatkan pola bahwa TPT daerah perkotaan selalu lebih tinggi daripada di daerah perdesaan. Sebagai contoh pada Februari 2013, TPT daerah perkotaan mencapai 20,10 persen sementara di daerah perdesaan hanya sebesar 15,10 persen. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dari 100 penduduk usia 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, untuk daerah perkotaan terdapat sekitar 20 orang yang

menganggur, sementara untuk daerah perdesaan hanya sekitar 15 orang.

Rasio TPT umur muda terhadap TPT dewasa pada Februari 2013 sebesar 5,07 yang berarti TPT umur muda lima kali lipat lebih tinggi dibanding TPT dewasa. Sejalan dengan penurunan TPT umur muda pada Februari 2013, rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa juga mengalami penurunan sebesar 0,33 poin bila dibanding November

2012 atau turun sebesar 0,90 poin dibanding Agustus 2012. Jika dibedakan menurut karakteristik jenis kelamin, rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa pada laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan pada perempuan baik pada Agustus dan November 2012 maupun pada Februari 2013. Apabila dilihat menurut kategori kota-desa maka rasio ini cenderung lebih tinggi di daerah perdesaan dibanding di daerah perkotaan.

Tabel 13. Indikator Pengangguran Umur Muda di Indonesia, 2012–2013

Indikator	2012		2013
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
TPT Penduduk Umur Muda (%)	19,56	17,59	17,53
Laki-laki	19,43	17,13	17,80
Perempuan	19,77	18,30	17,11
Perkotaan	22,53	19,23	20,10
Perdesaan	16,83	16,04	15,10
Rasio TPT Umur Muda terhadap TPT Dewasa	5,97	5,40	5,07
Laki-laki	6,59	6,61	5,80
Perempuan	5,17	4,22	4,19
Perkotaan	5,00	4,21	4,38
Perdesaan	7,93	8,02	6,30
Share Penganggur Umur Muda terhadap Total Penganggur (%)	56,01	53,67	51,74
Laki-laki	57,52	58,15	54,99
Perempuan	53,91	48,27	47,16
Perkotaan	51,42	47,28	48,17
Perdesaan	62,96	63,37	57,08
Share Penganggur Umur Muda terhadap Total Penduduk Umur Muda (%)	9,66	8,86	8,77
Laki-laki	11,48	10,44	10,83
Perempuan	7,82	7,27	6,68
Perkotaan	10,68	9,42	9,79
Perdesaan	8,64	8,31	7,75

Share penganggur umur muda terhadap total penganggur berdasarkan hasil Sakernas Februari 2013 cukup tinggi yaitu 51,74 persen, yang berarti walaupun secara perlahan angka ini terus menunjukkan penurunan yaitu sebesar 1,93 persen poin jika dibandingkan November 2012 dan 4,27 persen jika dibandingkan Agustus 2012.

Share penganggur umur muda terhadap total penganggur yang mencapai 51,74 persen pada Februari 2013 dapat diartikan bahwa pada Februari 2013, dari 100 orang penganggur terdapat sekitar 52 orang penganggur yang berumur antara 15 sampai 24 tahun.

Sementara itu, *share* penganggur umur muda terhadap total penduduk umur muda pada Februari 2013 sebesar 8,77 persen atau turun bila dibanding November 2012 sebesar 8,86 persen dan turun cukup signifikan bila dibanding keadaan Agustus 2012 yang sebesar 9,66 persen. Dalam hal ini, *share* penganggur umur muda terhadap total penduduk umur muda yang mencapai 8,77 persen dapat diartikan bahwa pada Februari 2013 dari 100 penduduk umur muda sekitar 9 orang diantaranya menganggur.

5.3. KILM 11. PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN

Indikator ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk yang bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi yang diberikan dapat memiliki implikasi penting bagi penduduk yang bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika dikonfirmasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, reaksi politik yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Selain itu, *share* pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi.

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2013, secara umum dapat dikatakan bahwa TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah menengah sebesar 8,78 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok “tidak pernah sekolah” atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah dengan TPT sebesar 2,01 persen.

Seiring dengan kenaikan TPT nasional periode November 2012–Februari 2013, kenaikan TPT menurut tingkat pendidikan juga terdapat pada hampir seluruh jenjang pendidikan, kecuali TPT pada tingkat pendidikan sekolah tinggi yang mengalami penurunan sebesar 0,33 persen poin. Sementara jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012, penurunan TPT terdapat pada kelompok mereka yang tidak pernah sekolah dan tingkat sekolah dasar dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,49 persen poin dan 0,08 persen poin.

Penurunan TPT pada tingkat pendidikan sekolah tinggi periode November 2012–Februari 2013 juga diikuti dengan penurunan TPT pada penduduk laki-laki maupun perempuan, dimana penurunan pada penduduk perempuan lebih tinggi yaitu mencapai 0,66 persen poin sementara pada laki-laki hanya 0,06 persen poin. Begitu pula pada klasifikasi daerah kota-desa, pada periode yang sama juga mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,44 persen poin penurunan di daerah perkotaan, dan sebesar 0,04 persen poin di daerah perdesaan.

Tabel 14. TPT Menurut Tingkat Pendidikan, 2012–2013 (persen)

Tingkat Pendidikan	2012		2013
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	6,14	5,79	5,92
Tidak Pernah Sekolah	1,51	1,98	2,01
Laki-laki	1,39	1,69	2,62
Perempuan	1,61	2,20	1,56
Perkotaan	3,58	4,47	5,31
Perdesaan	0,95	1,25	1,08
Sekolah Dasar	5,05	4,87	5,13
Laki-laki	4,71	4,12	4,96
Perempuan	5,60	6,10	5,40
Perkotaan	6,69	6,48	6,75
Perdesaan	4,04	3,85	4,11
Sekolah Menengah	9,70	8,77	8,78
Laki-laki	8,86	7,84	7,78
Perempuan	11,43	10,69	10,76
Perkotaan	9,73	8,91	9,12
Perdesaan	9,63	8,46	8,06
Sekolah Tinggi	6,00	5,55	5,22
Laki-laki	4,89	4,77	4,71
Perempuan	7,32	6,46	5,80
Perkotaan	6,33	5,52	5,08
Perdesaan	4,86	5,66	5,62

Secara keseluruhan pada periode November 2012–Februari 2013, kenaikan TPT terbesar terjadi pada penduduk laki-laki pada jenjang pendidikan tidak pernah sekolah dengan kenaikan sebesar 0,93 persen poin. Pada November 2012 TPT pada kelompok ini adalah 1,69 persen, sedangkan pada Februari 2013 meningkat menjadi 2,62 persen.

Melihat komposisi penganggur berdasarkan tingkat pendidikan seperti yang

terlihat pada Tabel 15 memberikan gambaran mengenai tenaga kerja yang tersedia yang tidak terserap berdasarkan tingkat keahlian atau pendidikan mereka. Berdasarkan data Sakernas baik pada Agustus 2012, November 2012, maupun Februari 2013 menunjukkan bahwa persentase penganggur terbanyak pada jenjang pendidikan sekolah dasar.

Pada Februari 2013, persentase penganggur pada tingkat pendidikan sekolah dasar mencapai 52,40 persen, meningkat sebesar 0,97 persen poin jika dibandingkan November 2012 (51,43 persen) dan meningkat sebesar 1,96 persen poin jika dibandingkan Agustus 2012 (50,44 persen).

Sementara itu, pada periode November 2012–Februari 2013, penurunan persentase penganggur berdasarkan tingkat pendidikan terjadi hanya pada tingkat pendidikan sekolah menengah dan sekolah tinggi, dengan penurunan masing-masing sebesar 0,40 persen poin dan 0,59 persen poin. Sementara pada tingkat pendidikan tidak pernah sekolah dan sekolah dasar mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen poin dan 0,97 persen poin.

Melihat lebih lanjut pada Tabel 15, baik pada keadaan Agustus maupun November 2012 serta Februari 2013, persentase perempuan yang menganggur dengan pendidikan sekolah

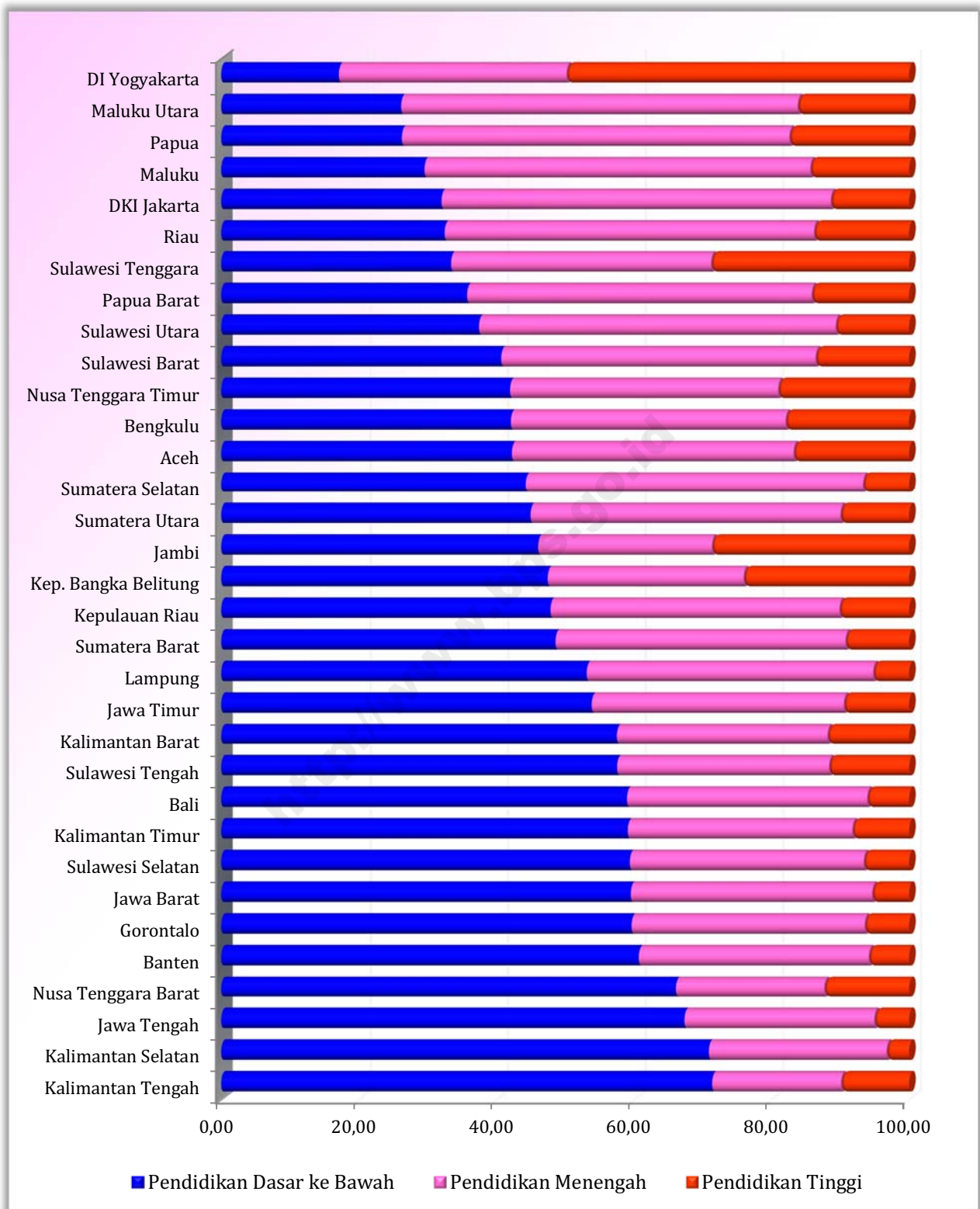
tinggi lebih tinggi dibandingkan persentase laki-laki yang menganggur pada tingkat pendidikan yang sama. Sebagai contoh pada Februari 2013, diantara seluruh penganggur perempuan yang berpendidikan sekolah tinggi mencapai 10,66 persen, sementara diantara seluruh penganggur laki-laki yang berpendidikan sekolah tinggi hanya sebesar 7,09 persen.

Berdasarkan klasifikasi perbedaan wilayah, pada Februari 2013, persentase penduduk perdesaan yang menganggur dengan jenjang pendidikan tidak pernah bersekolah dan sekolah dasar lebih tinggi daripada persentase penduduk perkotaan pada jenjang pendidikan yang sama. Seperti terlihat pada Tabel 15, persentase penduduk perkotaan yang menganggur dengan pendidikan tidak pernah sekolah dan sekolah dasar berturut-turut sebesar 1,49 persen dan 44,35 persen, sementara pada perdesaan mencapai 1,60 persen dan 64,45 persen.

Tabel 15. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2012–2013

Tingkat Pendidikan	2012		2013
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	1,14	1,51	1,53
Laki-laki	0,78	1,00	1,45
Perempuan	1,64	2,11	1,65
Perkotaan	0,95	1,28	1,49
Perdesaan	1,42	1,84	1,60
Sekolah Dasar	50,44	51,43	52,40
Laki-laki	50,50	49,31	53,65
Perempuan	50,35	53,99	50,64
Perkotaan	42,14	44,23	44,35
Perdesaan	63,00	62,37	64,45
Sekolah Menengah	39,66	37,90	37,50
Laki-laki	42,02	41,94	37,81
Perempuan	36,38	33,04	37,05
Perkotaan	45,06	43,30	43,80
Perdesaan	31,49	29,72	28,07
Sekolah Tinggi	8,76	9,16	8,57
Laki-laki	6,70	7,75	7,09
Perempuan	11,63	10,86	10,66
Perkotaan	11,85	11,19	10,36
Perdesaan	4,09	6,07	5,88

Grafik 13. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, Februari 2013



5.4. KILM 12. SETENGAH PENGANGGUR (*UNDEREMPLOYMENT*)

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (<35 jam dalam seminggu), dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

Berdasarkan Sakernas Februari 2013 jumlah setengah penganggur di Indonesia mencapai 13,56 juta orang (Tabel 16), dimana 7,70 juta orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Sedangkan

berdasarkan perbedaan klasifikasi desa-kota, pada Februari 2013, jumlah setengah penganggur di daerah perdesaan mencapai lebih dari dua kali lipat dibanding di perkotaan. Jumlah setengah penganggur di perdesaan mencapai 9,29 juta orang, sementara di perkotaan hanya sebesar 4,27 juta orang.

Tabel 16. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Termasuk Setengah Penganggur, 2012–2013 (dalam juta)

Setengah Penganggur	2012		2013
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	12,77	10,25	13,56
Laki-laki	7,37	6,32	7,70
Perempuan	5,40	3,93	5,86
Perkotaan	3,57	3,23	4,27
Perdesaan	9,20	7,02	9,29

Pada periode November 2012–Februari 2013 memperlihatkan adanya peningkatan jumlah setengah penganggur sebanyak 3,31 juta orang. Peningkatan angka secara nasional ini diikuti dengan peningkatan jumlah setengah penganggur menurut jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan dengan kenaikan masing-masing sebanyak 1,38 juta orang dan 1,93 juta orang. Peningkatan juga terjadi baik di

wilayah perkotaan maupun perdesaan, yaitu masing-masing sebanyak 1,04 juta orang dan 2,27 juta orang.

Tabel 17 berikut ini menunjukkan bahwa persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada Februari 2013 naik sebesar 2,68 persen poin dibandingkan dengan kondisi November 2012 atau naik sebesar 0,37 persen poin jika dibandingkan keadaan Agustus 2012.

Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada Agustus 2012 adalah 10,82 persen, sedangkan pada November 2012 dan Februari 2013 masing-masing 8,51 persen dan 11,19 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada Agustus 2012, dari 100 orang

penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, terdapat sekitar 11 orang setengah penganggur, sedangkan pada November 2012 turun menjadi hanya sekitar 9 orang setengah penganggur dan pada Februari 2013 naik menjadi sekitar 11 orang setengah penganggur.

Tabel 17. Indikator Setengah Penganggur, 2012–2013

Indikator	2012		2013
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja	10,82	8,51	11,19
Laki-laki	10,06	8,50	10,35
Perempuan	12,06	8,54	12,53
Perkotaan	6,26	5,49	7,25
Perdesaan	15,07	11,40	14,91
Persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja	11,52	9,04	11,89
Laki-laki	10,67	8,96	10,96
Perempuan	12,93	9,16	13,38
Perkotaan	6,78	5,92	7,82
Perdesaan	15,82	11,93	15,63

Sementara itu, pada periode November 2012–Februari 2013 juga terjadi peningkatan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja. Pada November 2012, dari 100 orang penduduk yang bekerja sekitar 9 orang diantaranya adalah setengah penganggur, sedangkan pada Februari 2013 terjadi peningkatan hingga mencapai 12 orang setengah penganggur per 100 orang penduduk bekerja.

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, peningkatan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja lebih terlihat pada kelompok perempuan. Pada November 2012, dari 100 orang penduduk yang bekerja, 9 orang perempuan diantaranya adalah setengah penganggur, sedangkan pada Februari 2013 meningkat menjadi sekitar 13 orang perempuan yang merupakan setengah penganggur.

Ditinjau berdasarkan klasifikasi wilayah, ternyata juga terjadi peningkatan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Sebagai gambaran, pada kondisi Februari 2013 dibandingkan November 2012, terjadi peningkatan sebesar 1,90 persen poin di daerah perkotaan, sedangkan di perdesaan peningkatan ini mencapai 3,70 persen poin.

Menilik komposisi setengah penganggur berdasarkan tingkat pendidikan seperti yang tampak pada Grafik 14, peningkatan persentase setengah penganggur menurut tingkat pendidikan hanya terjadi pada kelompok

penduduk yang “tidak pernah sekolah” yaitu sebesar 1,63 persen poin (November 2012–Februari 2013). Kemudian apabila dirinci lagi berdasarkan jenis kelamin, pada tingkat pendidikan yang sama, peningkatan yang relatif besar terjadi pada kelompok perempuan dengan peningkatan sebesar 2,46 persen poin sementara laki-laki juga mengalami peningkatan sebesar 0,79 persen poin. Sementara itu pada periode yang sama, penurunan persentase setengah penganggur terbesar menurut tingkat pendidikan terdapat pada tingkat sekolah menengah yaitu sebesar 1,08 persen poin.

Grafik 14. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, November 2012 dan Februari 2013



Tabel 18. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2012–2013

Tingkat Pendidikan	2012		2013
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	5,23	4,42	6,05
Laki-laki	3,77	3,53	4,32
Perempuan	7,23	5,86	8,32
Perkotaan	2,79	2,70	3,40
Perdesaan	6,18	5,22	7,26
Sekolah Dasar	72,04	69,09	68,69
Laki-laki	73,18	70,76	71,04
Perempuan	70,47	66,42	65,60
Perkotaan	61,24	60,04	59,95
Perdesaan	76,23	73,26	72,70
Sekolah Menengah	18,18	20,12	19,04
Laki-laki	19,27	21,22	20,29
Perempuan	16,68	18,34	17,40
Perkotaan	26,71	26,75	26,09
Perdesaan	14,87	17,06	15,80
Sekolah Tinggi	4,55	6,37	6,22
Laki-laki	3,77	4,49	4,35
Perempuan	5,61	9,38	8,68
Perkotaan	9,26	10,51	10,56
Perdesaan	2,72	4,46	4,24

5.5. KILM 13. TINGKAT KETIDAKAKTIFAN

Tingkat ketidakaktifan di Indonesia pada Februari 2013 adalah 30,79 persen, artinya dari 100 persen penduduk usia kerja di Indonesia yang tidak aktif dalam pasar kerja (tidak bekerja maupun menganggur) sebanyak 30,79 persen.

Tingkat ketidakaktifan pada Februari 2013, jika dibandingkan dengan keadaan November 2012 turun sebesar 0,25 persen poin, bahkan jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012 menurun sebesar 1,33 persen poin. Terjadinya fenomena penurunan tingkat ketidakaktifan ini sebenarnya menunjukkan adanya perpindahan penduduk dari kelompok bukan angkatan kerja ke angkatan kerja. Secara absolut penduduk umur 15 tahun keatas yang tergolong ke dalam bukan angkatan kerja mengalami penurunan sekitar 0,26 juta orang

dari 54,17 juta orang pada November 2012 menjadi 53,91 juta orang pada Februari 2013.

Melihat perbedaan jenis kelamin, ternyata terdapat kesenjangan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan terkait tingkat ketidakaktifan. Berdasarkan angka Februari 2013 untuk laki-laki, dari seratus orang penduduk usia kerja, yang tidak aktif dalam pasar kerja hanya sekitar 15 orang, sementara untuk perempuan mencapai sekitar 47 orang. Apabila dibandingkan dengan keadaan November 2012, terjadi penurunan tingkat ketidakaktifan pada perempuan yaitu sebesar 0,69 persen poin tetapi hal sebaliknya terjadi pada laki-laki, tingkat ketidak aktifan laki-laki justru meningkat sebesar 0,20 persen poin.

Tabel 19. Indikator Ketidakaktifan, 2012–2013
(persen)

Tingkat ketidakaktifan	2012		2013
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	32,12	31,04	30,79
Laki-laki	15,58	14,68	14,88
Perempuan	48,61	47,33	46,64
Perkotaan	34,73	32,88	33,04
Perdesaan	29,49	29,18	28,52

Berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat ketidakaktifan ternyata lebih tinggi di daerah perkotaan dibanding di perdesaan. Pada Februari 2013 tingkat ketidakaktifan di perkotaan sebesar 33,04 persen sementara di daerah perdesaan sebesar 28,52 persen. Terjadi penurunan tingkat ketidakaktifan di daerah perkotaan pada Februari 2013 dibanding November 2012 yaitu sebesar 0,66 persen sementara untuk daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,16 persen poin, yaitu dari 32,88 persen pada November 2012 menjadi 33,04 persen pada Februari 2013.

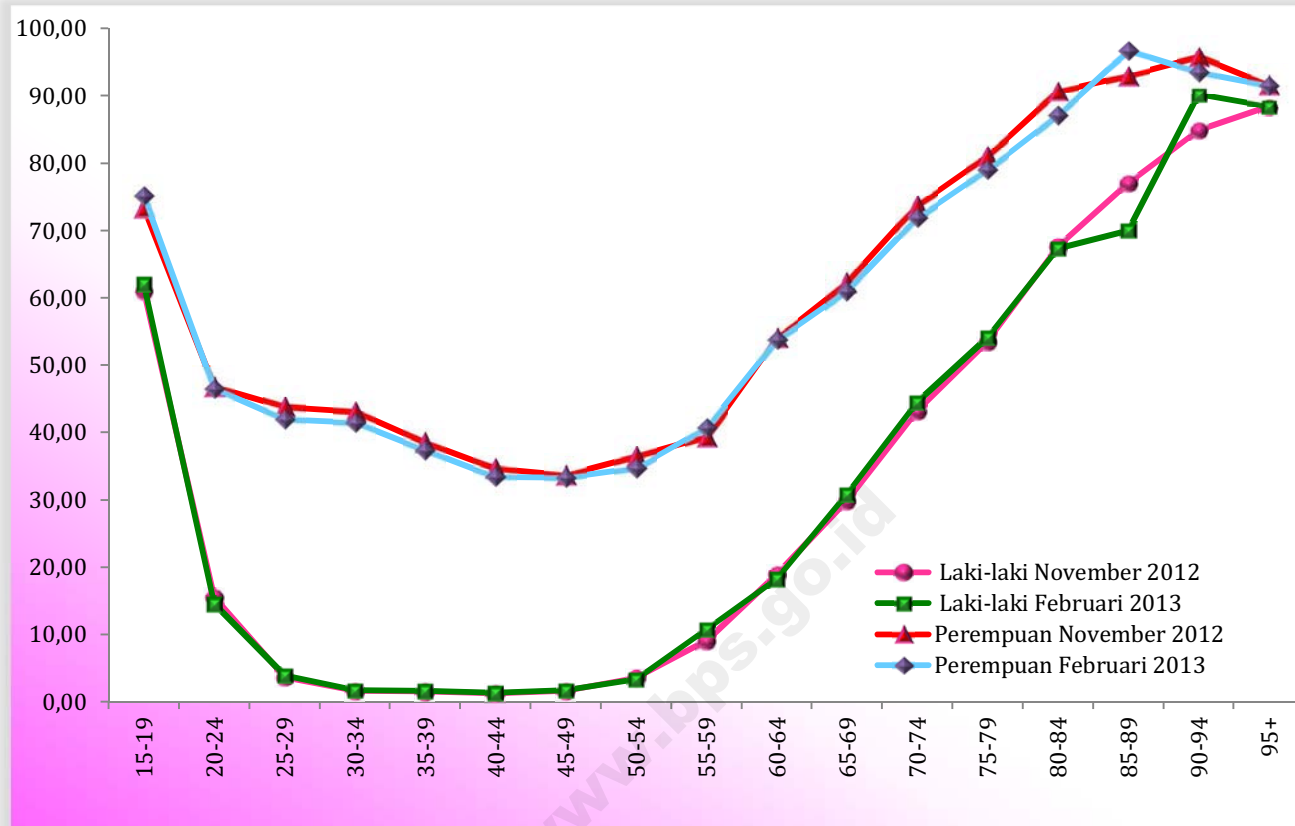
Pada Grafik 15, tampak pola tingkat ketidakaktifan yang membentuk huruf “J” mengindikasikan tingginya tingkat ketidakaktifan pada penduduk umur muda, lalu turun pada umur produktif dan kembali meningkat pada umur-umur tua.

Berdasarkan Grafik 15 ini kita juga dapat melihat perbedaan pola tingkat ketidakaktifan

menurut kelompok umur antara laki-laki dan perempuan. Pada Februari 2013, tingkat ketidakaktifan laki-laki pada kelompok umur (15–19) tahun mencapai 62,08 persen kemudian pada kelompok umur (20–24) tahun terus mengalami penurunan hingga mencapai 1,34 persen pada kelompok umur (40–44) tahun. Tingkat ketidakaktifan laki-laki kembali meningkat dimulai pada kelompok umur (45–49) tahun.

Sementara pada perempuan di kelompok umur (15–19) tahun tingkat ketidakaktifan mencapai 75,11 persen. Pada kelompok umur (20–24) tahun, tingkat ketidakaktifan perempuan mulai terus mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah di kelompok umur (45–49) tahun yaitu sekitar 33,27 persen. Tingkat ketidakaktifan perempuan kembali meningkat pada kelompok umur (50–54) tahun.

Grafik 15. Tingkat Ketidaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin,
November 2012 dan Februari 2013 (persen)



6. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. PENCAPAIAN PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan faktor penentu kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja sesuai dengan lima tingkat pendidikan yaitu kurang dari satu tahun, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier. Kategori yang digunakan dalam indikator ini, secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (ISCED). Sayangnya, Sakernas tidak menyediakan data mengenai kemampuan baca-tulis (melek huruf) penduduk yang bekerja, sehingga pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat literasi (melek huruf) hanyalah pendidikan saja.

Secara nasional, hasil Sakernas Februari 2013 tidak menunjukkan perubahan komposisi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan jika dibanding Sakernas pada November 2012. Angkatan kerja saat ini masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar 60,48 persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah

menengah sebesar 25,28 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 9,72 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya sekitar 4,52 persen angkatan kerja yang tidak pernah sekolah (Tabel 20).

Perbedaan kualitas angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari tingkat pendidikannya memang cukup menarik. Pada Februari 2013, persentase angkatan kerja perempuan yang tidak pernah sekolah lebih tinggi dari persentase angkatan kerja laki-laki yang tidak pernah sekolah (mencapai lebih dari dua kali lipat). Begitu pula untuk jenjang pendidikan sekolah tinggi persentase perempuan yang mempunyai pendidikan sekolah tinggi lebih tinggi dibanding laki-laki yaitu 11,69 persen dibanding 8,48 persen.

Grafik 16 menggambarkan angkatan kerja menurut tingkat pendidikan dalam beberapa kelompok umur. Berdasarkan grafik tersebut tampak bahwa pada kelompok usia muda, baik pada November 2012 maupun Februari 2013, persentase angkatan kerja didominasi oleh mereka yang menamatkan pendidikan sekolah dasar (mencapai lebih dari 56 persen), kemudian disusul pada jenjang sekolah menengah (sekitar 37 persen).

Pola yang sama juga terlihat pada kelompok umur dewasa dan pemuda yaitu angkatan kerja juga didominasi oleh tamatan sekolah dasar dan disusul oleh mereka yang tamat sekolah menengah. Hal yang cukup menarik adalah bahwa pada kelompok umur muda dan pemuda, masih terdapat sekitar satu persen angkatan kerja yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah, padahal program

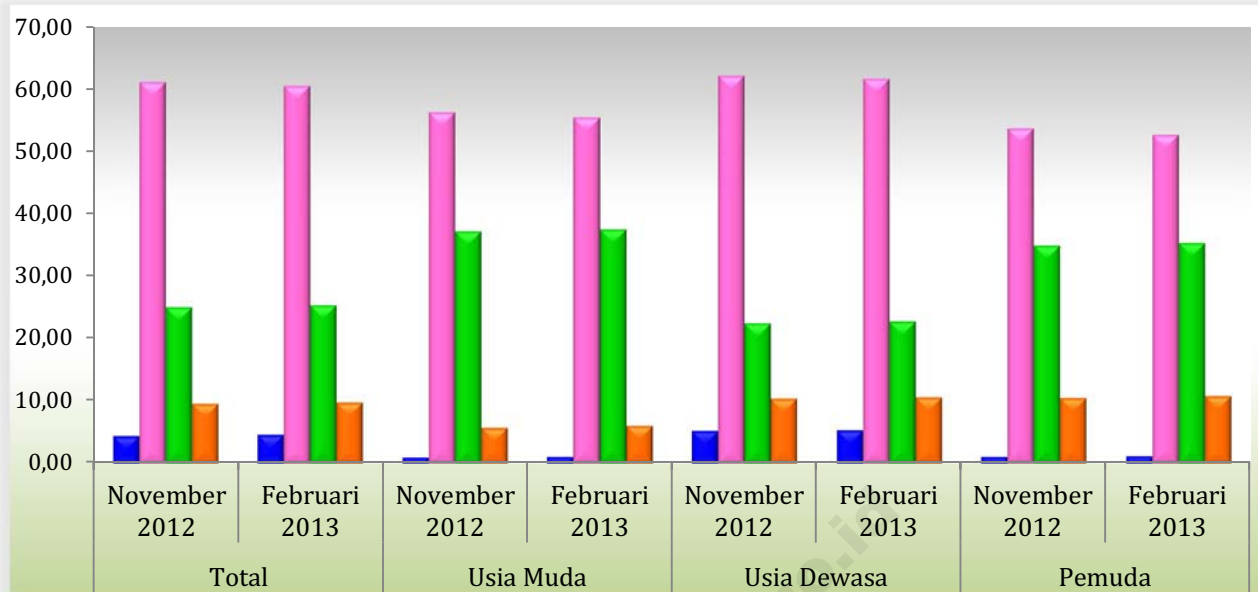
wajib belajar telah dicanangkan sejak tahun 1984.

Merujuk pada Grafik 17, baik pada November 2012 maupun Februari 2013, pada perempuan angkatan kerja lebih banyak terkonsentrasi pada jenjang pendidikan rendah (dasar ke bawah) dan tinggi, sementara pada laki-laki justru lebih mengelompok pada jenjang pendidikan menengah.

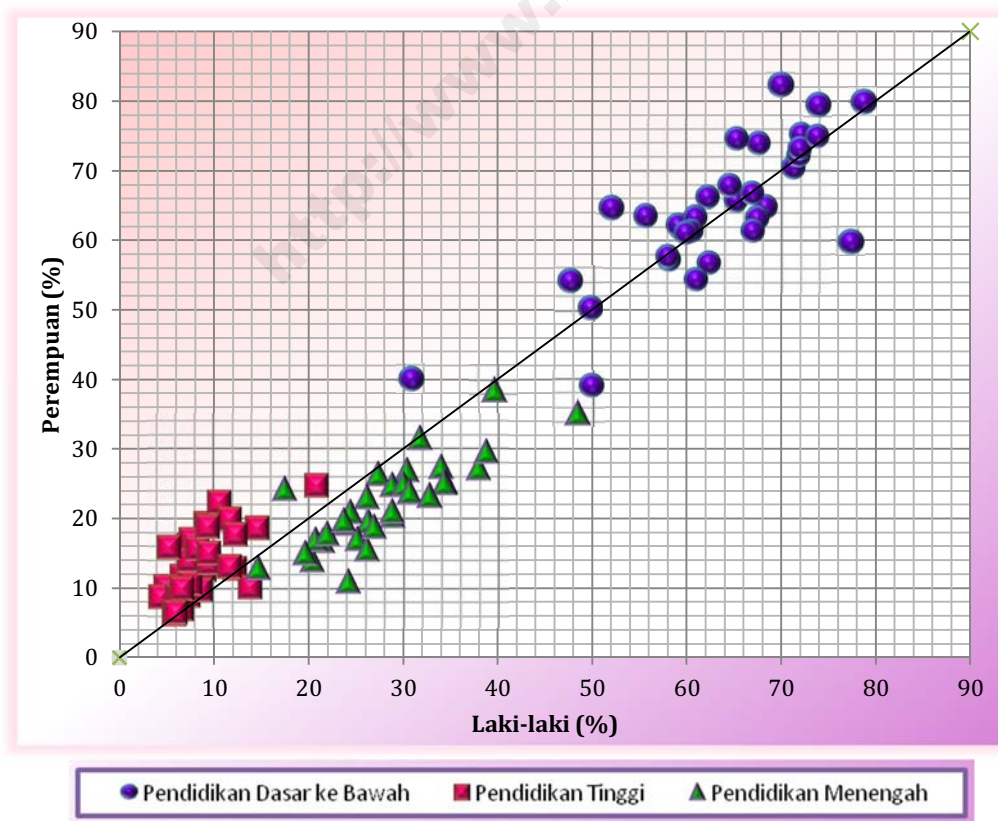
Tabel 20. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2012–2013

Tingkat Pendidikan	2012		2013
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	4,61	4,39	4,52
Laki-laki	3,22	3,03	3,11
Perempuan	6,89	6,57	6,75
Perkotaan	2,04	2,05	2,04
Perdesaan	7,01	6,62	6,85
Sekolah Dasar	61,32	61,05	60,48
Laki-laki	61,63	61,28	61,01
Perempuan	60,83	60,69	59,65
Perkotaan	48,19	48,77	48,00
Perdesaan	73,59	72,78	72,27
Sekolah Menengah	25,10	25,02	25,28
Laki-laki	27,27	27,38	27,40
Perempuan	21,54	21,21	21,91
Perkotaan	35,45	34,70	35,06
Perdesaan	15,43	15,78	16,05
Sekolah Tinggi	8,97	9,54	9,72
Laki-laki	7,88	8,31	8,48
Perempuan	10,75	11,53	11,69
Perkotaan	14,32	14,48	14,90
Perdesaan	3,97	4,82	4,83

Grafik 16. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, November 2012 dan Februari 2013



Grafik 17. Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Februari 2013



<http://www.bps.go.id>

LAMPIRAN

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 1. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013
(dalam ribu)

Provinsi	Agustus 2012			November 2012			Februari 2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 582,90	1 620,06	3 202,96	1 591,09	1 628,64	3 219,72	1 599,17	1 637,06	3 236,22
Sumatera Utara	4 346,49	4 487,83	8 834,32	4 356,08	4 497,56	8 853,64	4 364,85	4 507,19	8 872,03
Sumatera Barat	1 646,35	1 734,54	3 380,89	1 650,90	1 739,16	3 390,06	1 655,57	1 743,84	3 399,41
Riau	2 053,67	1 931,58	3 985,26	2 070,75	1 947,01	4 017,76	2 087,87	1 962,88	4 050,75
Jambi	1 153,73	1 106,96	2 260,69	1 160,19	1 113,45	2 273,64	1 166,86	1 119,33	2 286,19
Sumatera Selatan	2 730,22	2 655,51	5 385,73	2 740,36	2 666,01	5 406,37	2 751,35	2 676,73	5 428,08
Bengkulu	626,92	602,39	1 229,31	629,04	604,56	1 233,60	631,31	606,62	1 237,92
Lampung	2 826,16	2 663,43	5 489,58	2 833,31	2 669,69	5 503,00	2 839,79	2 676,51	5 516,30
Kep. Bangka Belitung	480,12	439,95	920,07	483,41	442,93	926,35	486,83	446,13	932,96
Kepulauan Riau	674,14	641,14	1 315,28	681,71	648,55	1 330,26	689,65	655,96	1 345,61
DKI Jakarta	3 787,79	3 714,41	7 502,19	3 798,91	3 724,68	7 523,59	3 809,59	3 735,46	7 545,04
Jawa Barat	16 012,10	15 582,05	31 594,14	16 077,70	15 646,16	31 723,86	16 142,38	15 709,37	31 851,75
Jawa Tengah	11 747,35	12 186,06	23 933,41	11 750,45	12 189,68	23 940,13	11 753,95	12 192,80	23 946,75
DI Yogyakarta	1 340,95	1 404,13	2 745,07	1 343,69	1 407,06	2 750,75	1 346,33	1 409,77	2 756,10
Jawa Timur	13 935,25	14 651,67	28 586,93	13 952,97	14 669,43	28 622,40	13 969,73	14 687,78	28 657,52
Banten	4 017,80	3 863,11	7 880,92	4 043,22	3 887,34	7 930,56	4 068,29	3 911,25	7 979,54
Bali	1 503,14	1 505,83	3 008,97	1 509,85	1 512,87	3 022,71	1 517,05	1 519,72	3 036,77
Nusa Tenggara Barat	1 495,59	1 668,11	3 163,69	1 498,75	1 671,83	3 170,58	1 502,06	1 675,56	3 177,61
Nusa Tenggara Timur	1 486,93	1 570,45	3 057,37	1 493,45	1 577,16	3 070,61	1 500,37	1 584,99	3 085,36
Kalimantan Barat	1 551,83	1 488,96	3 040,80	1 554,37	1 491,45	3 045,82	1 556,83	1 493,76	3 050,59
Kalimantan Tengah	829,49	751,74	1 581,24	832,67	754,36	1 587,03	835,96	757,27	1 593,23
Kalimantan Selatan	1 342,78	1 329,51	2 672,30	1 348,51	1 335,38	2 683,89	1 354,28	1 341,08	2 695,37
Kalimantan Timur	1 417,44	1 249,66	2 667,10	1 430,07	1 261,10	2 691,17	1 442,47	1 272,05	2 714,52
Sulawesi Utara	852,11	824,12	1 676,23	854,37	826,49	1 680,85	856,52	828,62	1 685,15
Sulawesi Tengah	935,04	892,33	1 827,37	938,90	896,29	1 835,18	942,60	900,07	1 842,67
Sulawesi Selatan	2 702,85	2 965,14	5 667,99	2 708,78	2 972,16	5 680,94	2 714,99	2 978,97	5 693,96
Sulawesi Tenggara	748,23	761,75	1 509,98	751,71	765,42	1 517,13	755,22	768,61	1 523,82
Gorontalo	367,24	371,64	738,89	369,17	373,92	743,09	371,00	375,70	746,70
Sulawesi Barat	386,80	394,96	781,76	389,23	397,55	786,78	391,51	399,82	791,32
Maluku	517,22	518,70	1 035,92	520,52	521,87	1 042,39	523,88	525,21	1 049,09
Maluku Utara	358,38	344,15	702,53	360,28	346,00	706,28	362,29	347,96	710,25
Papua Barat	287,59	251,12	538,71	291,57	253,58	545,15	293,99	255,73	549,72
Papua	1 062,36	946,79	2 009,15	1 102,51	981,50	2 084,02	1 116,59	993,83	2 110,42
Indonesia	86 806,93	87 119,77	173 926,70	87 118,48	87 420,82	174 539,30	87 401,12	87 697,59	175 098,71

Lampiran 2. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur, 2012–2013
(dalam juta)

Kelompok Umur	2012		2013
	Agustus	November	
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun Keatas	173,93	174,54	175,10
Laki-laki	86,81	87,12	87,40
Perempuan	87,12	87,42	87,70
Perkotaan	87,34	87,61	87,89
Perdesaan	86,59	86,93	87,21
(15–24)	42,01	42,17	42,31
Laki-laki	21,13	21,21	21,28
Perempuan	20,88	20,96	21,03
Perkotaan	21,01	21,08	21,15
Perdesaan	21,00	21,09	21,16
(15–64)	161,66	162,59	163,18
Laki-laki	81,31	81,83	82,12
Perempuan	80,34	80,76	81,06
Perkotaan	81,30	81,82	82,14
Perdesaan	80,36	80,77	81,04
(25–54)	104,76	105,14	105,48
Laki-laki	52,67	52,86	53,03
Perempuan	52,10	52,28	52,45
Perkotaan	52,87	53,04	53,21
Perdesaan	51,89	52,10	52,27
(25–34)	42,41	42,57	42,71
Laki-laki	21,22	21,30	21,37
Perempuan	21,19	21,27	21,34
Perkotaan	21,53	21,60	21,67
Perdesaan	20,88	20,97	21,04
(35–54)	62,36	62,57	62,77
Laki-laki	31,44	31,56	31,66
Perempuan	30,91	31,02	31,11
Perkotaan	31,35	31,44	31,54
Perdesaan	31,01	31,13	31,23
(55–64)	14,88	15,28	15,39
Laki-laki	7,52	7,77	7,81
Perempuan	7,36	7,51	7,58
Perkotaan	7,42	7,71	7,78
Perdesaan	7,47	7,58	7,61
65 Tahun Keatas	12,27	11,95	11,92
Laki-laki	5,49	5,29	5,28
Perempuan	6,78	6,66	6,64
Perkotaan	6,04	5,79	5,75
Perdesaan	6,23	6,16	6,17

Lampiran 3. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013
(dalam ribu)

Provinsi	Agustus 2012			November 2012			Februari 2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 262,67	715,82	1 978,49	1 342,05	767,44	2 109,49	1 319,72	801,80	2 121,52
Sumatera Utara	3 790,52	2 341,14	6 131,66	3 768,28	2 718,32	6 486,60	3 736,97	2 715,02	6 451,98
Sumatera Barat	1 337,16	842,66	2 179,83	1 399,66	979,19	2 378,85	1 400,31	990,31	2 390,62
Riau	1 726,16	780,62	2 506,78	1 804,33	890,28	2 694,60	1 819,02	996,85	2 815,86
Jambi	975,88	495,04	1 470,92	992,15	551,03	1 543,19	995,97	586,21	1 582,18
Sumatera Selatan	2 350,31	1 396,06	3 746,37	2 340,21	1 428,63	3 768,84	2 349,77	1 555,21	3 904,98
Bengkulu	528,19	333,20	861,39	544,10	350,71	894,81	551,06	369,14	920,20
Lampung	2 385,67	1 252,23	3 637,90	2 455,42	1 379,77	3 835,18	2 467,05	1 418,60	3 885,65
Kep. Bangka Belitung	416,61	187,55	604,16	428,65	225,83	654,48	428,99	234,15	663,14
Kepulauan Riau	581,33	290,04	871,37	600,13	343,01	943,14	606,21	342,88	949,09
DKI Jakarta	3 146,44	2 222,13	5 368,57	3 204,49	2 017,05	5 221,53	3 167,04	1 996,91	5 163,95
Jawa Barat	13 370,32	6 779,78	20 150,09	13 715,35	6 516,90	20 232,25	13 795,27	6 593,37	20 388,64
Jawa Tengah	10 106,61	6 988,42	17 095,03	9 972,27	7 110,44	17 082,71	9 897,30	7 012,23	16 909,53
DI Yogyakarta	1 077,37	867,49	1 944,86	1 061,08	803,25	1 864,33	1 067,46	841,71	1 909,17
Jawa Timur	11 813,39	8 088,17	19 901,56	11 925,08	8 080,35	20 005,43	11 902,20	8 193,55	20 095,75
Banten	3 405,51	1 719,55	5 125,06	3 433,24	2 016,53	5 449,77	3 524,69	1 951,18	5 475,88
Bali	1 263,63	1 052,41	2 316,03	1 276,65	1 050,18	2 326,83	1 296,38	1 099,99	2 396,37
Nusa Tenggara Barat	1 209,37	879,34	2 088,71	1 255,09	899,47	2 154,56	1 262,85	972,50	2 235,35
Nusa Tenggara Timur	1 219,30	938,74	2 158,04	1 233,25	975,89	2 209,14	1 261,22	1 051,27	2 312,49
Kalimantan Barat	1 329,75	852,78	2 182,52	1 348,82	900,91	2 249,73	1 332,62	891,53	2 224,15
Kalimantan Tengah	720,39	384,87	1 105,26	743,40	442,95	1 186,35	731,00	426,15	1 157,14
Kalimantan Selatan	1 172,44	749,71	1 922,15	1 160,82	732,85	1 893,67	1 165,44	772,05	1 937,49
Kalimantan Timur	1 252,40	524,98	1 777,38	1 283,28	551,08	1 834,36	1 280,58	608,85	1 889,43
Sulawesi Utara	697,63	340,50	1 038,13	727,00	381,25	1 108,26	725,51	363,60	1 089,11
Sulawesi Tengah	799,07	413,99	1 213,06	820,00	494,44	1 314,43	825,39	497,44	1 322,83
Sulawesi Selatan	2 209,85	1 351,04	3 560,89	2 258,24	1 331,41	3 589,64	2 247,22	1 372,78	3 619,99
Sulawesi Tenggara	623,10	393,86	1 016,96	639,21	416,92	1 056,13	636,16	424,18	1 060,34
Gorontalo	303,46	162,61	466,07	314,37	164,87	479,24	310,72	169,67	480,38
Sulawesi Barat	338,44	222,32	560,76	337,31	247,41	584,73	333,15	239,86	573,01
Maluku	408,50	251,46	659,95	421,31	278,89	700,20	429,07	285,27	714,34
Maluku Utara	296,27	169,84	466,11	301,12	175,77	476,89	306,13	176,13	482,27
Papua Barat	228,84	132,75	361,60	236,35	144,43	380,78	237,22	137,97	375,19
Papua	938,18	647,26	1 585,43	983,21	674,10	1 657,30	988,90	704,80	1 693,69
Indonesia	73 284,75	44 768,36	118 053,11	74 325,90	46 041,52	120 367,42	74 398,56	46 793,15	121 191,71

Lampiran 4. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Termasuk Angkatan Kerja
Menurut Kelompok Umur, 2012–2013
(dalam juta)

Kelompok Umur	2012		2013
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun Keatas	118,05	120,37	121,19
Laki-laki	73,28	74,33	74,40
Perempuan	44,77	46,04	46,79
Perkotaan	57,00	58,80	58,85
Perdesaan	61,05	61,57	62,34
(15–24)	20,74	21,25	21,16
Laki-laki	12,48	12,92	12,95
Perempuan	8,26	8,33	8,21
Perkotaan	9,96	10,32	10,30
Perdesaan	10,78	10,92	10,86
(15–64)	113,46	115,69	116,48
Laki-laki	70,37	71,38	71,50
Perempuan	43,09	44,31	44,98
Perkotaan	55,19	56,94	57,01
Perdesaan	58,26	58,75	59,47
(25–54)	82,61	83,63	84,54
Laki-laki	51,56	51,72	51,83
Perempuan	31,05	31,91	32,72
Perkotaan	40,74	41,67	41,84
Perdesaan	41,87	41,95	42,70
(25–34)	32,46	32,78	33,22
Laki-laki	20,67	20,74	20,77
Perempuan	11,79	12,04	12,45
Perkotaan	16,38	16,69	16,82
Perdesaan	16,09	16,09	16,40
(35–54)	50,14	50,85	51,33
Laki-laki	30,89	30,97	31,06
Perempuan	19,25	19,87	20,27
Perkotaan	24,36	24,98	25,02
Perdesaan	25,78	25,86	26,31
(55–64)	10,11	10,81	10,78
Laki-laki	6,32	6,74	6,73
Perempuan	3,79	4,07	4,05
Perkotaan	4,50	4,94	4,86
Perdesaan	5,62	5,87	5,91
65 Tahun Keatas	4,60	4,68	4,71
Laki-laki	2,92	2,95	2,90
Perempuan	1,68	1,73	1,82
Perkotaan	1,81	1,86	1,85
Perdesaan	2,79	2,82	2,87

Lampiran 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin,
2012–2013
(persen)

Provinsi	Agustus 2012			November 2012			Februari 2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	79,77	44,18	61,77	84,35	47,12	65,52	82,53	48,98	65,56
Sumatera Utara	87,21	52,17	69,41	86,51	60,44	73,26	85,62	60,24	72,72
Sumatera Barat	81,22	48,58	64,47	84,78	56,30	70,17	84,58	56,79	70,32
Riau	84,05	40,41	62,90	87,13	45,73	67,07	87,12	50,78	69,51
Jambi	84,59	44,72	65,07	85,52	49,49	67,87	85,35	52,37	69,21
Sumatera Selatan	86,08	52,57	69,56	85,40	53,59	69,71	85,40	58,10	71,94
Bengkulu	84,25	55,31	70,07	86,50	58,01	72,54	87,29	60,85	74,33
Lampung	84,41	47,02	66,27	86,66	51,68	69,69	86,87	53,00	70,44
Kep. Bangka Belitung	86,77	42,63	65,67	88,67	50,99	70,65	88,12	52,49	71,08
Kepulauan Riau	86,23	45,24	66,25	88,03	52,89	70,90	87,90	52,27	70,53
DKI Jakarta	83,07	59,82	71,56	84,35	54,15	69,40	83,13	53,46	68,44
Jawa Barat	83,50	43,51	63,78	85,31	41,65	63,78	85,46	41,97	64,01
Jawa Tengah	86,03	57,35	71,43	84,87	58,33	71,36	84,20	57,51	70,61
DI Yogyakarta	80,34	61,78	70,85	78,97	57,09	67,78	79,29	59,71	69,27
Jawa Timur	84,77	55,20	69,62	85,47	55,08	69,89	85,20	55,78	70,12
Banten	84,76	44,51	65,03	84,91	51,87	68,72	86,64	49,89	68,62
Bali	84,07	69,89	76,97	84,55	69,42	76,98	85,45	72,38	78,91
Nusa Tenggara Barat	80,86	52,72	66,02	83,74	53,80	67,95	84,07	58,04	70,35
Nusa Tenggara Timur	82,00	59,78	70,58	82,58	61,88	71,94	84,06	66,33	74,95
Kalimantan Barat	85,69	57,27	71,77	86,78	60,40	73,86	85,60	59,68	72,91
Kalimantan Tengah	86,85	51,20	69,90	89,28	58,72	74,75	87,44	56,27	72,63
Kalimantan Selatan	87,31	56,39	71,93	86,08	54,88	70,56	86,06	57,57	71,88
Kalimantan Timur	88,36	42,01	66,64	89,74	43,70	68,16	88,78	47,86	69,60
Sulawesi Utara	81,87	41,32	61,93	85,09	46,13	65,93	84,70	43,88	64,63
Sulawesi Tengah	85,46	46,39	66,38	87,34	55,17	71,62	87,57	55,27	71,79
Sulawesi Selatan	81,76	45,56	62,82	83,37	44,80	63,19	82,77	46,08	63,58
Sulawesi Tenggara	83,28	51,70	67,35	85,03	54,47	69,61	84,24	55,19	69,58
Gorontalo	82,63	43,75	63,08	85,16	44,09	64,49	83,75	45,16	64,33
Sulawesi Barat	87,50	56,29	71,73	86,66	62,23	74,32	85,09	59,99	72,41
Maluku	78,98	48,48	63,71	80,94	53,44	67,17	81,90	54,32	68,09
Maluku Utara	82,67	49,35	66,35	83,58	50,80	67,52	84,50	50,62	67,90
Papua Barat	79,57	52,86	67,12	81,06	56,96	69,85	80,69	53,95	68,25
Papua	88,31	68,36	78,91	89,18	68,68	79,52	88,56	70,92	80,25
Indonesia	84,42	51,39	67,88	85,32	52,67	68,96	85,12	53,36	69,21

Lampiran 6. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin,
2012–2013
(dalam ribu)

Provinsi	Agustus 2012			November 2012			Februari 2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 166,75	631,80	1 798,55	1 249,55	675,53	1 925,08	1 224,34	719,35	1 943,69
Sumatera Utara	3 595,59	2 156,09	5 751,68	3 622,78	2 484,70	6 107,47	3 553,33	2 510,78	6 064,11
Sumatera Barat	1 257,02	780,62	2 037,64	1 328,15	912,68	2 240,83	1 319,43	919,93	2 239,37
Riau	1 670,82	728,18	2 399,00	1 735,02	822,24	2 557,25	1 758,10	941,35	2 699,45
Jambi	949,68	473,95	1 423,62	966,03	535,27	1 501,30	966,64	569,59	1 536,24
Sumatera Selatan	2 235,79	1 297,14	3 532,93	2 223,16	1 337,39	3 560,54	2 235,58	1 455,02	3 690,60
Bengkulu	513,50	316,76	830,27	530,65	338,36	869,01	539,23	361,42	900,65
Lampung	2 300,05	1 149,26	3 449,31	2 359,20	1 287,22	3 646,42	2 366,18	1 321,77	3 687,95
Kep. Bangka Belitung	406,01	177,09	583,10	423,12	215,90	639,01	416,13	225,15	641,29
Kepulauan Riau	550,51	274,05	824,57	580,47	323,04	903,51	577,26	311,16	888,42
DKI Jakarta	2 856,39	1 982,21	4 838,60	2 932,61	1 783,79	4 716,40	2 898,98	1 751,80	4 650,78
Jawa Barat	12 174,18	6 146,93	18 321,11	12 591,27	5 920,25	18 511,53	12 566,07	6 007,30	18 573,37
Jawa Tengah	9 566,27	6 566,62	16 132,89	9 463,00	6 692,45	16 155,45	9 358,95	6 609,14	15 968,09
DI Yogyakarta	1 033,12	834,59	1 867,71	1 025,63	774,84	1 800,47	1 030,75	805,93	1 836,68
Jawa Timur	11 346,80	7 735,19	19 082,00	11 529,13	7 670,73	19 199,86	11 441,57	7 849,80	19 291,37
Banten	3 068,11	1 537,74	4 605,85	3 153,82	1 757,69	4 911,51	3 163,93	1 759,05	4 922,98
Bali	1 237,37	1 031,34	2 268,71	1 251,99	1 027,89	2 279,88	1 271,23	1 079,76	2 350,99
Nusa Tenggara Barat	1 144,80	833,97	1 978,76	1 210,25	825,45	2 035,69	1 203,68	911,67	2 115,34
Nusa Tenggara Timur	1 189,04	906,64	2 095,68	1 213,96	949,22	2 163,18	1 241,62	1 024,51	2 266,12
Kalimantan Barat	1 285,53	820,99	2 106,51	1 296,06	878,70	2 174,76	1 294,23	861,27	2 155,50
Kalimantan Tengah	701,28	368,93	1 070,21	732,24	418,80	1 151,04	718,08	417,99	1 136,07
Kalimantan Selatan	1 119,75	701,58	1 821,33	1 124,32	690,68	1 814,99	1 123,91	737,74	1 861,65
Kalimantan Timur	1 142,66	476,46	1 619,12	1 181,60	502,59	1 684,19	1 170,10	551,72	1 721,82
Sulawesi Utara	658,14	299,15	957,29	690,06	337,39	1 027,45	688,24	322,55	1 010,78
Sulawesi Tengah	773,42	392,02	1 165,44	807,00	472,44	1 279,43	804,16	483,59	1 287,75
Sulawesi Selatan	2 106,67	1 245,24	3 351,91	2 169,58	1 239,41	3 408,99	2 139,78	1 269,15	3 408,93
Sulawesi Tenggara	605,93	369,95	975,88	619,94	397,49	1 017,42	617,06	406,49	1 023,55
Gorontalo	294,46	151,27	445,73	306,49	156,02	462,50	300,76	158,93	459,69
Sulawesi Barat	332,41	216,38	548,78	330,91	242,08	572,98	327,93	233,61	561,54
Maluku	379,73	230,63	610,36	400,01	260,67	660,68	404,47	261,80	666,27
Maluku Utara	285,08	158,86	443,95	289,76	157,70	447,47	295,10	160,58	455,68
Papua Barat	217,97	123,78	341,74	226,58	138,61	365,19	225,10	133,33	358,43
Papua	904,14	623,80	1 527,93	955,42	655,50	1 610,91	964,12	681,92	1 646,04
Indonesia	69 068,97	41 739,19	110 808,15	70 519,73	42 882,69	113 402,42	70 206,02	43 815,17	114 021,19

Lampiran 7. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013

Provinsi	Agustus 2012			November 2012			Februari 2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	73,71	39,00	56,15	78,53	41,48	59,79	76,56	43,94	60,06
Sumatera Utara	82,72	48,04	65,11	83,17	55,25	68,98	81,41	55,71	68,35
Sumatera Barat	76,35	45,00	60,27	80,45	52,48	66,10	79,70	52,75	65,88
Riau	81,36	37,70	60,20	83,79	42,23	63,65	84,21	47,96	66,64
Jambi	82,31	42,82	62,97	83,27	48,07	66,03	82,84	50,89	67,20
Sumatera Selatan	81,89	48,85	65,60	81,13	50,16	65,86	81,25	54,36	67,99
Bengkulu	81,91	52,58	67,54	84,36	55,97	70,44	85,42	59,58	72,76
Lampung	81,38	43,15	62,83	83,27	48,22	66,26	83,32	49,38	66,86
Kep. Bangka Belitung	84,56	40,25	63,38	87,53	48,74	68,98	85,48	50,47	68,74
Kepulauan Riau	81,66	42,74	62,69	85,15	49,81	67,92	83,70	47,44	66,02
DKI Jakarta	75,41	53,37	64,50	77,20	47,89	62,69	76,10	46,90	61,64
Jawa Barat	76,03	39,45	57,99	78,32	37,84	58,35	77,85	38,24	58,31
Jawa Tengah	81,43	53,89	67,41	80,53	54,90	67,48	79,62	54,21	66,68
DI Yogyakarta	77,04	59,44	68,04	76,33	55,07	65,45	76,56	57,17	66,64
Jawa Timur	81,43	52,79	66,75	82,63	52,29	67,08	81,90	53,44	67,32
Banten	76,36	39,81	58,44	78,00	45,22	61,93	77,77	44,97	61,70
Bali	82,32	68,49	75,40	82,92	67,94	75,42	83,80	71,05	77,42
Nusa Tenggara Barat	76,55	49,99	62,55	80,75	49,37	64,21	80,14	54,41	66,57
Nusa Tenggara Timur	79,97	57,73	68,55	81,29	60,19	70,45	82,75	64,64	73,45
Kalimantan Barat	82,84	55,14	69,28	83,38	58,92	71,40	83,13	57,66	70,66
Kalimantan Tengah	84,54	49,08	67,68	87,94	55,52	72,53	85,90	55,20	71,31
Kalimantan Selatan	83,39	52,77	68,16	83,37	51,72	67,63	82,99	55,01	69,07
Kalimantan Timur	80,61	38,13	60,71	82,63	39,85	62,58	81,12	43,37	63,43
Sulawesi Utara	77,24	36,30	57,11	80,77	40,82	61,13	80,35	38,93	59,98
Sulawesi Tengah	82,72	43,93	63,78	85,95	52,71	69,72	85,31	53,73	69,89
Sulawesi Selatan	77,94	42,00	59,14	80,09	41,70	60,01	78,81	42,60	59,87
Sulawesi Tenggara	80,98	48,57	64,63	82,47	51,93	67,06	81,71	52,89	67,17
Gorontalo	80,18	40,70	60,32	83,02	41,73	62,24	81,07	42,30	61,56
Sulawesi Barat	85,94	54,79	70,20	85,02	60,89	72,83	83,76	58,43	70,96
Maluku	73,42	44,46	58,92	76,85	49,95	63,38	77,21	49,85	63,51
Maluku Utara	79,55	46,16	63,19	80,43	45,58	63,36	81,45	46,15	64,16
Papua Barat	75,79	49,29	63,44	77,71	54,66	66,99	76,57	52,14	65,20
Papua	85,11	65,89	76,05	86,66	66,78	77,30	86,34	68,62	78,00
Indonesia	79,57	47,91	63,71	80,95	49,05	64,97	80,32	49,97	65,12

Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Provinsi
dan Status Pekerjaan Utama, 2012–2013

Provinsi	Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji			Pengusaha			Berusaha Sendiri		
	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	35,33	34,76	32,67	4,89	4,86	4,83	36,22	35,74	36,85
Sumatera Utara	36,49	31,92	32,60	3,61	3,47	3,58	32,64	35,40	34,37
Sumatera Barat	30,88	29,91	29,81	4,80	4,86	5,61	38,65	38,23	38,02
Riau	42,48	41,45	41,61	5,19	4,81	4,29	32,74	32,38	32,15
Jambi	36,03	36,44	35,34	4,46	4,21	4,60	35,08	35,00	33,14
Sumatera Selatan	33,28	34,19	30,83	2,68	3,32	3,17	36,11	36,93	37,55
Bengkulu	29,29	26,54	25,35	3,35	3,71	3,60	38,78	39,36	38,86
Lampung	26,55	24,76	25,03	3,88	4,02	3,51	37,66	39,37	38,98
Kep. Bangka Belitung	44,94	40,51	41,74	6,68	7,62	8,70	32,60	31,79	31,84
Kepulauan Riau	65,37	66,48	65,16	4,76	3,27	3,22	22,83	23,51	23,55
DKI Jakarta	68,29	69,45	69,99	3,87	4,86	3,61	20,54	19,01	19,31
Jawa Barat	41,86	42,62	43,99	3,44	3,56	3,43	30,80	29,59	29,91
Jawa Tengah	30,63	32,56	33,34	3,23	3,63	3,44	35,97	34,13	34,31
DI Yogyakarta	39,06	40,57	40,05	4,38	5,05	4,05	31,48	31,50	33,33
Jawa Timur	30,42	30,76	30,70	3,38	3,59	3,63	33,37	32,75	34,49
Banten	55,57	53,27	53,60	2,95	3,46	3,04	24,42	26,36	25,54
Bali	42,93	39,58	38,74	4,01	3,45	3,22	29,14	32,65	32,48
Nusa Tenggara Barat	21,12	23,36	21,33	2,74	3,91	2,93	40,44	41,14	41,67
Nusa Tenggara Timur	18,56	17,92	15,98	1,56	1,25	1,45	44,85	42,91	41,71
Kalimantan Barat	29,74	30,25	28,85	2,74	2,98	3,18	37,16	37,46	38,10
Kalimantan Tengah	36,19	37,01	35,01	3,31	3,36	2,86	35,56	35,78	36,76
Kalimantan Selatan	32,67	35,65	34,11	3,59	3,19	3,08	37,30	38,40	37,62
Kalimantan Timur	52,71	57,66	56,35	4,33	4,22	4,21	27,23	24,77	25,53
Sulawesi Utara	39,06	36,82	35,61	3,99	4,25	5,08	36,02	37,27	38,03
Sulawesi Tengah	28,94	28,03	28,14	4,61	4,05	3,25	39,03	38,92	40,72
Sulawesi Selatan	31,79	31,57	30,92	4,28	4,10	4,24	38,68	41,12	41,80
Sulawesi Tenggara	29,48	29,51	29,90	3,43	3,49	3,18	38,95	38,06	39,05
Gorontalo	31,50	32,90	33,26	5,14	4,90	4,47	37,96	39,59	41,12
Sulawesi Barat	23,33	24,70	22,54	1,93	3,63	2,53	43,77	43,81	43,92
Maluku	26,52	25,33	25,01	1,78	2,83	2,23	46,18	44,48	44,52
Maluku Utara	25,62	30,14	32,59	2,90	2,54	2,72	41,67	40,93	41,43
Papua Barat	36,49	34,22	35,91	2,28	2,63	1,73	38,52	37,17	35,57
Papua	17,91	17,04	16,95	1,05	1,19	1,27	41,76	43,98	42,39
Indonesia	36,36	36,47	36,45	3,50	3,70	3,53	33,57	33,41	33,78

Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Provinsi
dan Status Pekerjaan Utama, 2012–2013
(lanjutan)

Provinsi	Pekerja Bebas			Pekerja Keluarga			Pekerja Rentan		
	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	7,22	5,87	7,63	16,34	18,76	18,01	59,78	60,38	62,50
Sumatera Utara	8,24	6,31	6,27	19,02	22,89	23,18	59,91	64,61	63,82
Sumatera Barat	11,31	11,90	10,50	14,36	15,10	16,05	64,32	65,22	64,57
Riau	5,48	7,70	7,33	14,11	13,67	14,61	52,33	53,74	54,10
Jambi	7,38	5,71	8,13	17,06	18,64	18,79	59,51	59,35	60,05
Sumatera Selatan	5,40	4,63	5,03	22,53	20,94	23,42	64,04	62,50	66,00
Bengkulu	6,40	7,21	5,92	22,17	23,18	26,28	67,36	69,75	71,05
Lampung	10,61	10,55	11,57	21,31	21,30	20,92	69,57	71,22	71,46
Kep. Bangka Belitung	5,35	4,96	4,13	10,44	15,12	13,59	48,38	51,87	49,56
Kepulauan Riau	1,94	2,27	2,36	5,10	4,47	5,71	29,87	30,24	31,62
DKI Jakarta	2,12	2,46	2,77	5,18	4,22	4,32	27,84	25,69	26,40
Jawa Barat	14,82	16,23	14,39	9,08	7,99	8,28	54,70	53,81	52,58
Jawa Tengah	13,96	15,21	15,15	16,21	14,47	13,76	66,14	63,81	63,22
DI Yogyakarta	8,70	9,09	8,99	16,38	13,80	13,59	56,56	54,39	55,90
Jawa Timur	13,51	14,52	12,30	19,32	18,37	18,87	66,20	65,64	65,67
Banten	10,03	8,82	9,68	7,04	8,09	8,13	41,49	43,27	43,36
Bali	9,24	9,27	9,68	14,68	15,05	15,87	53,05	56,97	58,04
Nusa Tenggara Barat	18,64	12,85	13,33	17,05	18,74	20,75	76,13	72,73	75,75
Nusa Tenggara Timur	4,47	4,44	4,14	30,56	33,48	36,72	79,88	80,83	82,57
Kalimantan Barat	3,41	2,81	2,91	26,95	26,49	26,96	67,52	66,77	67,97
Kalimantan Tengah	2,69	2,69	4,25	22,25	21,17	21,12	60,50	59,63	62,13
Kalimantan Selatan	6,49	5,38	5,75	19,95	17,38	19,44	63,74	61,16	62,81
Kalimantan Timur	3,58	2,60	2,13	12,15	10,76	11,78	42,96	38,12	39,44
Sulawesi Utara	10,87	10,01	10,08	10,07	11,64	11,20	56,95	58,93	59,31
Sulawesi Tengah	8,71	9,16	8,72	18,70	19,83	19,17	66,44	67,92	68,61
Sulawesi Selatan	5,28	4,75	4,35	19,96	18,46	18,69	63,92	64,33	64,84
Sulawesi Tenggara	5,73	3,51	3,24	22,41	25,43	24,62	67,08	67,00	66,92
Gorontalo	11,30	11,43	9,23	14,09	11,18	11,92	63,35	62,20	62,26
Sulawesi Barat	5,52	3,86	4,39	25,44	24,00	26,61	74,74	71,67	74,92
Maluku	2,65	2,46	1,57	22,87	24,89	26,67	71,70	71,84	72,76
Maluku Utara	5,17	3,62	4,36	24,63	22,78	18,90	71,47	67,33	64,69
Papua Barat	1,68	1,36	2,49	21,03	24,63	24,29	61,23	63,15	62,36
Papua	1,89	1,75	1,78	37,40	36,04	37,61	81,05	81,77	81,77
Indonesia	10,42	10,61	10,02	16,15	15,81	16,22	60,14	59,83	60,02

Lampiran 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2012–2013

Provinsi	Agustus 2012			November 2012			Februari 2013		
	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	46,86	12,34	40,80	50,50	11,11	38,39	50,83	10,65	38,52
Sumatera Utara	43,40	15,04	41,56	49,07	12,34	38,59	49,39	11,72	38,89
Sumatera Barat	40,60	15,18	44,22	40,22	15,40	44,37	41,23	14,64	44,14
Riau	44,73	13,41	41,86	45,44	13,13	41,43	46,28	11,48	42,25
Jambi	55,04	9,84	35,12	54,41	8,66	36,93	54,19	9,11	36,70
Sumatera Selatan	56,37	11,16	32,48	51,91	11,67	36,42	52,96	11,50	35,53
Bengkulu	52,62	10,09	37,29	59,42	8,94	31,64	60,22	8,46	31,32
Lampung	48,31	16,01	35,68	47,14	15,13	37,73	49,61	12,14	38,25
Kep. Bangka Belitung	28,57	34,00	37,43	27,90	30,65	41,45	26,18	29,85	43,96
Kepulauan Riau	11,93	33,58	54,49	14,15	26,11	59,74	13,18	27,39	59,43
DKI Jakarta	0,53	18,68	80,80	1,64	16,74	81,62	1,07	17,85	81,08
Jawa Barat	21,65	29,43	48,92	18,92	29,70	51,38	19,61	28,97	51,43
Jawa Tengah	31,39	28,65	39,96	29,46	28,84	41,71	30,30	28,49	41,21
DI Yogyakarta	26,91	23,12	49,97	22,77	24,33	52,90	23,43	21,18	55,39
Jawa Timur	39,16	22,33	38,51	38,15	22,21	39,64	38,25	21,96	39,79
Banten	13,09	32,74	54,17	14,56	28,77	56,67	14,35	29,00	56,65
Bali	25,24	22,52	52,23	25,02	23,56	51,41	24,69	22,68	52,63
Nusa Tenggara Barat	44,25	15,91	39,83	38,66	17,13	44,21	43,37	14,63	42,00
Nusa Tenggara Timur	61,61	12,97	25,42	62,98	12,11	24,91	67,69	8,18	24,13
Kalimantan Barat	59,50	13,11	27,39	62,82	10,36	26,82	60,30	11,59	28,11
Kalimantan Tengah	55,41	13,76	30,83	52,53	14,90	32,57	53,80	13,86	32,34
Kalimantan Selatan	41,43	17,65	40,92	36,10	23,09	40,81	38,60	22,55	38,86
Kalimantan Timur	28,35	22,84	48,81	26,07	21,35	52,58	26,66	21,65	51,69
Sulawesi Utara	32,61	17,52	49,87	31,28	21,00	47,72	31,41	18,21	50,37
Sulawesi Tengah	49,88	13,65	36,47	47,17	16,89	35,94	47,40	15,58	37,02
Sulawesi Selatan	44,03	13,35	42,63	41,02	14,93	44,05	41,39	13,38	45,24
Sulawesi Tenggara	40,93	16,34	42,73	42,26	16,17	41,57	42,26	15,27	42,47
Gorontalo	37,80	19,53	42,67	34,27	20,39	45,34	35,13	16,28	48,59
Sulawesi Barat	57,27	9,90	32,83	59,33	9,56	31,11	58,77	9,30	31,93
Maluku	48,99	11,60	39,41	49,41	13,65	36,94	50,09	10,71	39,20
Maluku Utara	55,00	9,94	35,06	52,31	9,36	38,33	48,77	11,58	39,65
Papua Barat	46,52	13,19	40,29	50,75	10,61	38,64	48,42	11,07	40,51
Papua	72,83	5,16	22,00	73,21	3,74	23,06	73,05	4,49	22,46
Indonesia	35,09	21,67	43,24	34,38	21,28	44,34	35,05	20,59	44,36

Lampiran 10. Indikator Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, 2012–2013

Provinsi	Pekerja Paruh Waktu (ribu)			Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen)			Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen)		
	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	492,87	549,84	515,79	27,40	28,56	26,54	49,61	51,52	57,08
Sumatera Utara	1 122,19	1 659,75	1 265,66	19,51	27,18	20,87	55,16	58,08	58,04
Sumatera Barat	499,39	568,35	464,94	24,51	25,36	20,76	50,91	54,47	55,89
Riau	563,95	738,38	825,02	23,51	28,87	30,56	45,02	48,88	50,89
Jambi	455,87	489,93	603,24	32,02	32,63	39,27	41,95	47,41	47,20
Sumatera Selatan	1 002,74	1 012,01	918,05	28,38	28,42	24,88	49,40	51,34	52,69
Bengkulu	207,78	195,53	220,12	25,03	22,50	24,44	53,71	56,69	54,69
Lampung	833,80	1 036,59	894,90	24,17	28,43	24,27	45,75	50,53	52,35
Kep. Bangka Belitung	113,53	139,77	147,16	19,47	21,87	22,95	44,83	59,91	55,50
Kepulauan Riau	74,69	128,97	134,41	9,06	14,27	15,13	57,60	54,08	55,50
DKI Jakarta	284,17	320,87	241,85	5,87	6,80	5,20	61,09	67,73	60,54
Jawa Barat	2 448,12	2 807,88	2 345,86	13,36	15,17	12,63	52,71	57,12	53,38
Jawa Tengah	3 088,98	3 269,80	2 688,15	19,15	20,24	16,83	56,89	60,84	60,17
DI Yogyakarta	382,51	341,47	360,87	20,48	18,97	19,65	62,65	63,58	57,89
Jawa Timur	3 966,83	4 361,77	3 821,03	20,79	22,72	19,81	56,80	59,64	60,81
Banten	462,08	518,39	548,06	10,03	10,55	11,13	56,82	67,24	62,55
Bali	394,18	482,10	481,42	17,37	21,15	20,48	59,23	61,68	60,55
Nusa Tenggara Barat	365,91	422,18	420,69	18,49	20,74	19,89	51,66	56,99	60,12
Nusa Tenggara Timur	658,17	837,44	836,13	31,41	38,71	36,90	58,04	59,70	59,35
Kalimantan Barat	587,28	653,15	644,89	27,88	30,03	29,92	54,27	56,36	55,79
Kalimantan Tengah	251,68	277,44	241,70	23,52	24,10	21,28	50,94	58,86	58,61
Kalimantan Selatan	489,25	590,63	477,95	26,86	32,54	25,67	52,06	55,34	58,71
Kalimantan Timur	225,93	243,78	203,78	13,95	14,47	11,84	49,04	49,88	52,74
Sulawesi Utara	174,45	220,27	170,89	18,22	21,44	16,91	44,38	50,99	51,16
Sulawesi Tengah	301,91	366,09	350,44	25,91	28,61	27,21	43,38	54,93	57,53
Sulawesi Selatan	847,46	1 058,99	881,63	25,28	31,06	25,86	46,41	48,64	49,17
Sulawesi Tenggara	272,72	309,62	284,71	27,95	30,43	27,82	49,97	56,29	59,91
Gorontalo	103,83	93,72	84,47	23,29	20,26	18,38	46,44	58,54	60,25
Sulawesi Barat	206,13	234,54	225,09	37,56	40,93	40,08	46,02	54,51	52,05
Maluku	136,27	168,51	198,14	22,33	25,50	29,74	51,31	60,09	57,90
Maluku Utara	116,51	135,60	132,54	26,24	30,30	29,09	53,59	51,07	51,52
Papua Barat	61,57	77,05	74,97	18,02	21,10	20,92	55,81	60,94	66,02
Papua	331,07	524,52	444,51	21,67	32,56	27,00	51,86	54,16	55,42
Indonesia	21 523,79	24 834,91	22 149,02	19,42	21,90	19,43	53,24	56,94	56,81

Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2012–2013

Provinsi	0 jam*			1–14 jam			15–24 jam		
	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	4,42	1,80	2,63	9,45	7,97	8,07	20,79	17,40	18,10
Sumatera Utara	1,80	2,05	2,12	4,99	7,56	6,67	11,61	13,59	12,76
Sumatera Barat	4,09	3,10	2,03	7,94	7,24	8,40	14,75	13,73	13,97
Riau	2,16	3,42	2,06	7,03	8,57	8,62	15,31	15,90	15,42
Jambi	1,88	1,33	2,12	6,61	7,78	9,87	18,12	15,85	17,77
Sumatera Selatan	1,73	3,21	2,01	5,85	5,21	6,32	17,62	13,72	14,86
Bengkulu	2,46	2,87	1,78	6,85	6,82	6,87	13,95	12,00	12,95
Lampung	4,26	3,12	2,67	8,11	7,62	7,61	14,43	14,32	14,26
Kep. Bangka Belitung	2,93	2,16	2,33	4,21	3,24	4,37	10,42	11,44	10,37
Kepulauan Riau	2,73	3,04	1,74	2,61	4,10	4,97	4,93	6,58	5,87
DKI Jakarta	1,05	0,92	0,84	1,75	2,27	2,06	3,37	3,39	3,98
Jawa Barat	2,85	1,91	1,85	4,10	3,91	4,25	8,72	8,73	8,58
Jawa Tengah	2,95	2,72	2,79	5,91	5,55	5,93	10,52	9,94	9,89
DI Yogyakarta	2,12	2,30	1,31	6,83	6,68	6,54	9,80	8,23	8,15
Jawa Timur	1,61	1,45	1,44	6,76	5,85	6,88	11,73	12,04	12,04
Banten	2,51	1,82	2,13	3,28	3,54	3,25	6,82	5,96	8,00
Bali	1,47	1,62	1,37	4,49	4,95	4,92	7,33	8,92	8,44
Nusa Tenggara Barat	4,27	2,94	2,06	11,40	7,88	8,36	15,94	15,16	13,88
Nusa Tenggara Timur	3,10	3,20	2,19	10,29	10,02	9,10	16,70	19,52	17,14
Kalimantan Barat	1,80	1,11	0,94	4,71	4,95	4,61	18,94	17,68	16,44
Kalimantan Tengah	1,68	2,00	1,95	5,13	6,27	6,45	13,07	13,19	12,16
Kalimantan Selatan	6,43	2,40	2,45	7,01	8,07	6,44	16,07	14,89	15,50
Kalimantan Timur	1,91	1,35	1,29	3,55	2,73	3,35	7,71	6,72	6,69
Sulawesi Utara	1,45	1,79	2,99	5,09	5,07	4,72	11,42	12,18	11,57
Sulawesi Tengah	7,85	4,23	3,99	9,80	9,37	9,38	14,77	14,08	12,31
Sulawesi Selatan	5,58	4,22	2,50	10,62	11,11	10,99	14,64	15,93	15,62
Sulawesi Tenggara	7,01	4,05	3,04	10,26	9,89	8,22	16,49	14,76	15,49
Gorontalo	8,31	5,17	5,41	6,80	6,50	5,98	11,88	10,50	9,65
Sulawesi Barat	6,03	5,26	4,40	19,16	15,67	19,45	19,76	21,11	16,23
Maluku	4,05	2,64	2,52	6,42	6,87	7,64	15,41	12,12	14,72
Maluku Utara	5,18	2,48	4,20	9,04	8,36	6,95	16,29	18,15	15,38
Papua Barat	3,27	3,31	2,25	6,01	4,35	3,94	13,42	13,75	13,11
Papua	1,02	0,72	0,64	3,58	2,73	7,03	12,62	14,41	16,02
Indonesia	2,72	2,22	2,02	5,97	5,83	6,18	11,54	11,43	11,42

*0 jam: Sementara tidak bekerja

Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2012–2013
(lanjutan)

Provinsi	25–34 jam			35–39 jam			40–48 jam		
	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	20,38	20,17	19,35	11,66	13,37	11,86	17,26	20,35	20,87
Sumatera Utara	13,91	16,25	16,19	12,15	13,48	12,88	32,64	26,77	28,98
Sumatera Barat	16,86	14,93	14,31	11,81	11,20	10,20	21,78	23,19	24,97
Riau	14,50	15,37	15,45	9,18	8,58	10,99	26,13	22,67	22,34
Jambi	22,22	22,63	23,91	14,27	17,73	12,53	18,69	20,62	19,13
Sumatera Selatan	18,94	18,24	17,78	12,66	12,64	13,61	22,68	24,97	24,24
Bengkulu	16,93	14,97	13,90	11,99	12,47	11,17	22,72	31,95	30,69
Lampung	13,63	16,34	15,67	8,86	10,71	10,27	22,46	22,03	24,16
Kep. Bangka Belitung	15,06	14,19	13,96	10,64	8,00	9,51	31,88	37,29	34,59
Kepulauan Riau	5,69	8,30	7,94	6,30	6,51	7,76	37,88	40,90	40,72
DKI Jakarta	4,18	4,19	5,24	6,73	5,20	4,33	49,63	47,02	47,12
Jawa Barat	10,64	10,88	10,74	9,63	8,23	9,28	34,91	35,16	35,38
Jawa Tengah	12,98	12,96	12,52	10,46	9,05	9,32	28,81	30,54	30,28
DI Yogyakarta	11,61	9,68	9,56	10,16	9,94	9,70	31,50	33,78	36,86
Jawa Timur	14,10	14,01	14,22	9,99	10,66	9,77	27,95	26,55	26,98
Banten	8,82	8,75	10,49	8,98	8,43	7,14	43,40	44,93	43,97
Bali	10,41	10,37	10,64	8,22	9,81	8,55	27,62	26,91	27,29
Nusa Tenggara Barat	17,15	17,52	16,75	10,45	8,90	10,08	18,53	22,17	23,31
Nusa Tenggara Timur	20,53	20,18	22,93	14,41	14,25	14,13	21,95	21,03	22,26
Kalimantan Barat	20,17	16,40	17,92	11,49	13,79	13,43	25,44	26,30	28,34
Kalimantan Tengah	17,53	14,94	14,46	11,43	9,21	10,49	25,86	27,15	28,21
Kalimantan Selatan	16,44	18,28	16,06	11,06	12,21	11,73	22,11	24,83	24,80
Kalimantan Timur	10,59	10,71	9,85	9,48	9,99	9,74	27,57	27,16	31,41
Sulawesi Utara	11,95	12,33	11,94	10,19	10,73	10,99	35,93	34,38	36,29
Sulawesi Tengah	14,98	16,13	16,25	11,71	12,68	13,93	20,44	20,69	22,31
Sulawesi Selatan	13,67	15,29	16,68	9,46	11,08	10,43	21,35	19,53	20,83
Sulawesi Tenggara	17,07	16,17	14,93	9,98	11,38	11,46	17,46	20,33	22,67
Gorontalo	15,05	11,22	12,33	9,34	14,58	13,06	17,99	24,29	25,21
Sulawesi Barat	17,52	19,40	18,62	9,39	10,83	8,83	13,05	14,50	18,02
Maluku	16,96	15,52	17,60	12,55	15,13	15,16	22,54	27,45	23,41
Maluku Utara	18,30	21,03	21,32	14,28	14,14	13,79	20,38	21,37	20,09
Papua Barat	15,21	16,75	14,83	12,99	11,85	12,33	24,27	25,16	29,97
Papua	21,94	24,92	22,27	20,75	21,47	18,96	27,30	22,80	22,72
Indonesia	13,43	13,67	13,72	10,36	10,32	10,17	29,43	29,38	29,84

Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2012–2013
(lanjutan)

Provinsi	49–59 jam			60 jam Keatas		
	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Aceh	9,96	11,19	11,52	6,08	7,75	7,60
Sumatera Utara	12,09	9,20	10,95	10,81	11,10	9,46
Sumatera Barat	14,66	16,71	15,06	8,12	9,91	11,06
Riau	13,27	13,55	11,25	12,43	11,94	13,87
Jambi	10,85	8,94	8,08	7,36	5,12	6,59
Sumatera Selatan	11,89	13,62	12,77	8,62	8,38	8,41
Bengkulu	14,44	12,92	16,13	10,65	6,00	6,52
Lampung	19,11	17,41	17,26	9,13	8,44	8,10
Kep. Bangka Belitung	13,73	15,19	15,73	11,14	8,49	9,14
Kepulauan Riau	20,31	19,13	19,04	19,55	11,43	11,96
DKI Jakarta	15,56	16,56	17,33	17,73	20,43	19,10
Jawa Barat	15,44	15,94	15,52	13,70	15,24	14,41
Jawa Tengah	17,47	18,18	17,90	10,91	11,06	11,37
DI Yogyakarta	18,28	18,58	18,89	9,70	10,80	8,98
Jawa Timur	16,77	17,83	17,28	11,09	11,60	11,38
Banten	13,80	13,46	13,16	12,38	13,11	11,86
Bali	21,95	21,84	22,29	18,51	15,58	16,50
Nusa Tenggara Barat	14,55	14,98	17,04	7,70	10,46	8,51
Nusa Tenggara Timur	7,01	6,62	7,19	6,02	5,19	5,05
Kalimantan Barat	10,82	13,58	12,15	6,62	6,18	6,17
Kalimantan Tengah	14,94	13,98	14,94	10,38	13,27	11,34
Kalimantan Selatan	11,99	10,44	13,20	8,88	8,88	9,82
Kalimantan Timur	18,16	19,53	17,93	21,03	21,81	19,75
Sulawesi Utara	12,39	13,54	11,65	11,58	9,98	9,85
Sulawesi Tengah	11,51	13,38	13,02	8,93	9,43	8,81
Sulawesi Selatan	14,30	13,56	13,84	10,39	9,28	9,10
Sulawesi Tenggara	12,55	15,72	15,21	9,19	7,71	8,98
Gorontalo	17,09	15,80	16,29	13,54	11,95	12,07
Sulawesi Barat	9,50	9,07	9,60	5,59	4,16	4,86
Maluku	9,00	9,43	10,35	13,07	10,84	8,60
Maluku Utara	9,43	10,44	11,33	7,10	4,03	6,95
Papua Barat	12,73	11,84	12,46	12,10	13,00	11,12
Papua	5,99	5,78	5,76	6,80	7,17	6,60
Indonesia	15,09	15,39	15,25	11,44	11,76	11,40

Lampiran 12. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Sektor (Formal dan Informal), 2012–2013

Provinsi	Formal			Informal		
	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	44,14	43,41	41,64	55,86	56,59	58,36
Sumatera Utara	45,88	40,49	41,32	54,12	59,51	58,68
Sumatera Barat	42,89	41,27	42,18	57,11	58,73	57,82
Riau	52,22	50,31	49,95	47,78	49,69	50,05
Jambi	44,33	45,71	44,55	55,67	54,29	55,45
Sumatera Selatan	39,45	41,84	38,96	60,55	58,16	61,04
Bengkulu	37,82	34,56	34,13	62,18	65,44	65,87
Lampung	37,05	35,90	35,44	62,95	64,10	64,56
Kep. Bangka Belitung	56,24	54,43	56,33	43,76	45,57	43,67
Kepulauan Riau	74,10	72,60	71,74	25,90	27,40	28,26
DKI Jakarta	78,43	79,02	79,06	21,57	20,98	20,94
Jawa Barat	52,38	53,05	54,29	47,62	46,95	45,71
Jawa Tengah	42,90	43,84	44,56	57,10	56,16	55,44
DI Yogyakarta	52,11	53,56	53,68	47,89	46,44	46,32
Jawa Timur	41,05	41,19	41,76	58,95	58,81	58,24
Banten	64,32	63,65	62,89	35,68	36,35	37,11
Bali	55,11	52,19	51,46	44,89	47,81	48,54
Nusa Tenggara Barat	31,34	35,77	32,05	68,66	64,23	67,95
Nusa Tenggara Timur	23,75	22,72	20,41	76,25	77,28	79,59
Kalimantan Barat	35,88	36,58	36,35	64,12	63,42	63,65
Kalimantan Tengah	43,35	45,68	43,42	56,65	54,32	56,58
Kalimantan Selatan	42,78	45,61	44,12	57,22	54,39	55,88
Kalimantan Timur	62,41	67,01	65,75	37,59	32,99	34,25
Sulawesi Utara	47,08	46,10	45,72	52,92	53,90	54,28
Sulawesi Tengah	38,44	38,73	37,56	61,56	61,27	62,44
Sulawesi Selatan	41,95	43,03	43,02	58,05	56,97	56,98
Sulawesi Tenggara	40,04	39,81	40,07	59,96	60,19	59,93
Gorontalo	41,59	44,25	45,20	58,41	55,75	54,80
Sulawesi Barat	32,04	34,74	32,50	67,96	65,26	67,50
Maluku	32,78	34,45	32,96	67,22	65,55	67,04
Maluku Utara	32,50	36,70	39,76	67,50	63,30	60,24
Papua Barat	43,22	40,34	41,58	56,78	59,66	58,42
Papua	21,10	20,68	20,53	78,90	79,32	79,47
Indonesia	46,43	46,51	46,52	53,57	53,49	53,48

Lampiran 13. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013
(persen)

Provinsi	Agustus 2012			November 2012			Februari 2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	7,60	11,74	9,10	6,89	11,98	8,74	7,23	10,28	8,38
Sumatera Utara	5,14	7,90	6,20	3,86	8,59	5,84	4,91	7,52	6,01
Sumatera Barat	5,99	7,36	6,52	5,11	6,79	5,80	5,78	7,11	6,33
Riau	3,21	6,72	4,30	3,84	7,64	5,10	3,35	5,57	4,13
Jambi	2,69	4,26	3,22	2,63	2,86	2,71	2,94	2,84	2,90
Sumatera Selatan	4,87	7,09	5,70	5,00	6,39	5,53	4,86	6,44	5,49
Bengkulu	2,78	4,93	3,61	2,47	3,52	2,88	2,15	2,09	2,12
Lampung	3,59	8,22	5,18	3,92	6,71	4,92	4,09	6,83	5,09
Kep. Bangka Belitung	2,54	5,58	3,49	1,29	4,40	2,36	3,00	3,84	3,30
Kepulauan Riau	5,30	5,51	5,37	3,28	5,82	4,20	4,78	9,25	6,39
DKI Jakarta	9,22	10,80	9,87	8,48	11,56	9,67	8,46	12,27	9,94
Jawa Barat	8,95	9,33	9,08	8,20	9,16	8,50	8,91	8,89	8,90
Jawa Tengah	5,35	6,04	5,63	5,11	5,88	5,43	5,44	5,75	5,57
DI Yogyakarta	4,11	3,79	3,97	3,34	3,54	3,43	3,44	4,25	3,80
Jawa Timur	3,95	4,36	4,12	3,32	5,07	4,03	3,87	4,20	4,00
Banten	9,91	10,57	10,13	8,14	12,84	9,88	10,24	9,85	10,10
Bali	2,08	2,00	2,04	1,93	2,12	2,02	1,94	1,84	1,89
Nusa Tenggara Barat	5,34	5,16	5,26	3,57	8,23	5,52	4,69	6,26	5,37
Nusa Tenggara Timur	2,48	3,42	2,89	1,56	2,73	2,08	1,55	2,55	2,01
Kalimantan Barat	3,33	3,73	3,48	3,91	2,47	3,33	2,88	3,39	3,09
Kalimantan Tengah	2,65	4,14	3,17	1,50	5,45	2,98	1,77	1,91	1,82
Kalimantan Selatan	4,49	6,42	5,25	3,14	5,76	4,15	3,56	4,44	3,91
Kalimantan Timur	8,76	9,24	8,90	7,92	8,80	8,19	8,63	9,38	8,87
Sulawesi Utara	5,66	12,14	7,79	5,08	11,50	7,29	5,14	11,29	7,19
Sulawesi Tengah	3,21	5,31	3,93	1,59	4,45	2,66	2,57	2,78	2,65
Sulawesi Selatan	4,67	7,83	5,87	3,93	6,91	5,03	4,78	7,55	5,83
Sulawesi Tenggara	2,76	6,07	4,04	3,02	4,66	3,67	3,00	4,17	3,47
Gorontalo	2,97	6,98	4,36	2,51	5,37	3,49	3,20	6,33	4,31
Sulawesi Barat	1,78	2,67	2,14	1,90	2,16	2,01	1,57	2,61	2,00
Maluku	7,04	8,28	7,51	5,06	6,53	5,64	5,73	8,23	6,73
Maluku Utara	3,78	6,46	4,76	3,77	10,28	6,17	3,60	8,83	5,51
Papua Barat	4,75	6,76	5,49	4,13	4,03	4,09	5,11	3,36	4,47
Papua	3,63	3,62	3,63	2,83	2,76	2,80	2,51	3,25	2,81
Indonesia	5,75	6,77	6,14	5,12	6,86	5,79	5,64	6,36	5,92

Lampiran 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2012–2013
(persen)

Provinsi	Pendidikan Dasar ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	6,26	6,26	6,15	15,46	12,33	11,48	6,88	11,76	11,23
Sumatera Utara	4,68	4,23	4,51	8,78	8,27	8,59	6,73	8,45	7,01
Sumatera Barat	4,68	4,49	5,11	10,23	8,20	9,37	7,15	6,65	5,17
Riau	3,18	3,40	2,29	6,44	8,06	7,34	4,59	5,59	5,14
Jambi	1,82	1,13	2,05	6,80	5,78	3,09	4,23	5,53	7,58
Sumatera Selatan	3,79	3,93	3,69	10,31	9,80	10,48	8,01	5,02	4,39
Bengkulu	2,09	1,31	1,37	7,00	4,02	3,47	3,93	9,67	3,67
Lampung	3,51	3,50	3,88	10,17	9,46	9,12	5,08	4,99	3,78
Kep. Bangka Belitung	2,57	1,76	2,42	5,29	4,37	3,40	5,10	0,00	10,19
Kepulauan Riau	3,75	5,03	6,48	7,38	4,82	7,09	3,09	0,00	4,33
DKI Jakarta	9,17	9,17	9,59	10,33	11,04	12,51	10,21	7,79	5,18
Jawa Barat	8,25	7,22	8,02	12,71	12,71	12,36	5,29	6,00	5,52
Jawa Tengah	4,61	4,91	5,12	9,66	7,78	7,78	5,29	4,37	4,05
DI Yogyakarta	2,14	1,84	1,37	6,09	4,08	3,53	5,76	6,99	11,18
Jawa Timur	2,87	3,21	3,10	8,23	6,58	6,59	4,32	4,22	4,63
Banten	9,63	11,40	10,50	11,84	8,88	11,62	7,96	4,69	4,72
Bali	1,24	1,49	1,94	3,09	2,17	2,24	2,89	4,12	0,89
Nusa Tenggara Barat	3,59	5,58	5,00	11,44	6,74	5,67	5,12	2,11	7,74
Nusa Tenggara Timur	1,80	1,20	1,06	7,32	6,37	5,54	4,86	3,52	5,61
Kalimantan Barat	2,62	2,07	2,38	7,02	9,12	5,18	3,07	2,16	5,22
Kalimantan Tengah	2,05	2,45	1,83	6,05	5,17	1,72	5,60	2,48	1,97
Kalimantan Selatan	4,59	3,35	3,80	8,20	7,09	5,03	3,46	3,92	1,86
Kalimantan Timur	8,90	7,07	10,34	10,66	11,17	8,22	3,29	4,55	5,20
Sulawesi Utara	5,55	5,04	4,69	11,96	11,86	11,84	6,31	6,00	6,98
Sulawesi Tengah	2,27	1,83	2,28	7,39	3,61	3,73	6,57	5,63	2,74
Sulawesi Selatan	4,40	3,51	5,31	9,37	8,92	8,88	6,45	6,01	3,10
Sulawesi Tenggara	1,75	2,91	1,87	7,90	4,86	5,59	7,61	4,94	6,80
Gorontalo	3,31	2,96	3,61	7,94	6,04	7,71	5,92	2,12	2,81
Sulawesi Barat	1,96	1,22	1,11	3,11	4,43	4,86	1,49	3,97	3,62
Maluku	2,85	1,92	3,35	13,62	12,67	13,51	15,00	8,33	7,67
Maluku Utara	3,26	2,53	2,45	8,27	13,29	10,77	5,42	7,83	7,66
Papua Barat	2,96	1,69	2,81	10,06	8,45	7,24	6,46	5,24	5,18
Papua	1,42	1,14	0,98	10,28	8,06	8,56	9,80	6,94	7,78
Indonesia	4,80	4,68	4,91	9,70	8,77	8,78	6,00	5,55	5,22

Lampiran 15. Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan,
2012–2013

Provinsi	Pendidikan Dasar ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	39,81	41,40	42,26	50,99	41,34	40,94	9,19	17,26	16,80
Sumatera Utara	44,50	43,66	44,97	46,37	44,13	45,06	9,12	12,21	9,97
Sumatera Barat	43,64	46,53	48,61	44,39	40,87	42,14	11,97	12,59	9,26
Riau	44,34	38,66	32,49	45,17	49,59	53,68	10,49	11,75	13,83
Jambi	37,76	27,18	46,08	48,98	50,91	25,25	13,26	21,92	28,67
Sumatera Selatan	45,07	46,74	44,28	42,58	45,47	49,02	12,35	7,80	6,70
Bengkulu	36,22	29,06	42,12	52,87	35,84	39,92	10,91	35,10	17,96
Lampung	46,70	50,38	53,14	45,92	42,63	41,63	7,38	6,99	5,23
Kep. Bangka Belitung	48,48	50,11	47,48	40,13	49,89	28,46	11,39	0,00	24,06
Kepulauan Riau	28,73	54,94	47,88	64,33	45,06	41,99	6,93	0,00	10,13
DKI Jakarta	34,79	32,56	32,04	45,66	49,45	56,58	19,55	17,98	11,39
Jawa Barat	62,17	56,77	59,55	33,23	37,57	35,09	4,60	5,66	5,36
Jawa Tengah	60,62	66,29	67,35	33,14	27,97	27,58	6,24	5,74	5,06
DI Yogyakarta	28,40	27,15	17,12	52,27	39,60	33,08	19,33	33,25	49,80
Jawa Timur	49,84	55,86	53,87	42,94	35,77	36,64	7,22	8,37	9,49
Banten	55,17	69,54	60,71	36,28	24,57	33,42	8,54	5,90	5,86
Bali	33,31	42,75	58,99	48,38	32,44	34,91	18,32	24,81	6,10
Nusa Tenggara Barat	48,41	69,95	66,11	42,29	26,57	21,56	9,30	3,48	12,33
Nusa Tenggara Timur	48,01	45,83	42,00	39,99	42,63	38,96	12,00	11,55	19,04
Kalimantan Barat	56,11	47,29	57,52	38,18	48,82	30,61	5,71	3,89	11,87
Kalimantan Tengah	46,06	59,19	71,38	38,96	33,54	18,73	14,98	7,27	9,89
Kalimantan Selatan	62,63	58,44	70,90	32,28	34,74	25,83	5,09	6,82	3,27
Kalimantan Timur	53,27	43,07	59,11	42,63	49,08	32,64	4,10	7,85	8,25
Sulawesi Utara	39,40	40,56	37,49	51,50	51,51	51,84	9,10	7,93	10,68
Sulawesi Tengah	38,12	45,29	57,56	44,59	31,32	30,80	17,29	23,39	11,64
Sulawesi Selatan	46,92	45,24	59,41	38,57	39,38	34,00	14,51	15,38	6,60
Sulawesi Tenggara	26,96	49,10	33,43	49,32	31,48	37,79	23,72	19,42	28,79
Gorontalo	55,96	60,40	59,67	32,81	34,18	33,88	11,23	5,41	6,46
Sulawesi Barat	66,42	45,06	40,71	27,62	39,04	45,70	5,96	15,91	13,59
Maluku	22,13	20,75	29,56	53,50	62,79	56,06	24,37	16,46	14,38
Maluku Utara	44,12	24,78	26,17	44,43	60,57	57,64	11,45	14,65	16,19
Papua Barat	31,61	24,28	35,75	55,07	60,11	50,09	13,32	15,62	14,16
Papua	29,16	30,40	26,27	53,30	54,18	56,32	17,54	15,42	17,41
Indonesia	51,58	52,94	53,93	39,66	37,90	37,50	8,76	9,16	8,57

Lampiran 16. Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2012–2013

Provinsi	Pendidikan Dasar ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	64,21	57,14	59,19	28,65	34,03	30,94	7,14	8,84	9,87
Sumatera Utara	62,54	63,45	63,82	32,15	31,17	30,73	5,30	5,39	5,45
Sumatera Barat	68,96	69,02	67,26	24,14	21,48	22,66	6,90	9,50	10,07
Riau	72,31	68,14	68,77	24,00	24,92	20,23	3,70	6,94	11,00
Jambi	74,40	64,75	65,90	20,36	24,08	25,47	5,24	11,17	8,63
Sumatera Selatan	76,26	69,74	72,87	19,45	24,69	21,22	4,30	5,57	5,91
Bengkulu	71,22	72,01	66,48	24,51	20,98	26,76	4,27	7,01	6,76
Lampung	72,44	71,02	75,96	22,61	23,09	18,61	4,95	5,90	5,43
Kep. Bangka Belitung	70,18	77,13	71,01	25,77	22,87	27,10	4,05	0,00	1,89
Kepulauan Riau	66,49	70,01	66,33	27,53	29,99	32,93	5,98	0,00	0,74
DKI Jakarta	47,26	37,01	47,40	37,43	36,53	33,65	15,31	26,46	18,95
Jawa Barat	83,01	83,41	81,52	13,08	13,05	13,50	3,91	3,54	4,97
Jawa Tengah	82,21	79,50	82,43	13,87	14,42	12,85	3,92	6,08	4,72
DI Yogyakarta	50,33	56,44	58,85	39,37	30,86	33,62	10,30	12,70	7,52
Jawa Timur	82,86	77,31	77,86	13,69	17,52	17,19	3,45	5,17	4,95
Banten	83,90	76,92	78,10	10,67	15,01	16,53	5,43	8,07	5,37
Bali	66,68	67,82	66,97	26,85	28,20	20,85	6,46	3,98	12,18
Nusa Tenggara Barat	79,29	66,25	74,56	15,39	23,79	18,41	5,33	9,95	7,03
Nusa Tenggara Timur	83,03	82,15	77,56	14,41	11,38	15,57	2,56	6,47	6,87
Kalimantan Barat	82,37	78,15	76,37	15,39	15,20	16,62	2,24	6,65	7,01
Kalimantan Tengah	78,79	77,16	72,08	17,34	18,50	21,75	3,87	4,34	6,17
Kalimantan Selatan	78,11	80,04	81,07	18,78	17,58	14,45	3,11	2,38	4,48
Kalimantan Timur	71,06	55,83	59,38	21,98	34,36	31,98	6,97	9,81	8,64
Sulawesi Utara	64,55	66,71	65,50	29,33	29,65	28,49	6,12	3,64	6,01
Sulawesi Tengah	79,45	73,78	73,44	16,40	19,85	20,15	4,15	6,37	6,41
Sulawesi Selatan	71,29	68,58	67,36	22,30	21,60	22,18	6,41	9,81	10,47
Sulawesi Tenggara	67,93	62,96	70,15	24,84	24,66	21,08	7,23	12,38	8,77
Gorontalo	87,84	79,16	84,09	11,20	17,81	10,24	0,95	3,03	5,67
Sulawesi Barat	74,66	69,22	76,36	22,37	28,10	18,97	2,98	2,68	4,67
Maluku	65,67	51,42	58,40	30,83	42,82	34,30	3,50	5,76	7,30
Maluku Utara	72,07	70,92	61,77	23,39	25,25	30,01	4,54	3,83	8,23
Papua Barat	72,99	75,61	64,56	20,51	16,13	31,16	6,50	8,26	4,28
Papua	84,45	71,55	83,65	13,16	24,86	14,44	2,38	3,58	1,91
Indonesia	77,27	73,51	74,74	18,18	20,12	19,04	4,55	6,37	6,22

Lampiran 17. Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja
Menurut Provinsi, 2012–2013
(dalam ribu)

Provinsi	2012		2013
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1 224,47	1 110,23	1 114,70
Sumatera Utara	2 702,65	2 367,04	2 420,05
Sumatera Barat	1 201,07	1 011,21	1 008,79
Riau	1 478,48	1 323,16	1 234,89
Jambi	789,77	730,45	704,01
Sumatera Selatan	1 639,36	1 637,53	1 523,10
Bengkulu	367,91	338,79	317,73
Lampung	1 851,69	1 667,82	1 630,65
Kep. Bangka Belitung	315,90	271,86	269,82
Kepulauan Riau	443,91	387,12	396,52
DKI Jakarta	2 133,62	2 302,06	2 381,09
Jawa Barat	11 444,05	11 491,61	11 463,11
Jawa Tengah	6 838,38	6 857,42	7 037,22
DI Yogyakarta	800,21	886,42	846,92
Jawa Timur	8 685,37	8 616,97	8 561,77
Banten	2 755,86	2 480,79	2 503,66
Bali	692,94	695,89	640,40
Nusa Tenggara Barat	1 074,98	1 016,02	942,27
Nusa Tenggara Timur	899,33	861,47	772,87
Kalimantan Barat	858,27	796,09	826,44
Kalimantan Tengah	475,97	400,68	436,09
Kalimantan Selatan	750,14	790,22	757,87
Kalimantan Timur	889,72	856,81	825,09
Sulawesi Utara	638,10	572,60	596,04
Sulawesi Tengah	614,31	520,75	519,83
Sulawesi Selatan	2 107,09	2 091,29	2 073,97
Sulawesi Tenggara	493,03	461,00	463,48
Gorontalo	272,81	263,85	266,32
Sulawesi Barat	220,99	202,05	218,31
Maluku	375,96	342,19	334,76
Maluku Utara	236,42	229,40	227,99
Papua Barat	177,11	164,37	174,54
Papua	423,71	426,72	416,72
Indonesia	55 873,59	54 171,87	53 907,00

Lampiran 18. Tingkat Ketidaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2012–2013
(persen)

Provinsi	Agustus 2012			November 2012			Februari 2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	20,23	55,82	38,23	15,65	52,88	34,48	17,47	51,02	34,44
Sumatera Utara	12,79	47,83	30,59	13,49	39,56	26,74	14,38	39,76	27,28
Sumatera Barat	18,78	51,42	35,53	15,22	43,70	29,83	15,42	43,21	29,68
Riau	15,95	59,59	37,10	12,87	54,27	32,93	12,88	49,22	30,49
Jambi	15,41	55,28	34,93	14,48	50,51	32,13	14,65	47,63	30,79
Sumatera Selatan	13,92	47,43	30,44	14,60	46,41	30,29	14,60	41,90	28,06
Bengkulu	15,75	44,69	29,93	13,50	41,99	27,46	12,71	39,15	25,67
Lampung	15,59	52,98	33,73	13,34	48,32	30,31	13,13	47,00	29,56
Kep. Bangka Belitung	13,23	57,37	34,33	11,33	49,01	29,35	11,88	47,51	28,92
Kepulauan Riau	13,77	54,76	33,75	11,97	47,11	29,10	12,10	47,73	29,47
DKI Jakarta	16,93	40,18	28,44	15,65	45,85	30,60	16,87	46,54	31,56
Jawa Barat	16,50	56,49	36,22	14,69	58,35	36,22	14,54	58,03	35,99
Jawa Tengah	13,97	42,65	28,57	15,13	41,67	28,64	15,80	42,49	29,39
DI Yogyakarta	19,66	38,22	29,15	21,03	42,91	32,22	20,71	40,29	30,73
Jawa Timur	15,23	44,80	30,38	14,53	44,92	30,11	14,80	44,22	29,88
Banten	15,24	55,49	34,97	15,09	48,13	31,28	13,36	50,11	31,38
Bali	15,93	30,11	23,03	15,45	30,58	23,02	14,55	27,62	21,09
Nusa Tenggara Barat	19,14	47,28	33,98	16,26	46,20	32,05	15,93	41,96	29,65
Nusa Tenggara Timur	18,00	40,22	29,42	17,42	38,12	28,06	15,94	33,67	25,05
Kalimantan Barat	14,31	42,73	28,23	13,22	39,60	26,14	14,40	40,32	27,09
Kalimantan Tengah	13,15	48,80	30,10	10,72	41,28	25,25	12,56	43,73	27,37
Kalimantan Selatan	12,69	43,61	28,07	13,92	45,12	29,44	13,94	42,43	28,12
Kalimantan Timur	11,64	57,99	33,36	10,26	56,30	31,84	11,22	52,14	30,40
Sulawesi Utara	18,13	58,68	38,07	14,91	53,87	34,07	15,30	56,12	35,37
Sulawesi Tengah	14,54	53,61	33,62	12,66	44,83	28,38	12,43	44,73	28,21
Sulawesi Selatan	18,24	54,44	37,18	16,63	55,20	36,81	17,23	53,92	36,42
Sulawesi Tenggara	16,72	48,30	32,65	14,97	45,53	30,39	15,76	44,81	30,42
Gorontalo	17,37	56,25	36,92	14,84	55,91	35,51	16,25	54,84	35,67
Sulawesi Barat	12,50	43,71	28,27	13,34	37,77	25,68	14,91	40,01	27,59
Maluku	21,02	51,52	36,29	19,06	46,56	32,83	18,10	45,68	31,91
Maluku Utara	17,33	50,65	33,65	16,42	49,20	32,48	15,50	49,38	32,10
Papua Barat	20,43	47,14	32,88	18,94	43,04	30,15	19,31	46,05	31,75
Papua	11,69	31,64	21,09	10,82	31,32	20,48	11,44	29,08	19,75
Indonesia	15,58	48,61	32,12	14,68	47,33	31,04	14,88	46,64	30,79

Lampiran 19. Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2012–2013

Provinsi	Pendidikan Dasar ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013	Ags 2012	Nov 2012	Feb 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	57,85	57,85	57,57	30,01	29,32	29,89	12,15	12,83	12,54
Sumatera Utara	58,88	60,37	59,93	32,73	31,19	31,52	8,40	8,44	8,55
Sumatera Barat	60,76	60,09	60,21	28,31	28,93	28,46	10,92	10,98	11,33
Riau	60,03	57,92	58,64	30,15	31,36	30,23	9,82	10,72	11,13
Jambi	66,75	65,36	65,30	23,17	23,89	23,72	10,08	10,75	10,98
Sumatera Selatan	67,68	65,77	65,93	23,54	25,64	25,69	8,79	8,59	8,38
Bengkulu	62,66	63,80	65,19	27,31	25,73	24,41	10,03	10,47	10,41
Lampung	69,05	70,92	69,73	23,42	22,18	23,23	7,53	6,90	7,03
Kep. Bangka Belitung	65,77	67,11	64,67	26,44	26,97	27,55	7,78	5,92	7,78
Kepulauan Riau	41,15	45,90	47,22	46,82	39,25	37,83	12,03	14,85	14,95
DKI Jakarta	37,44	34,36	33,19	43,65	43,32	44,95	18,90	22,32	21,85
Jawa Barat	68,38	66,84	66,07	23,72	25,15	25,28	7,90	8,02	8,66
Jawa Tengah	74,05	73,35	73,29	19,31	19,52	19,75	6,64	7,13	6,96
DI Yogyakarta	52,66	50,42	47,52	34,02	33,28	35,57	13,32	16,30	16,91
Jawa Timur	71,62	70,12	69,55	21,49	21,89	22,24	6,89	7,99	8,21
Banten	58,07	60,25	58,41	31,05	27,32	29,05	10,88	12,43	12,54
Bali	55,06	57,73	57,54	32,00	30,11	29,50	12,94	12,16	12,96
Nusa Tenggara Barat	70,98	69,14	71,03	19,46	21,75	20,41	9,56	9,10	8,56
Nusa Tenggara Timur	77,07	79,24	79,09	15,79	13,93	14,10	7,14	6,83	6,81
Kalimantan Barat	74,58	76,15	74,74	18,93	17,84	18,24	6,49	6,01	7,02
Kalimantan Tengah	71,09	71,94	71,06	20,43	19,32	19,82	8,47	8,74	9,12
Kalimantan Selatan	71,63	72,40	73,05	20,65	20,37	20,09	7,72	7,23	6,86
Kalimantan Timur	53,29	49,91	50,71	35,61	35,97	35,21	11,10	14,13	14,08
Sulawesi Utara	55,24	58,70	57,52	33,53	31,66	31,49	11,23	9,64	11,00
Sulawesi Tengah	66,00	65,84	66,82	23,67	23,09	21,90	10,33	11,07	11,28
Sulawesi Selatan	62,64	64,91	65,27	24,16	22,22	22,32	13,20	12,87	12,42
Sulawesi Tenggara	62,20	61,87	61,87	25,21	23,72	23,45	12,59	14,41	14,68
Gorontalo	73,69	71,30	71,18	18,03	19,78	18,94	8,28	8,92	9,88
Sulawesi Barat	72,50	74,27	73,66	18,96	17,69	18,81	8,53	8,04	7,52
Maluku	58,28	60,88	59,46	29,51	27,97	27,93	12,21	11,15	12,61
Maluku Utara	64,42	60,34	58,85	25,54	28,11	29,51	10,04	11,55	11,65
Papua Barat	58,60	58,67	56,90	30,07	29,13	30,90	11,32	12,20	12,20
Papua	74,70	74,96	75,20	18,81	18,82	18,51	6,49	6,22	6,29
Indonesia	65,93	65,44	65,00	25,10	25,02	25,28	8,97	9,54	9,72

Lampiran 20. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usahadan Jenis Kelamin, 2012–2013
(rupiah)

Lapangan Usaha	Agustus 2012			November 2012			Februari 2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1 218 678	779 424	1 126 704	1 275 990	841 604	1 186 844	1 245 174	806 742	1 151 414
2	2 860 972	2 561 570	2 846 124	3 254 185	3 087 105	3 244 787	3 411 456	1 743 368	3 314 664
3	1 556 526	1 111 425	1 389 634	1 542 058	1 118 611	1 380 187	1 523 430	1 074 754	1 353 754
4	2 286 658	1 898 608	2 253 880	2 527 935	1 913 019	2 451 527	2 337 013	1 837 681	2 280 295
5	1 529 808	1 976 521	1 546 430	1 568 394	2 185 673	1 587 910	1 548 548	2 442 073	1 583 840
6	1 402 172	1 092 296	1 281 656	1 334 498	1 139 127	1 257 229	1 312 506	1 059 820	1 213 547
7	1 887 329	2 563 990	1 956 228	1 766 232	2 397 578	1 829 064	1 939 499	2 731 892	2 016 394
8	2 235 984	2 322 866	2 261 128	2 292 779	2 341 658	2 304 945	2 314 766	2 453 457	2 351 996
9	2 145 624	1 592 902	1 883 117	2 177 539	1 558 330	1 870 527	2 207 291	1 615 265	1 916 658
Total	1 756 606	1 390 681	1 630 193	1 789 436	1 401 611	1 652 263	1 799 845	1 409 200	1 661 674

Keterangan lapangan usaha:

- 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri
- 4) Listrik, Gas dan Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
- 7) Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
- 8) Lembaga Keuangan, *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

Lampiran 21. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah, 2012–2013
(rupiah)

Lapangan Usaha	Agustus 2012			November 2012			Februari 2013		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1 275 989	1 080 927	1 126 704	1 483 538	1 082 929	1 186 844	1 336 170	1 088 784	1 151 414
2	3 703 187	1 991 935	2 846 124	4 446 836	1 929 471	3 244 787	4 447 661	1 937 113	3 314 664
3	1 485 007	1 095 645	1 389 634	1 476 560	1 159 113	1 380 187	1 438 660	1 156 745	1 353 754
4	2 468 593	1 579 717	2 253 880	2 730 652	1 525 922	2 451 527	2 474 237	1 580 425	2 280 295
5	1 688 811	1 292 718	1 546 430	1 734 166	1 341 267	1 587 910	1 734 218	1 302 486	1 583 840
6	1 356 449	951 148	1 281 656	1 322 930	989 278	1 257 229	1 269 285	982 573	1 213 547
7	2 127 572	1 398 597	1 956 228	1 983 148	1 343 048	1 829 064	2 191 573	1 422 991	2 016 394
8	2 387 388	1 436 095	2 261 128	2 457 297	1 541 566	2 304 945	2 525 153	1 463 893	2 351 996
9	1 974 656	1 664 571	1 883 117	1 958 873	1 669 881	1 870 527	2 024 416	1 679 033	1 916 658
Total	1 761 303	1 324 900	1 630 193	1 792 011	1 355 169	1 652 263	1 805 573	1 354 210	1 661 674

Keterangan lapangan usaha:

- 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri
- 4) Listrik, Gas, dan Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
- 7) Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
- 8) Lembaga Keuangan, *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

Lampiran 22. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsidan Jenis Kelamin,
2012–2013
(rupiah)

Provinsi	Agustus 2012			November 2012			Februari 2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 660 727	1 506 285	1 611 440	1 689 688	1 533 855	1 641 819	1 708 306	1 546 058	1 654 659
Sumatera Utara	1 614 297	1 351 002	1 531 272	1 634 086	1 359 943	1 548 077	1 665 284	1 368 450	1 572 150
Sumatera Barat	1 800 111	1 658 358	1 748 868	1 832 081	1 688 237	1 771 794	1 869 386	1 661 076	1 785 819
Riau	1 985 444	1 594 925	1 878 833	2 024 545	1 621 661	1 911 423	2 023 681	1 633 334	1 914 546
Jambi	1 580 109	1 289 252	1 491 429	1 598 635	1 316 508	1 506 788	1 591 487	1 340 814	1 511 661
Sumatera Selatan	1 586 246	1 394 741	1 526 334	1 607 485	1 416 836	1 543 994	1 651 845	1 420 495	1 571 972
Bengkulu	1 741 110	1 479 529	1 649 229	1 787 980	1 505 419	1 682 398	1 799 106	1 522 114	1 693 306
Lampung	1 334 932	1 168 757	1 282 110	1 379 541	1 194 365	1 312 553	1 366 828	1 172 615	1 299 472
Kep. Bangka Belitung	1 759 129	1 285 601	1 621 739	1 769 502	1 308 457	1 624 484	1 824 094	1 356 951	1 678 659
Kepulauan Riau	2 492 561	1 910 870	2 303 938	2 518 504	1 937 828	2 309 745	2 559 118	2 000 245	2 361 330
DKI Jakarta	2 412 407	1 863 863	2 195 566	2 440 058	1 901 324	2 236 639	2 466 370	1 926 438	2 264 050
Jawa Barat	1 742 752	1 436 837	1 644 285	1 772 289	1 445 484	1 666 521	1 768 019	1 438 947	1 663 361
Jawa Tengah	1 436 905	1 053 394	1 280 221	1 477 725	1 075 250	1 307 895	1 475 355	1 069 595	1 309 478
DI Yogyakarta	1 603 347	1 283 154	1 473 090	1 621 627	1 291 501	1 490 194	1 670 829	1 331 887	1 528 716
Jawa Timur	1 452 471	1 082 824	1 317 407	1 484 746	1 090 869	1 332 050	1 490 875	1 115 084	1 342 775
Banten	2 040 117	1 613 365	1 896 221	2 069 189	1 621 949	1 914 315	2 076 716	1 619 177	1 916 511
Bali	1 753 316	1 459 935	1 642 040	1 782 758	1 475 229	1 662 481	1 768 291	1 473 372	1 653 608
Nusa Tenggara Barat	1 645 926	1 168 048	1 483 726	1 671 202	1 180 666	1 498 539	1 682 782	1 194 380	1 500 807
Nusa Tenggara Timur	1 647 128	1 527 794	1 605 619	1 661 420	1 550 842	1 625 975	1 678 132	1 567 595	1 638 158
Kalimantan Barat	1 630 766	1 330 221	1 545 423	1 653 139	1 341 076	1 568 468	1 666 902	1 390 426	1 585 237
Kalimantan Tengah	1 897 834	1 653 067	1 832 614	1 902 381	1 672 513	1 842 211	1 929 686	1 699 513	1 866 535
Kalimantan Selatan	1 800 898	1 445 647	1 703 214	1 810 456	1 455 247	1 711 973	1 848 628	1 452 167	1 741 014
Kalimantan Timur	2 430 766	1 742 323	2 264 832	2 453 904	1 775 280	2 279 466	2 507 966	1 804 123	2 320 725
Sulawesi Utara	1 784 149	1 793 290	1 787 109	1 789 074	1 806 667	1 794 899	1 816 057	1 864 899	1 832 064
Sulawesi Tengah	1 681 785	1 473 948	1 608 390	1 714 457	1 496 201	1 637 700	1 765 551	1 480 621	1 663 250
Sulawesi Selatan	1 796 891	1 503 996	1 687 710	1 807 300	1 508 919	1 694 507	1 825 762	1 491 464	1 695 889
Sulawesi Tenggara	1 855 275	1 521 475	1 745 659	1 901 103	1 548 939	1 777 107	1 918 034	1 583 863	1 797 934
Gorontalo	1 538 506	1 369 163	1 471 440	1 585 834	1 416 169	1 510 980	1 579 923	1 414 579	1 507 358
Sulawesi Barat	1 587 255	1 240 856	1 472 477	1 627 769	1 279 985	1 503 920	1 618 686	1 271 516	1 497 155
Maluku	1 929 123	1 806 972	1 884 923	1 935 397	1 864 285	1 911 406	1 954 787	1 834 471	1 910 963
Maluku Utara	2 003 933	1 795 035	1 933 510	2 028 961	1 816 690	1 964 126	2 029 058	1 813 671	1 963 201
Papua Barat	2 177 522	1 981 489	2 123 010	2 211 000	2 005 790	2 156 013	2 192 895	2 068 660	2 160 796
Papua	2 718 756	1 956 306	2 540 426	2 749 949	1 992 719	2 563 784	2 744 904	1 992 026	2 553 870
Indonesia	1 756 606	1 390 681	1 630 193	1 789 436	1 401 611	1 652 263	1 799 845	1 409 200	1 661 674

Lampiran 23. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah,
2012–2013
(rupiah)

Provinsi	Agustus 2012			November 2012			Februari 2013		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 830 518	1 460 014	1 611 440	1 855 432	1 492 533	1 641 819	1 866 116	1 493 185	1 654 659
Sumatera Utara	1 600 361	1 403 891	1 531 272	1 612 785	1 422 108	1 548 077	1 635 041	1 452 010	1 572 150
Sumatera Barat	1 911 653	1 564 866	1 748 868	1 937 970	1 576 595	1 771 794	1 947 673	1 591 618	1 785 819
Riau	2 178 047	1 552 620	1 878 833	2 211 771	1 560 683	1 911 423	2 196 282	1 611 460	1 914 546
Jambi	1 694 252	1 332 256	1 491 429	1 708 788	1 367 575	1 506 788	1 722 391	1 381 183	1 511 661
Sumatera Selatan	1 737 087	1 262 071	1 526 334	1 760 602	1 292 095	1 543 994	1 779 672	1 308 659	1 571 972
Bengkulu	1 871 429	1 446 101	1 649 229	1 898 314	1 469 185	1 682 398	1 920 519	1 452 749	1 693 306
Lampung	1 497 159	1 128 075	1 282 110	1 543 161	1 162 424	1 312 553	1 535 830	1 142 543	1 299 472
Kep. Bangka Belitung	1 706 873	1 482 852	1 621 739	1 715 172	1 484 874	1 624 484	1 763 809	1 550 150	1 678 659
Kepulauan Riau	2 375 376	1 707 758	2 303 938	2 377 863	1 710 881	2 309 745	2 429 871	1 704 676	2 361 330
DKI Jakarta	2 195 566	-	2 195 566	2 236 639	-	2 236 639	2 264 050	-	2 264 050
Jawa Barat	1 744 990	1 216 345	1 644 285	1 777 112	1 264 487	1 666 521	1 775 353	1 252 310	1 663 361
Jawa Tengah	1 355 186	1 153 897	1 280 221	1 375 874	1 202 612	1 307 895	1 393 988	1 176 052	1 309 478
DI Yogyakarta	1 512 864	1 331 001	1 473 090	1 536 969	1 347 477	1 490 194	1 571 513	1 399 487	1 528 716
Jawa Timur	1 419 734	1 077 945	1 317 407	1 439 587	1 101 348	1 332 050	1 452 246	1 118 360	1 342 775
Banten	2 002 963	1 302 376	1 896 221	2 036 080	1 328 313	1 914 315	2 056 316	1 311 431	1 916 511
Bali	1 708 116	1 454 829	1 642 040	1 751 148	1 459 651	1 662 481	1 738 713	1 463 673	1 653 608
Nusa Tenggara Barat	1 594 975	1 293 670	1 483 726	1 647 677	1 318 721	1 498 539	1 643 789	1 318 091	1 500 807
Nusa Tenggara Timur	1 778 910	1 457 313	1 605 619	1 811 781	1 486 995	1 625 975	1 842 403	1 476 189	1 638 158
Kalimantan Barat	1 648 014	1 430 572	1 545 423	1 676 357	1 466 540	1 568 468	1 720 978	1 449 182	1 585 237
Kalimantan Tengah	2 127 870	1 589 169	1 832 614	2 155 313	1 619 161	1 842 211	2 142 784	1 644 091	1 866 535
Kalimantan Selatan	1 815 476	1 556 869	1 703 214	1 830 068	1 579 649	1 711 973	1 837 576	1 623 165	1 741 014
Kalimantan Timur	2 364 503	2 015 602	2 264 832	2 383 031	2 018 444	2 279 466	2 432 937	2 021 460	2 320 725
Sulawesi Utara	1 868 233	1 653 297	1 787 109	1 874 322	1 686 455	1 794 899	1 931 796	1 690 209	1 832 064
Sulawesi Tengah	1 742 491	1 487 290	1 608 390	1 773 161	1 526 320	1 637 700	1 837 244	1 522 488	1 663 250
Sulawesi Selatan	1 921 554	1 369 946	1 687 710	1 964 821	1 410 738	1 694 507	1 969 637	1 398 349	1 695 889
Sulawesi Tenggara	2 007 996	1 543 058	1 745 659	2 023 109	1 554 052	1 777 107	2 040 483	1 581 093	1 797 934
Gorontalo	1 657 795	1 249 346	1 471 440	1 683 379	1 277 239	1 510 980	1 700 399	1 260 823	1 507 358
Sulawesi Barat	1 588 403	1 397 194	1 472 477	1 604 550	1 425 379	1 503 920	1 616 166	1 409 094	1 497 155
Maluku	1 977 447	1 731 216	1 884 923	2 010 595	1 766 985	1 911 406	2 025 767	1 753 956	1 910 963
Maluku Utara	2 166 000	1 741 006	1 933 510	2 211 110	1 787 117	1 964 126	2 219 678	1 796 770	1 963 201
Papua Barat	2 282 244	2 014 265	2 123 010	2 299 572	2 049 125	2 156 013	2 352 639	2 037 419	2 160 796
Papua	2 630 092	2 366 406	2 540 426	2 668 833	2 408 074	2 563 784	2 674 035	2 370 982	2 553 870
Indonesia	1 761 303	1 324 900	1 630 193	1 792 011	1 355 169	1 652 263	1 805 573	1 354 210	1 661 674

Lampiran 24. Tabulasi Silang Batasan Kegiatan Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama

Batasan Kegiatan Informal

Status Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Utama									
	Tenaga Profesional	Tenaga Kepemimpinan	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha	Tenaga Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Pertanian	Tenaga Produksi	Tenaga Operasional	Pekerja Kasar	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Berusaha Sendiri	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Berusaha Dibantu Buruh tidak Tetap/Buruh tak Dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Buruh/Karyawan/Pegawai	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja Bebas di Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Bebas di Nonpertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Keluarga/tak Dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Keterangan: F = Formal
INF = Informal

